

**ELEMEN PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM
PERKEMBANGAN WISATA DESA ADAT PANCASARI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Teknik



Disusun oleh:

LUH KETUT YULITRISNA DEWI

NIM. 105060601111020

PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

2014

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas berkah dan hidayah-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul “Elemen Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perkembangan Wisata Desa Adat Pancasari” dapat terselesaikan..

Dalam proses pembuatan laporan ini penulis mendapat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak tercinta yang telah memberikan dukungan doa dan materi yang tiada habisnya.
2. Ibu Nindya Sari, ST., MT. selaku dosen pengampu sekaligus dosen pembimbing pertama dan Bapak Dr. Eng. I Nyoman Suluh Wijaya, ST., MT. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penyelesaian laporan ini.
3. Bapak Fauzul Rizal Sutikno, ST., MT. selaku dosen penguji pertama dan Ibu Dian Dinanti, ST., MT. selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan kritikan dan saran untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, perangkat Desa Pancasari, masyarakat Desa Pancasari yang telah membantu dalam pengumpulan data.
5. Sahabat dan keluarga Kos Bejat 25, Unikahidha, KWU, Anak-anak BC, The Freaks (Giceng, Cisika, Phe, Inyos), kelompok SPD Sumberjati, SPK Danurejan, UDS Ayaners Magelang, dan SPW Pariwisata Maros atas segala jenis kebersamaannya.
6. Aji Firmana Widhiaputra, terimakasih atas motivasi, dukungan, dan kesediannya menemani begadang dan di waktu suntuk.
7. Teman-teman seperjuangan PWK 2010, serta semua pihak yang telah berpartisipasi dalam proses penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik untuk menyempurnakan penelitian ini.

Malang, 27 Januari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	2
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat.....	3
1.4.1 Tujuan	3
1.4.2 Sasaran	3
1.4.3 Manfaat	3
1.5 Ruang Lingkup.....	4
1.5.1 Ruang lingkup materi.....	4
1.5.2 Ruang lingkup wilayah	4
1.6 Kerangka Pemikiran.....	9
1.7 Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Unsur – Unsur Pokok Kepariwisataaan.....	11
2.2 Pariwisata Berkelanjutan.....	11
2.3 Elemen Pariwisata Berkelanjutan	12
2.3.1 Guna lahan	12
2.3.2 Kepemilikan lahan	13
2.3.3 Kearifan lokal.....	14
2.3.4 Migrasi penduduk	17
2.3.5 Mata pencaharian	17
2.3.6 Ketenagakerjaan.....	18
2.3.7 Karakteristik wisatawan.....	18
2.4 Pengertian Desa Adat.....	19
2.5 Aset Desa Adat.....	21

2.6	Konsep Tata Ruang Tradisional Bali	22
2.7	Analisis DEMATEL	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	31
3.2	Diagram Alir Penelitian	31
3.3	Lokasi Penelitian.....	34
3.4	Penentuan Variabel Penelitian	34
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	36
3.5.1	Survei primer.....	36
3.5.2	Survei sekunder.....	37
3.6	Informan Penelitian.....	38
3.7	Metode Analisis	39
3.7.1	Metode analisis evaluatif	39
BAB IV PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Desa Adat Pancasari.....	47
4.2	Perkembangan Elemen-Elemen Pariwisata Berkelanjutan	49
4.2.1	Guna lahan	49
4.2.2	Kepemilikan lahan	55
4.2.3	Kearifan lokal.....	60
4.2.4	Migrasi penduduk	70
4.2.5	Mata pencaharian.....	72
4.2.6	Ketenagakerjaan.....	75
4.2.7	Karakteristik wisatawan.....	76
4.2.8	Akomodasi wisata.....	78
4.3	Hasil Analisis	83
4.3.1	Perhitungan analisis DEMATEL	83
4.4	Interpretasi Hasil Analisis	90
4.4.1	Hubungan pengaruh	90
4.4.2	Hubungan keterkaitan	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1	Kesimpulan	105
5.2	Saran.....	106

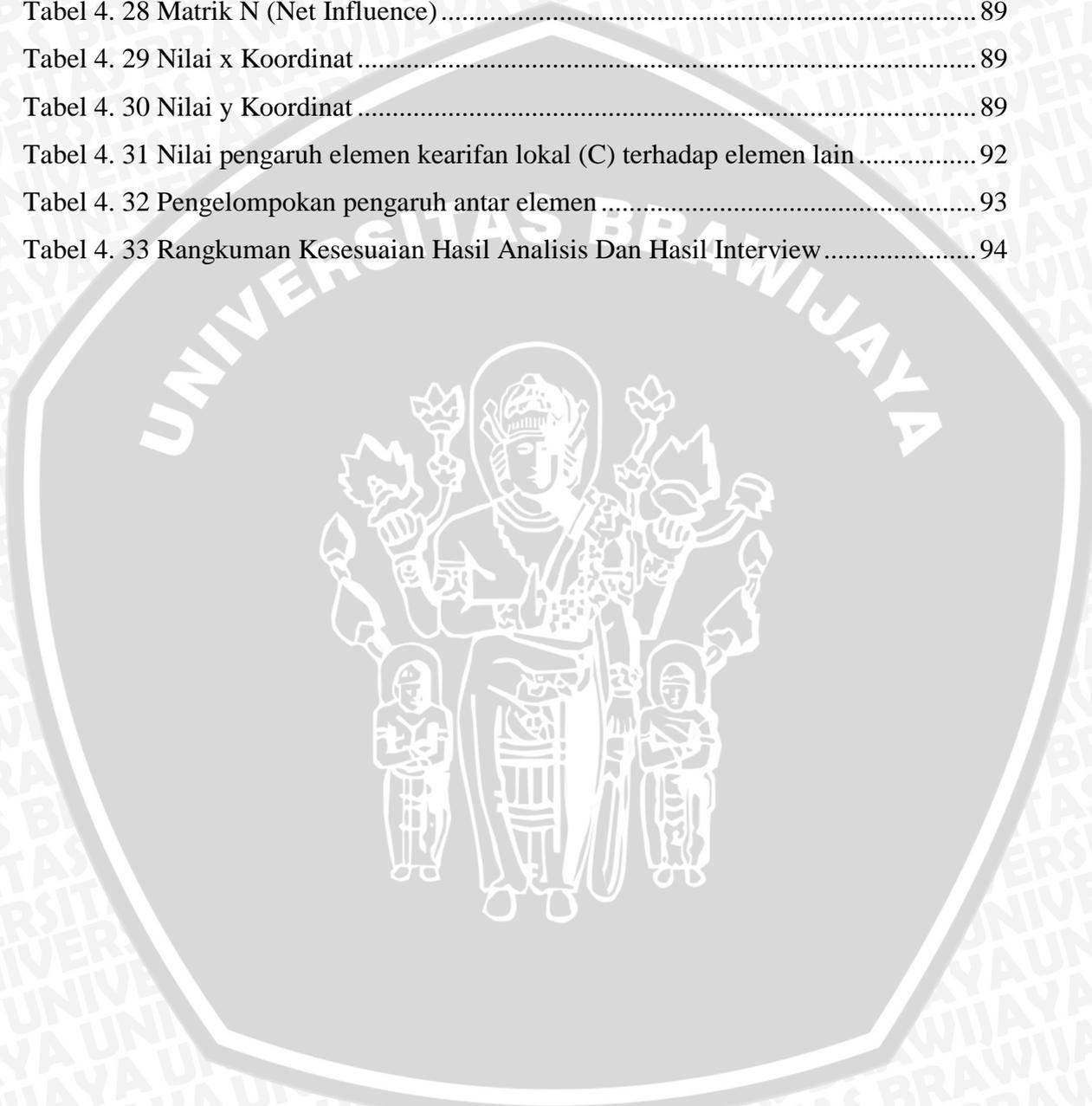
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Orientasi Kabupaten Buleleng terhadap Propinsi Bali.....	5
Gambar 1. 2 Peta Orientasi Kecamatan Sukasada terhadap Kabupaten Buleleng	6
Gambar 1. 3 Peta Orientasi Desa Pancasari terhadap Kecamatan Sukasada.....	7
Gambar 1. 4 Peta Wilayah Studi.....	8
Gambar 1. 5 Kerangka Pemikiran.....	9
Gambar 2. 1 Pembagian Ruang Berdasarkan Konsepsi Tri Angka.....	24
Gambar 2. 2 Kerangka Teori	28
Gambar 3. 1 Diagram alir penelitian	32
Gambar 3. 2 Kerangka analisis penelitian	33
Gambar 4. 1 Peta Administrasi Desa Adat Pancasari.....	47
Gambar 4. 5 Contoh perkembangan guna lahan untuk kegiatan wisata.....	52
Gambar 4. 6 Peta Guna Lahan Sebelum Menjadi Desa Wisata.....	53
Gambar 4. 7 Peta Guna Lahan Setelah Menjadi Desa Wisata.....	54
Gambar 4. 10 Perkembangan Kepemilikan Lahan	57
Gambar 4. 11 Peta Kepemilikan Lahan Sebelum Menjadi Desa Wisata.....	58
Gambar 4. 12 Peta Kepemilikan Lahan Setelah Menjadi Desa Wisata.....	59
Gambar 4. 16 Peta Identifikasi Zona Tri Mandala	64
Gambar 4. 17 Photo Mapping Zona Tri Mandala.....	65
Gambar 4. 18 Radius kesucian Pura Ulun Danu Buyan	66
Gambar 4. 19 Radius Kesucian Pura Dalem Desa Pancasari	67
Gambar 4. 20 Peta Spasial Kawasan Suci Desa Pancasari	68
Gambar 4. 21 Radius Kesucian Danau Buyan.....	69
Gambar 4. 28 Akomodasi Wisata. Vila (A), Cafe/Tempat Makan (B), Dan Hotel Bali Handara (C)	79
Gambar 4. 29 Diagram Cartesius.....	90
Gambar 4. 30 Keterkaitan Elemen yang Paling Kuat	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 3	Kriteria Unsur-Unsur Pola Tata Ruang Tradisional Bali (PTRTB)	24
Tabel 2. 4	Studi Terdahulu	29
Tabel 3. 1	Penentuan Variabel Penelitian	35
Tabel 3. 2	Data Primer	38
Tabel 3. 3	Data Sekunder	39
Tabel 3.4	Susunan variabel sebelum reduksi	41
Tabel 3. 4	Skala perbandingan Dematel	42
Tabel 3. 5	Desain Survei	44
Tabel 4. 1	Perbandingan Luas Guna Lahan Sebelum dan Sesudah	49
Tabel 4. 2	Perkembangan Batasan Hak Atas Tanah Desa Adat Pancasari Sebelum Menjadi Desa Wisata	55
Tabel 4. 3	Perkembangan lembaga adat di Desa Adat Pancasari	60
Tabel 4. 4	Contoh Penerapan Tri Mandala di Desa Pancasari	61
Tabel 4. 5	Migrasi Penduduk Masuk Desa Pancasari	70
Tabel 4. 6	Migrasi Penduduk Keluar Desa Pancasari	71
Tabel 4. 7	Mata Pencaharian Penduduk Desa Pancasari	73
Tabel 4. 8	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tenaga Kerja	75
Tabel 4. 9	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	76
Tabel 4. 10	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	77
Tabel 4. 11	Jenis dan Jumlah Akomodasi Wisata Sebelum dan Setelah menjadi Desa Wisata	78
Tabel 4. 13	Bagan Kecenderungan Elemen Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perkembangan Wisata Desa Adat Pancasari	81
Tabel 4. 14	Matrik Pengaruh Elemen A terhadap Elemen Lain	84
Tabel 4. 15	Matrik Pengaruh Elemen B terhadap Elemen Lain	84
Tabel 4. 16	Matrik Pengaruh Elemen C terhadap Elemen Lain	84
Tabel 4. 17	Matrik Pengaruh Elemen D terhadap Elemen Lain	84
Tabel 4. 18	Matrik Pengaruh Elemen E terhadap Elemen Lain	85
Tabel 4. 19	Matrik Pengaruh Elemen F terhadap Elemen Lain	85
Tabel 4. 20	Matrik Pengaruh Elemen G terhadap Elemen Lain	85
Tabel 4. 21	Matrik Pengaruh Elemen H terhadap Elemen Lain	85
Tabel 4. 22	Matrik Rata-Rata Geometri	86

Tabel 4. 23 Rangkuman Nilai Matrik Determinan	87
Tabel 4. 24 Matrik Kofaktor	87
Tabel 4. 25 Matrik S	88
Tabel 4. 26 Matrik T dengan Menggunakan Matrik Identitas.....	88
Tabel 4. 27 Matrik Invers	88
Tabel 4. 28 Matrik N (Net Influence).....	89
Tabel 4. 29 Nilai x Koordinat	89
Tabel 4. 30 Nilai y Koordinat	89
Tabel 4. 31 Nilai pengaruh elemen kearifan lokal (C) terhadap elemen lain.....	92
Tabel 4. 32 Pengelompokan pengaruh antar elemen.....	93
Tabel 4. 33 Rangkuman Kesesuaian Hasil Analisis Dan Hasil Interview.....	94



RINGKASAN

Luh Ketut Yulitrisna Dewi, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, Januari 2014, *Elemen Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perkembangan Wisata Desa Adat Puncasari*, Dosen Pembimbing: Nindya Sari dan I Nyoman Suluh Wijaya.

Pariwisata merupakan sektor terbesar di Bali. Hal tersebut dapat dibuktikan dari nilai PDRB, yaitu sebanyak 65% merupakan sektor pariwisata. Nilai PDRB ini dapat dilihat dari pertumbuhan pariwisata di Bali antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang langsung datang ke Bali. Pada tahun 1984 tercatat 169,460 orang wisatawan, kemudian meningkat menjadi 436,358 orang pada tahun 1988. Arus wisatawan terus mengalami peningkatan. Tahun 1989 tercatat sebanyak 436.358 orang meningkat menjadi 736.533 orang pada tahun 1992. Selanjutnya, selama kurun waktu 1993 jumlah wisatawan yang datang ke Bali meningkat lagi menjadi 885.516 orang (Kanwil Kehakiman Propinsi Bali, 1994). Meskipun mengalami pasang surut bersamaan kondisi nasional yang relatif kurang stabil sejak tahun 1998, memasuki milenium ketiga (tahun 2000/2001) tercatat jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali telah melampaui angka satu juta orang dalam satu tahun. Melihat adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan tersebut, maka pengembangan kegiatan wisata tidak hanya dilakukan di pusat perkotaan, namun juga hingga ke pedesaan. Salah satu contohnya adalah wisata desa adat di Desa Puncasari.

Perkembangan pariwisata di Desa Adat Puncasari melibatkan banyak pihak, yaitu pemerintah, investor, dan masyarakat lokal. Adanya konflik kepentingan antara keberlanjutan pengembangan wisata dan keberlanjutan nilai-nilai sakral desa adat yang mana menurut ketiga pihak berkepentingan ini, konflik tersebut merupakan permasalahan utama dalam perkembangan desa secara keseluruhan. Desa Puncasari telah dapat mengembangkan konsep keberlanjutan wisata dan keberlanjutan desa adat. Konsep ini dapat menjadi suatu jembatan yang dapat menghubungkan kegiatan pengembangan wisata dan kebutuhan sosial budaya masyarakat. Bila dilihat dari waktu awal berkembang menjadi desa wisata hingga saat ini, di Desa Adat Puncasari masih terjaga ciri khas adatnya walaupun terdapat kegiatan wisata yang sedang berkembang disana. Kegiatan wisata di Desa Adat Puncasari menunjukkan peningkatan, bersamaan dengan hal tersebut perlu dilihat pula suatu elemen pariwisata berkelanjutan yang juga mendukung keberadaan desa adatnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antar elemen pariwisata berkelanjutan dan menentukan elemen pariwisata berkelanjutan yang menjadi kunci dalam sustainabilitas perkembangan Wisata Desa Adat Puncasari. Hubungan dan penentuan elemen ini menggunakan metode analisis DEMATEL (*Decision Making Trial and Evaluation Laboratory*). Analisis ini dapat memberikan gambaran tentang hubungan antar elemen melalui suatu skema. Dari skema hubungan didapatkan elemen yang dominan memberikan pengaruh.

Dari hasil analisis DEMATEL, didapatkan bahwa elemen kearifan lokal merupakan elemen kunci sustainabilitas yang dominan berpengaruh terhadap elemen lain dalam perkembangan Wisata Desa Adat Puncasari. Elemen kearifan lokal dapat membentuk 7 arah pengaruh dengan pengaruh paling kuat terhadap elemen G (karakteristik wisatawan) dengan nilai 0,041 dan paling lemah terhadap elemen D (migrasi penduduk) dengan nilai 0,022. Elemen C (kearifan lokal) memiliki hubungan keterkaitan yang paling kuat dengan elemen B (kepemilikan lahan), elemen A (guna lahan), dan elemen E (mata pencaharian). Hubungan keterkaitan ini dilihat dari kedekatan letak masing-masing elemen pada diagram cartesius.

Kata Kunci: desa-adat, pariwisata, berkelanjutan, DEMATEL



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan komoditi ekspor dan menjadi penggerak kehidupan perekonomian sebuah negara. Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, disebutkan bahwa sekitar 65% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali berasal dari industri pariwisata yang didalamnya terdapat sektor perdagangan dan jasa hotel, serta restoran. Nilai PDRB ini dapat dilihat dari pertumbuhan pariwisata di Bali antara lain ditandai dengan meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang langsung datang ke Bali. Pada tahun 1984 tercatat 169,460 orang wisman meningkat menjadi 436,358 orang pada tahun 1988. Arus wisatawan terus mengalami peningkatan hingga tahun 1993 (Kanwil Kehakiman Propinsi Bali, 1994). Meskipun mengalami pasang surut bersamaan kondisi nasional yang relatif kurang stabil sejak tahun 1998, memasuki milenium ketiga (tahun 2000/2001) tercatat jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali telah melampaui angka satu juta orang dalam satu tahun. Melihat peningkatan kunjungan wisatawan yang cukup signifikan, maka kegiatan pariwisata tidak hanya dilakukan di pusat perkotaan, namun berkembang hingga ke pedesaan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh Pitana (2002), disebutkan bahwa terdapat dua bentuk transisi yang terjadi pada masyarakat desa, khususnya desa adat di Bali akibat adanya kegiatan wisata, yaitu transisi dari masyarakat dan kebudayaan agraris menuju kebudayaan industri (pariwisata), dan transisi dari masyarakat dan kebudayaan yang makin terbuka dan terkomunikasi ke dalam kebudayaan global.

Desa di Bali memiliki tatanan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengembangan wisata. Pengembangan pariwisata di beberapa desa di Bali memiliki karakteristik tersendiri, mulai dari jenis pengembangan pariwisata, pihak-pihak yang terkait, hingga pada kebijakan dalam pengembangan. Sebagai salah satu propinsi yang memiliki tatanan kehidupan yang unik yang sarat akan nilai budaya, Bali perlu mendapatkan perhatian khusus yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan keunikan tatanan kehidupannya. Salah satu kawasan wisata di Bali yang menjadi sasaran lokasi kunjungan wisatawan adalah Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan RTRW kabupaten Buleleng, disebutkan bahwa Desa Pancasari merupakan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK). Desa Pancasari merupakan salah satu desa tujuan wisata yang menjadi andalan bagi pemerintah dalam mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata, khususnya Bali bagian utara. Desa Pancasari memiliki keindahan panorama danau, memiliki kebun stroberi terbesar di Bali, menyediakan tempat untuk kegiatan berkemah dan *trekking*, serta masih banyak lagi daya tarik yang lainnya. Nama Desa Pancasari sudah dikenal sejak tahun 1920-an dan kemudian mengalami perkembangan hingga menjadi desa tujuan wisata.

Perkembangan pariwisata di Desa Adat Pancasari melibatkan banyak pihak, yaitu pemerintah, investor, dan masyarakat lokal. Desa Pancasari telah mengembangkan suatu konsep keberlanjutan wisata dan keberlanjutan desa adat, yang dapat dilihat dari adanya kesesuaian kegiatan wisata yang berkembang dengan tetap berpacu pada nilai-nilai lokal yang ada. Konsep ini dapat menjadi suatu jembatan yang dapat menghubungkan kegiatan pengembangan wisata dan kebutuhan sosial budaya masyarakat. Bila dilihat dari waktu awal berkembang menjadi desa wisata hingga saat ini, di Desa Adat Pancasari masih terjaga ciri khas adatnya walaupun terdapat kegiatan wisata yang sedang berkembang disana. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi elemen yang berpengaruh terhadap keberlanjutan kegiatan wisata dalam nilai-nilai sakral Desa Adat Pancasari.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi di Desa Pancasari, yaitu:

1. Dalam pengembangan desa wisata di Desa Adat Pancasari terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah, investor, dan penduduk lokal, yaitu kepentingan terkait keberlanjutan pengembangan wisata dan keberlanjutan nilai-nilai sakral desa adat.
2. Dalam rencana pengembangan desa wisata adat di Bali, belum pernah ada arahan spesifik yang dapat memediasi konflik kepentingan antara kegiatan wisata dan nilai-nilai desa adat yang dilihat dari konsep keberlanjutan pariwisatanya, mengingat bahwa masing-masing desa adat di Bali memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antar elemen pariwisata berkelanjutan dalam perkembangan wisata Desa Adat Pancasari?
2. Elemen manakah yang dominan memberikan pengaruh dalam perkembangan wisata Desa Adat Pancasari?

1.4 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengaruh dan keterkaitan antar elemen, serta menemukan elemen yang dominan berpengaruh dalam konsep pariwisata berkelanjutan di Desa Adat Pancasari.

1.4.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Diketuinya hubungan antar elemen pariwisata berkelanjutan dalam perkembangan wisata desa adat Pancasari.
2. Diketuinya elemen yang dominan memberikan pengaruh dalam perkembangan wisata desa adat Pancasari.

1.4.3 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, secara umum sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Pemerintah Daerah
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dapat menggunakan hasil kajian ini sebagai tinjauan atau bahan masukan untuk pembentukan wisata desa adat agar berkelanjutan untuk kedepannya.
2. Manfaat bagi Mahasiswa
 - a. Meningkatkan pengetahuan mengenai elemen-elemen yang perlu diperhatikan guna membetuk wisata desa adat yang berkelanjutan.
3. Manfaat bagi Masyarakat
 - a. Dapat menjelaskan hubungan pengaruh dan keterkaitan antar elemen pariwisata berkelanjutan yang ada di Desa Adat Pancasari.

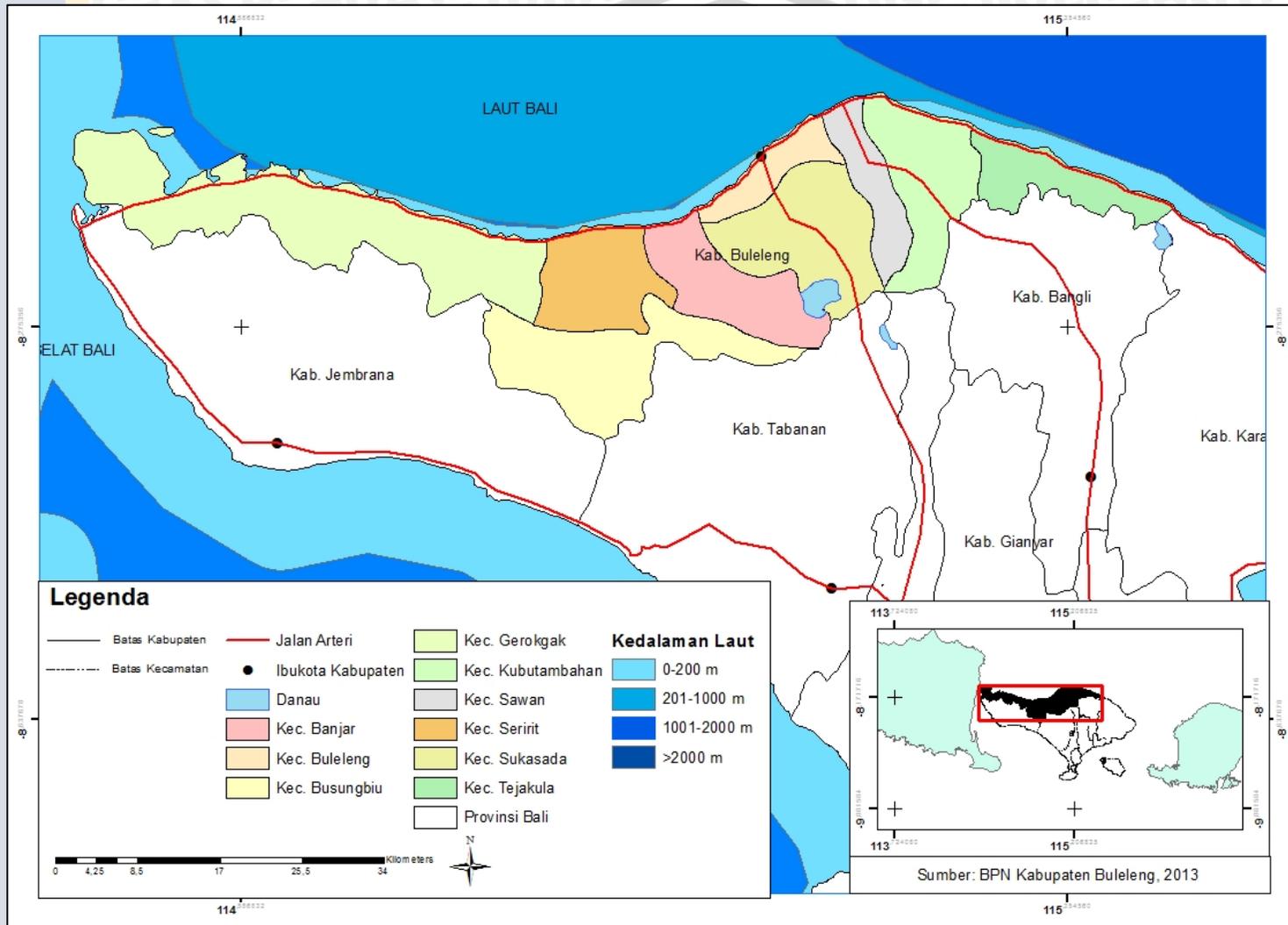
1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang lingkup materi

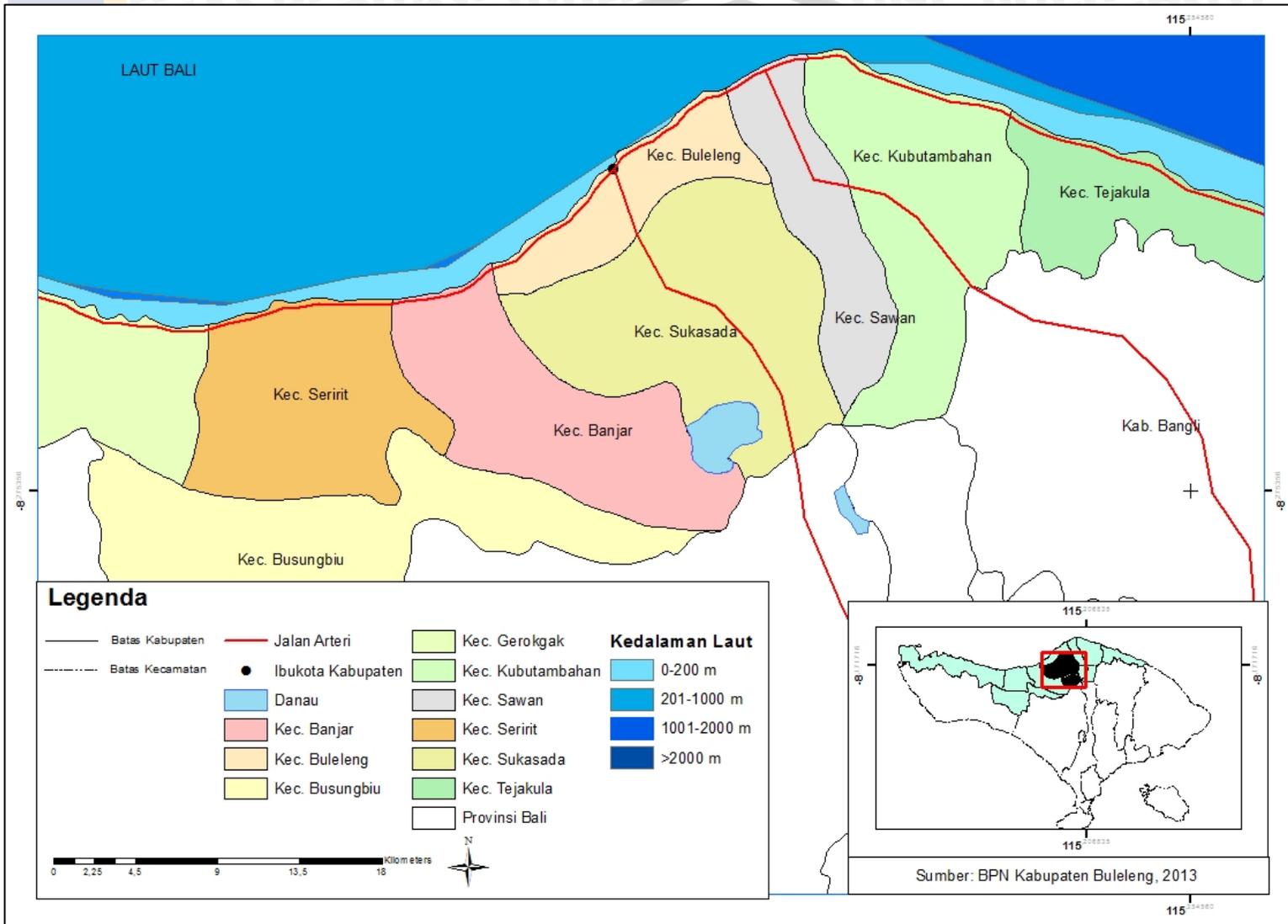
Materi yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah hubungan antar elemen pariwisata berkelanjutan, yang meliputi penggunaan lahan, status kepemilikan lahan, kearifan lokal, migrasi penduduk, mata pencaharian, tenaga kerja, karakteristik wisatawan, dan akomodasi wisata. Berkelanjutan yang dimaksud disini adalah konsep antara kegiatan wisata dan Desa Adat Pancasari secara keseluruhan yang dapat berjalan beriringan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Misalnya, untuk di Desa Pancasari walaupun kegiatan wisata terus mengalami peningkatan, namun tetap memperhatikan nilai-nilai adat yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antar elemen pariwisata berkelanjutan yang terdapat di Desa Pancasari melalui penggambaran skema arah hubungan. Dari penggambaran skema arah hubungan akan didapatkan elemen yang paling dominan berpengaruh dan diasumsikan sebagai elemen kunci yang dapat menjaga keberlangsungan kegiatan pariwisata dan desa adat di Desa Pancasari.

1.5.2 Ruang lingkup wilayah

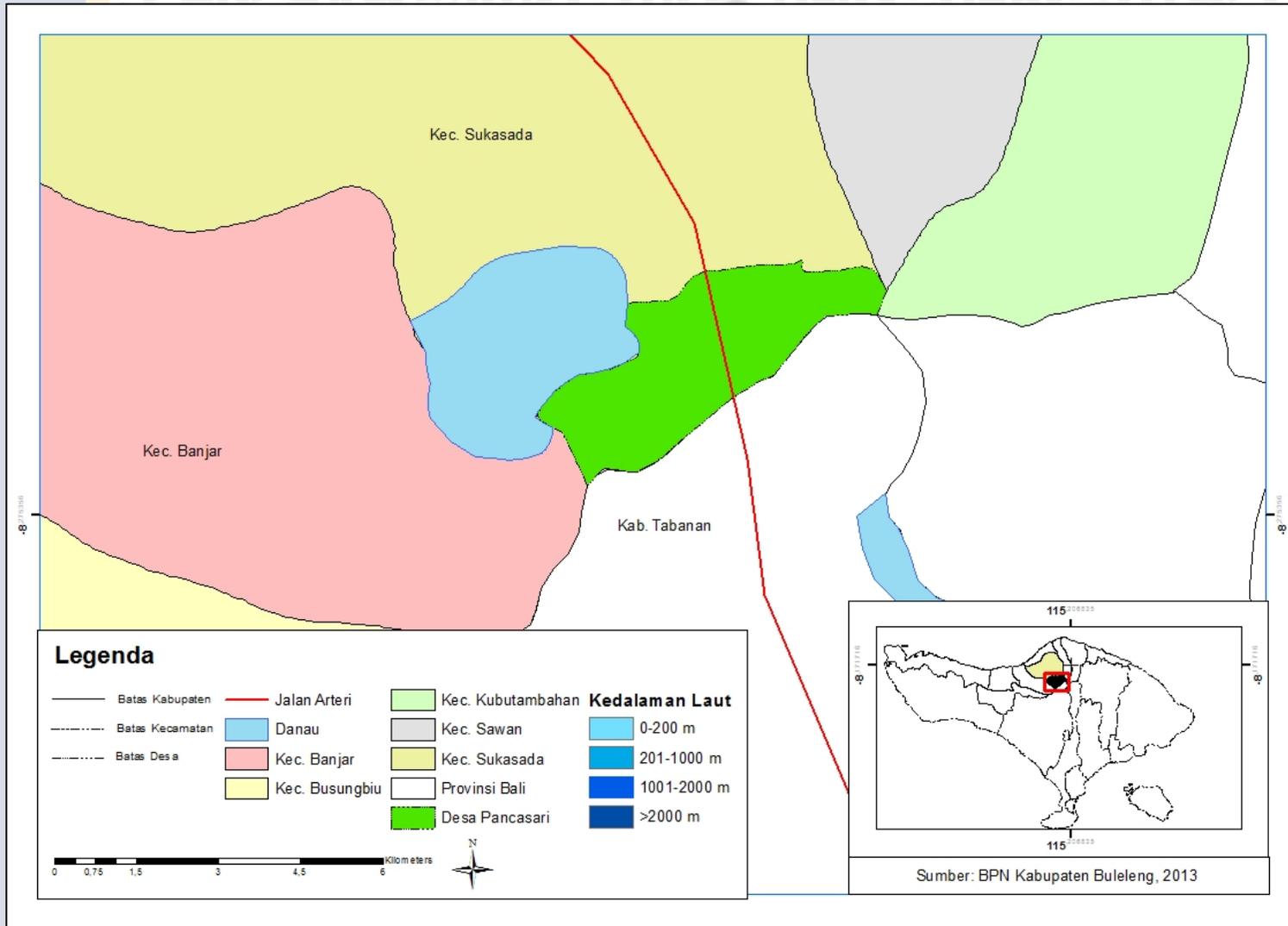
Penelitian ini dilakukan di desa Pancasari yang merupakan desa adat sekaligus menjadi destinasi wisata yang terletak di Kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng. Secara lebih jelas, ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui **Gambar 1.4** Peta Wilayah Studi.



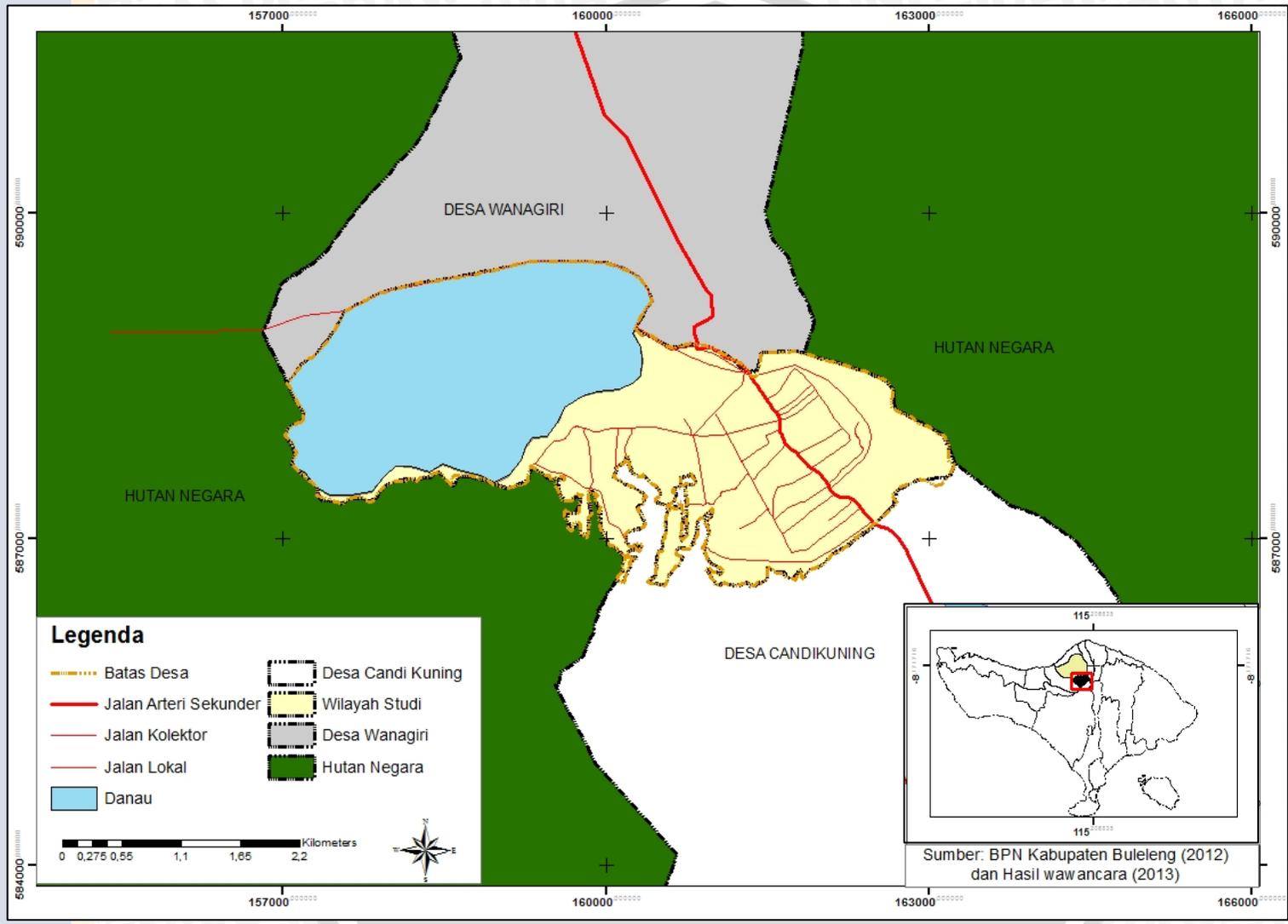
Gambar 1. 1 Peta Orientasi Kabupaten Buleleng Terhadap Provinsi Bali



Gambar 1. 2 Peta Orientasi Kecamatan Sukasada Terhadap Kabupaten Buleleng

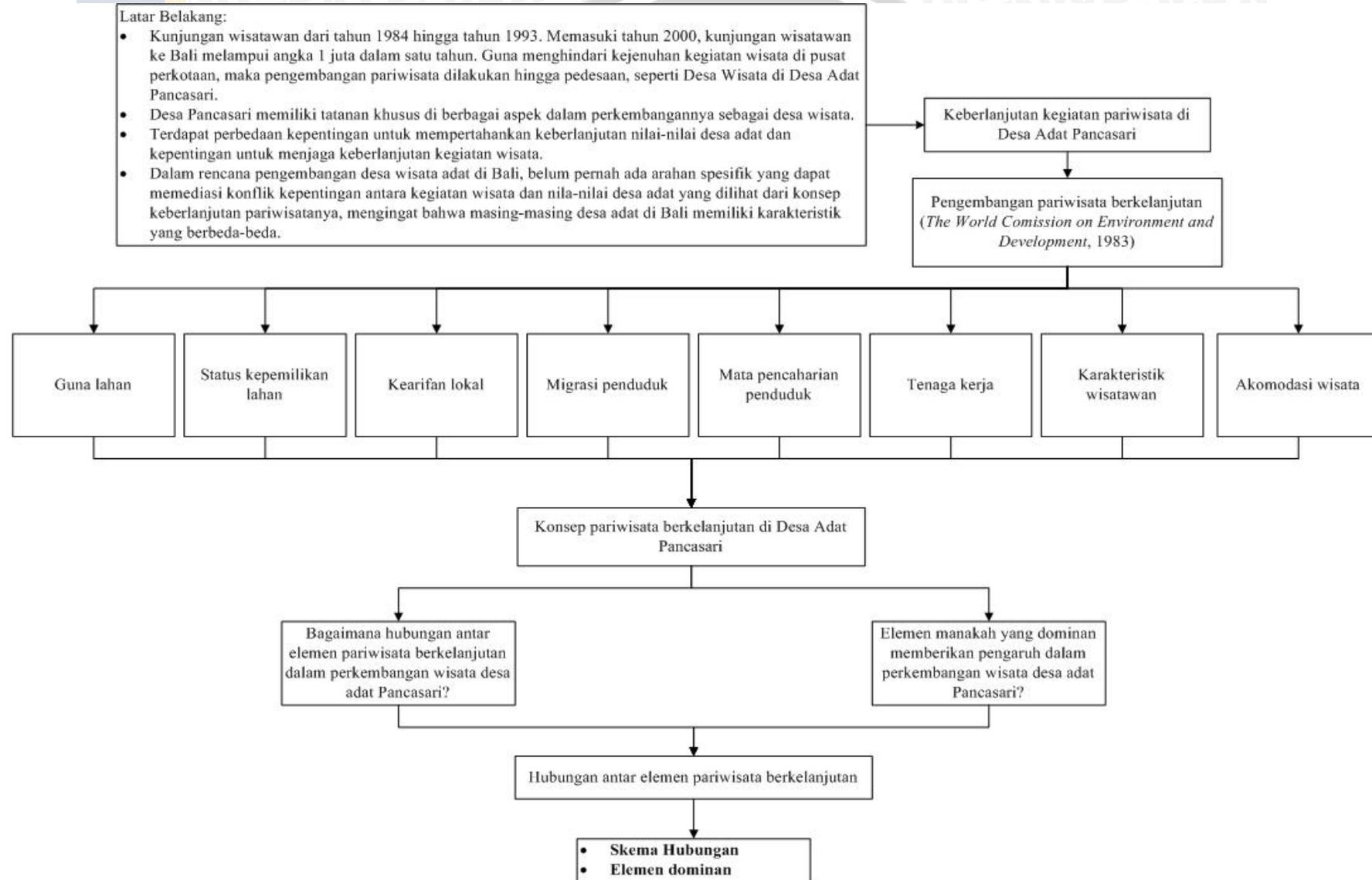


Gambar 1. 3 Peta Orientasi Desa Pancasari Terhadap Kecamatan Sukasada



Gambar 1. 4 Peta Wilayah Studi

1.6 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. 5 Kerangka Pemikiran

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam penelitian Elemen Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perkembangan Wisata Desa Adat Pancasari, antara lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang terkait kegiatan pariwisata di Bali pada umumnya dan di Desa Adat Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada khususnya. Pada latar belakang ini juga dipaparkan terkait isu-isu kegiatan pariwisata yang terjadi di Desa Pancasari.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang mendasari studi ini, yang diperoleh dari literatur serta berbagai media informasi, penelitian, seminar dan lainnya yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penelitian ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode-metode, yaitu metode kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan elemen yang dominan berpengaruh dalam keberlangsungan kegiatan wisata di wisata desa adat Pancasari. Adapun metode penelitian yang digunakan, yaitu dengan menggunakan Analisis Evaluatif Dematel.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini dipaparkan perkembangan wisata desa adat Pancasari yang mengkaji pada elemen-elemen pariwisata berkelanjutan. Kemudian, dicari hubungan antar elemen dengan menggunakan skema arah hubungan yang dihasilkan dari analisis DEMATEL dan memberikan penjelasan mengenai besarnya pengaruh yang diberikan antar elemen pariwisata berkelanjutan dan dibuktikan/dikorelasikan dengan teori yang ada. Setelah mendapatkan skema arah hubungan ditemukanlah elemen dapat diasumsikan sebagai elemen yang paling berpengaruh dalam menjaga keberlangsungan wisata Desa Adat Pancasari. Elemen dominan ini kemudian dikonfirmasi secara praktis melalui deskripsi rasionalitas pilihan masyarakat/responden.

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian, dan saran yang ditujukan kepada pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk pengembangan kawasan yang lebih baik dan tepat sasaran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Unsur – Unsur Pokok Kepariwisataaan

Mengembangkan kepariwisataan di suatu objek wisata berarti mengembangkan potensi fisik pada objek pariwisata yang dipasarkan. Di setiap objek atau lokasi pariwisata sebetulnya memiliki berbagai unsur saling tergantung yang diperlukan agar para wisatawan dapat menikmati suatu pengalaman memuaskan. Adapun unsur-unsur tersebut menurut Pendit S. Nyoman (1994) antara lain:

1. Atraksi wisata dan sumber daya alam, meliputi keindahan alam dan iklim.
2. Sosial budaya, meliputi adat istiadat, seni bangunan, pentas dan pagelaran, festival, pameran, pekan raya.
3. Sejarah, meliputi peninggalan purbakala.
4. Agama, meliputi kegiatan masyarakat (beribadat, upacara, pesta, dll).
5. Fasilitas rekreasi, meliputi olahraga (berburu, memancing, berenang, berlayar, dan berselancar).
6. Fasilitas berbelanja, meliputi *Night Club*, diskotik, bioskop, teater, sandiwara, dan sebagainya.
7. Aksesibilitas dan Infastruktur, meliputi kualitas wisata (jalan raya, taman, listrik, air, pelayanan keamanan, pelayanan kesehatan, komunikasi, kendaraan umum, dll).
8. Akomodasi wisata, meliputi hotel, motel, bungalow, inn, cottage, restoran, coffeshop, rumah makan, dan sebagainya.
9. Wisatawan, meliputi kunjungan wisatawan dan tipe/jenis wisatawan.

2.2 Pariwisata Berkelanjutan

Berdasarkan hasil laporan *The World Commission on environtment and Development* (1983), pengembangan berkelanjutan didefinisikan sebagai pengembangan yang dapat memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam tataran kepariwisataan internasional, diperlukan adanya suatu tindak lanjut untuk merumuskan dan mempromosikan serta mengusulkan Piagam Pariwisata Berkelanjutan. Prinsip-prinsip dan sasaran-sasaran dari piagam tersebut adalah mengacu pada pembangunan berkelanjutan yang dapat dicapai bila dipenuhi kriteria berikut:

1. Keberlanjutan dengan kriteria kelestarian lingkungan dan sesuai dengan daya dukungnya. Perhitungan daya dukung dapat dijadikan pedoman untuk menetapkan jumlah wisatawan dan karakteristik wisatawan yang melakukan kunjungan agar tidak terjadi kerusakan pada kawasan.
2. Keberlanjutan sosial dilihat dari aspek sosial. Ketidakberlanjutan pariwisata disebabkan oleh karena masyarakat terpengaruh dan terbawa oleh nilai-nilai sosial budaya wisatawan.
3. Keberlanjutan budaya. Budaya masyarakat akan menjadi daya tarik yang sangat kuat bagi wisatawan. Budaya perlu dipertahankan karena seni yang ada di masyarakat dalam kurun waktu panjang seringkali secara perlahan dapat mengalami perubahan.
4. Keberlanjutan dalam ekonomi. Keberlanjutan ekonomi dalam pariwisata sering dipergunakan sebagai kriteria untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, kawasan pariwisata dan pemerintah. Terdapat satu aspek yang lebih penting adalah bahwa nilai ekonomi yang diperoleh dari pengembangan pariwisata, yang dapat menutup seluruh nilai untuk melakukan penanganan dampak negatif lingkungan, sosial, dan budaya. Evaluasi terhadap kerusakan atraksi wisata, akomodasi wisata, atau perubahan sosial budaya masyarakat harus dilakukan terhadap nilai ekonomi yang diperoleh.

2.3 Elemen Pariwisata Berkelanjutan

Elemen pariwisata berkelanjutan yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa kajian teori penelitian, sebagai berikut:

2.3.1 Guna lahan

Pada perencanaan pariwisata berkelanjutan disebutkan bahwa dalam hal penggunaan sumberdaya lahan, istilah berkelanjutan dapat berarti menempatkan bentuk penggunaan lahan tak deterioratif yang kompatibel dalam jumlah maksimum, sehingga memperoleh nilai manfaat yang lebih baik dari bentuk penggunaan lahan yang diterapkan (Notohadiprawiro, 1987). Implikasi dari makna keberlanjutan tersebut adalah mengupayakan berlangsungnya interaksi bentuk dan intensitas kegiatan dengan kemampuan lahan yang ditempati kegiatan tersebut pada level optimum. Guna lahan merupakan salah satu aspek keberlanjutan lingkungan dalam pariwisata berkelanjutan.

Lahan bukan saja memberikan wadah fisik kedudukan sistem produksi, tetapi juga memberikan masukan ke atau menerima hasil dari, dan memperbaiki kerusakan sistem produksi. Sehingga setiap jenis penggunaan lahan dapat mencirikan kualitas penggunaan lahannya, dan ketika lahan memberi tanda-tanda kerusakan, jenis penggunaan lainnya siap menggantikannya.

Guna lahan merupakan salah satu indikator fisik lingkungan dalam penilaian perkembangan wisata di suatu kawasan. Hal tersebut karena, suatu guna lahan di kawasan wisata akan mempengaruhi arah pengembangan suatu kawasan wisata dengan segala aktivitas yang akan diselenggarakan (Wulansari, 2011).

2.3.2 Kepemilikan lahan

Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan pariwisata adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Berdasarkan Cohen (1984), dampak terhadap kepemilikan lahan dan kontrol merupakan salah satu kategori kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal. Hasil penelitian Setiadi (1999) membuktikan bahwa masyarakat Bali pada umumnya mampu memanfaatkan lahan tempat tinggalnya dan memiliki hak kepemilikan lahan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, sekalipun dengan intensitas yang relatif bervariasi.

Teori kepemilikan lahan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu kepemilikan lahan yang terdapat di desa adat Pancasari yang dapat dilihat dari kepemilikan dan batas desa adat.

1. Kepemilikan lahan dan penetapannya

Pemilikan tanah diawali dengan menduduki suatu wilayah yang oleh masyarakat Adat disebut sebagai tanah komunal. Seiring dengan perubahan pola sosial ekonomi dalam setiap masyarakat, sistem pemilikan individual mulai dikenal di dalam sistem pemilikan komunal. Dalam hukum adat, hak perorangan atas tanah selalu dibatasi oleh hak ulayat. Dari hak yang dimiliki tiap individu di atas serta hak ulayatnya, mulai berkembang kepemilikan hak atas tanah (Artawilaga, 1960) yaitu :

- a. Hak Milik. Seorang warga persekutuan berhak untuk membuka tanah dan mengerjakan tanah itu terus-menerus dan menanam pohon di atas tanah itu, sehingga ia mempunyai hak milik atas tanah itu namun wajib menghormati hak ulayat desanya, kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah, dan peraturan-peraturan adat. Selain hak milik dikenal pula hak milik terkekang atau terbatas yaitu bila

kekuasaan atas tanah tersebut dibatasi oleh kuat atau tidaknya hak pertuanan desa.

- b. Hak menggunakan tanah atau memungut hasil tanah, selama waktu tertentu, yang umumnya berlaku bagi orang luar bukan warga persekutuan yang sudah mendapat ijin telah memenuhi syarat tertentu seperti membayar mesi (Jawa) atau uang pemasukan (Aceh).
- c. Hak Pejabat Adat/Hak Adat. Kepala persekutuan atau pembesar lainnya mempunyai hak atas tanah pertanian yang diberikan oleh persekutuan untuk menghidupi keluarganya (tanah bengkok).

2.3.3 Kearifan lokal

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dipengaruhi oleh tujuh unsur kebudayaan, yaitu bahasa, sistem teknologi, sistem ekonomi, organisasi sosial, sistem pengetahuan, kesenian, dan sistem religi. Sedangkan, aliran yang kedua lebih menekankan, bahwa kebudayaan sebagai sesuatu yang abstrak, sesuatu yang bersifat gagasan dan pemikiran yang berfungsi untuk membentuk pola perilaku yang khas pada suatu komunitas pendukung kebudayaan (Pitana, 2005). Dari pengertian kebudayaan itu, tampak kebudayaan sebagai wahana dan wacana bagi masyarakat untuk terus menerus menyesuaikan diri atau merespons perubahan baik yang diakibatkan dari dalam maupun perubahan dari luar kebudayaannya tanpa harus menghilangkan identitas kebudayaannya. Respons penyesuaian diri masyarakat seperti itulah yang kemudian dikenal sebagai proses untuk menjadi pintar dan berpengetahuan warga masyarakat guna mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya. Dalam konsep antropologi, kearifan lokal dikenal pula sebagai pengetahuan setempat (*indigenous or local knowledge*), atau kecerdasan setempat (*local genius*), yang menjadi dasar identitas kebudayaan (*cultural identity*). Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya, dan kepercayaan yang ada sebageian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses atau kaidah perencanaan dan pembangunan wilayah atau kawasan. Pengertian kearifan lokal dalam perbincangan ini, adalah suatu faktor sosio-kultural dengan segala jawaban kreatif terhadap situasi geografis-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal yang mengandung sikap, pandangan, dan kemampuan suatu masyarakat di dalam mengelola lingkungan rohani dan jasmaninya. Hasil penelitian Setiadi (1999) menunjukkan bahwa masyarakat Bali pada umumnya memberikan kontribusi dalam pengembangan pariwisata, sekalipun taraf persepsi dan partisipasinya sangat bervariasi. Perbedaan persepsi dan partisipasi dalam

pengembangan pariwisata ini terutama disebabkan faktor sosio-kultural (kearifan lokal) mereka yang relatif berbeda. Semua itu, sebagai upaya untuk dapat memberikan kepada warga masyarakatnya suatu daya tahan dan daya tumbuh di wilayah di mana masyarakat itu berada. Setiap masyarakat termasuk masyarakat tradisional, dalam konteks kearifan lokal seperti itu, pada dasarnya terdapat suatu proses untuk menjadi pintar dan berpengetahuan. Hal itu berkaitan dengan adanya keinginan agar dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan, sehingga warga masyarakat secara spontan memikirkan cara-cara untuk melakukan, membuat, dan menciptakan sesuatu yang diperlukan dalam mengolah sumber daya alam demi menjamin keberlangsungan dan ketersedianya sumber daya alam tanpa mengganggu keseimbangan alam. Menurut Pitana (2005), jenis kearifan lokal meliputi tata kelola, nilai-nilai adat, serta tata cara dan prosedur, termasuk dalam pemanfaatan ruang (tanah ulayat).

1. Tata Kelola

Di setiap daerah pada umumnya terdapat suatu sistem kemasyarakatan yang mengatur tentang struktur sosial dan keterkaitan antara kelompok komunitas yang ada, seperti Dalian Natolu di Sumatera Utara, Nagari di Sumatera Barat, Kesultanan dan Kasunanan di Jawa dan Banjar di Bali. Sebagai contoh, masyarakat Toraja memiliki lembaga dan organisasi sosial yang mengelola kehidupan di lingkungan perdesaan. Selain itu, terdapat pula pembagian tugas dan fungsi dalam suatu kelompok masyarakat adat misalnya Kepatihan (patih), Kauman (santri) di perkampungan sekitar Keraton di Jawa. Kewenangan dalam struktur hirarki sosial juga menjadi bagian dari tata kelola, seperti kewenangan ketua adat dalam pengambilan keputusan, dan aturan sanksi serta denda sosial bagi pelanggar peraturan dan hukum adat tertentu.

2. Sistem Nilai

Sistem nilai merupakan tata nilai yang dikembangkan oleh suatu komunitas masyarakat tradisional yang mengatur tentang etika penilaian baik-buruk serta benar atau salah. Sebagai contoh, di Bali, terdapat sistem nilai Tri Hita Karana yang mengaitkan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan Tuhan, alam semesta, dan manusia. Ketentuan tersebut mengatur hal-hal adat yang harus ditaati, mengenai mana yang baik atau buruk, mana yang boleh dilakukan dan

yang tidak boleh dilakukan, yang jika hal tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi adat yang mengaturnya.

3. Tata Cara atau Prosedur

Beberapa aturan adat di daerah memiliki ketentuan mengenai waktu yang tepat untuk bercocok tanam serta sistem penanggalan tradisional yang dapat memperkirakan kesesuaian musim untuk berbagai kegiatan pertanian, seperti: Pranoto Mongso (jadwal dan ketentuan waktu bercocok tanam berdasarkan kalender tradisional Jawa) di masyarakat Jawa atau sistem Subak di Bali. Selain itu, di beberapa daerah, seperti Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua umumnya memiliki aturan mengenai penggunaan ruang adat termasuk batas teritori wilayah, penempatan hunian, penyimpanan logistik, aturan pemanfaatan air untuk persawahan atau pertanian hingga bentuk-bentuk rumah tinggal tradisional. Di Tasikmalaya Jawa Barat misalnya, terdapat sebuah kampung budaya yaitu Kampung Naga, yang masyarakatnya sangat teguh memegang tradisi serta falsafah hidupnya, mencakup tata wilayah (pengaturan pemanfaatan lahan), tata wayah (pengaturan waktu pemanfaatan), dan tata lampah (pengaturan perilaku/perbuatan).

4. Ketentuan Khusus (Kawasan Sensitif, Suci, Bangunan)

Ketentuan khusus ditetapkan sebagai bentuk pelestarian dan perlindungan terhadap kawasan sensitif, seperti di Sumatera Barat, terdapat beberapa jenis kearifan lokal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, tanah, dan air seperti Rimbo Larangan (hutan adat/hutan larangan), Banda Larangan (sungai, anak sungai / kali larangan), Parak (suatu lahan tempat masyarakat berusaha tani dimana terdapat keberagaman jenis tanaman yang dapat dipanen sepanjang waktu secara bergiliran), serta Goro Basamo (kegiatan kerja bersama secara gotong royong untuk kepentingan masyarakat banyak seperti membuat jalan baru, bangunan rumah ibadah, membersihkan tali bandar (sungai), dan menanam tanaman keras).

2.3.4 Migrasi penduduk

Pada masyarakat Bali, sebagaimana dilaporkan Geriya (1983), dampak pariwisata khususnya dalam aspek sosial budaya sudah mulai tampak. Hal ini terutama ditandai dengan adanya beberapa nilai indikator, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari adanya migrasi penduduk yang masuk dan keluar kawasan wisata.
2. Berkembangnya konflik antargenerasi, khususnya generasi tua dan generasi muda.
3. Adanya komersialisasi kebudayaan.

Secara teoritis, Cohen (1984) mengelompokkan migrasi dari dan ke daerah pariwisata sebagai kategori yang termasuk dalam dampak sosial budaya pariwisata. Adanya migrasi penduduk mengakibatkan perubahan pada beberapa aspek sosial budaya pariwisata, meliputi:

1. Dampak terhadap hubungan interpersonal antara anggota masyarakat yang lama dengan yang baru
2. Dampak terhadap kebutuhan permukiman
3. Dampak terhadap ritme kehidupan sosial masyarakat
4. Dampak terhadap pembagian pola kerja

Ada tiga dimensi penting dalam pembahasan tentang migrasi, yaitu : dimensi spasial, sektoral atau lapangan kerja (*occupational*), dan temporal. Migrasi dilihat dari dimensi spasial adalah menerangkan perpindahan penduduk atau mobilitas penduduk yang melintasi batas teritorial (administratif) atau geografi. Sedangkan, migrasi dari dimensi sektoral melahirkan konsep mobilitas penduduk berdasarkan jenis pekerjaan (okupasi) baik yang sifatnya permanen atau musiman (Sumaryanto dan Pasaribu, 1997).

2.3.5 Mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk untuk di pedesaan sebegini besar sebagai petani tradisional. Ini merupakan salah satu ciri khas mata pencaharian penduduk Indonesia sebagai negara agraris. Sistem pertanian yang ada di Indonesia berdasarkan pembagian dari D. Whitlesey (1979), meliputi tipe bercocok tanam di ladang berpindah, bercocok tanam tanpa irigasi yang menetap, bercocok tanam yang menetap dan intensif dengan irigasi sederhana dan tanaman pokok padi, bercocok tanam dan intensif dengan irigasi sederhana tanpa padi, bercocok tanam sekitar Lautan Tengah, Pertanian buah-buahan, pertanian komersial dengan mekanisasi berdasarkan tanaman gandum, pertanian komersil dengan mekanisasi, dan pertanian perkebunan dengan mekanisasi.

Mata pencaharian merupakan aktivitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya (Daldjoni, 1987:89). Hasil penelitian Mc. Kean (1973) maupun Geriya dan Erawan (1993) membuktikan bahwa interaksi antara pariwisata dan kebudayaan itu ternyata mendatangkan banyak kemanfaatan bagi pengembangan kebudayaan Bali, sekaligus pengembangan sektor ekonomi masyarakat, terutama melalui kegiatan industri kerajinan.

Wulansari (2011) menyebutkan bahwa jenis mata pencaharian merupakan salah satu variabel non fisik yang dipilih sebagai variabel dalam penelitian Identifikasi Faktor Dalam Pengembangan Kawasan Wisata, karena jenis mata pencaharian masyarakat kawasan wisata mengalami substitusi terkait kegiatan wisata yang ada, sehingga akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

2.3.6 Ketenagakerjaan

Berdasarkan teori dalam jurnal Ekonomi Kepariwisata (1981), bila suatu daerah di bangun tempat-tempat wisata maka secara tidak langsung penduduk sekitar akan mengalami dampak pertumbuhan ekonomi, karena tempat-tempat tersebut akan menarik lapangan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar tempat wisata tersebut.

Menurut Erawan (1993) dampak pariwisata terhadap perekonomian di daerah Bali adalah sangat positif. Pariwisata ternyata berperan besar dalam menciptakan kesempatan kerja, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sebagai sumber penghasil devisa, mendorong ekspor khususnya barang-barang industri kerajinan, dan mampu mengubah struktur ekonomi daerah Bali ke arah yang lebih seimbang.

2.3.7 Karakteristik wisatawan

Pada prinsipnya dasar-dasar klasifikasi wisatawan dapat dikelompokan atas dua, yaitu atas dasar interaksi dan atas dasar kognitif-normatif. Pada tipologi atas dasar interaksi, penekanannya adalah sifat-sifat interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal, sedangkan tipologi atas dasar kognitif-normatif lebih menekankan pada motivasi yang melatar-belakangi perjalanan.

Karakteristik wisatawan merupakan salah satu aspek non fisik dalam penelitian Identifikasi Faktor Dalam Pengembangan Kawasan Wisata yang ditetapkan sebagai variabel karena karakteristik wisatawan akan mempengaruhi kondisi sosial masyarakat disamping akan mempengaruhi arah pengembangan wisata (Wulansari, 2011).

Hasil penelitian yang pernah dilakukan Ida Bagus Mantra (1993) antara lain menunjukkan betapa dominannya alasan kebudayaan sebagai daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali. Ketertarikan wisatawan yang datang ke Bali ternyata 61% karena alasan ingin menikmati kebudayaan, 32% tertarik dengan keindahan pemandangan alam flora dan fauna, sedangkan 5,73% tertarik pada hal-hal lainnya.

2.3.8 Akomodasi wisata

Akomodasi wisata merupakan salah satu indikator dan variabel yang dijadikan sebagai alat untuk mengidentifikasi faktor dalam pengembangan kawasan pariwisata (Wulansari, 2011).

Akomodasi adalah suatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yang bepergian. Dalam kepariwisataan akomodasi merupakan suatu industri, jadi pengertian industri akomodasi adalah suatu komponen industri pariwisata, karena akomodasi dapat berupa suatu tempat atau kamar dimana orang-orang / pengunjung / wisatawan dapat beristirahat / menginap / tidur, mandi, makan dan minum serta menikmati jasa pelayanan dan hiburan yang tersedia. Jenis-jenis Sarana Akomodasi dapat dibagi sebagai berikut:

1. *The Tourist Hotel*

Hotel ini adalah bentuk akomodasi wisata tertua. Ada tiga hotel di Perancis, yaitu *hotels counterparts*, hotel jaringan (*chain hotels*), rantai hotel dan relawan (*chain hotels and volunteers*).

2. *Les Campings* (hotel diluar)

Terdiri dari tiga lokasi: lokasi dipinggir jalan (lokasi bagi para wisatawan tidak hanya memilih tinggal); menyewa ruang dalam setahun (lokasi tergantung pada residential tenancies, yaitu satu klien untuk seluruh periode pembukaan kamp); dan sewa lokasi (lokasi kelompok akomodasi yang tenang (*Chalet*, bungalow atau rumah mobil (*caravan*)).

3. *Furniture tourism*

Ini adalah bentuk akomodasi wisata yang ditujukan untuk klien dari bagian yang ingin tinggal beberapa hari, didasarkan pada sewa tetap untuk perhari, mingguan atau bulanan dan yang tidak memilih menetap.

2.4 Pengertian Desa Adat

Bali memiliki desa adat sebanyak 1.456 desa adat yang dikepalai oleh Kelian Desa Adat dan ada 3.397 banjar yang dikepalai oleh kelian Banjar.

Menurut Pitana (2002) menyebutkan pengertian desa adat sebagai Desa adat sebagai suatu kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat, dan terikat oleh adanya tiga pura utama, yaitu *Kahyangan Tiga* atau pura lain yang berfungsi seperti itu, yang disebut Kahyangan Desa. Desa adat merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu, dan merupakan satu kesatuan bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya. Selanjutnya, dengan mengacu kepada berbagai batasan yang diberikan terhadap desa adat, disimpulkan ciri-ciri desa adat sebagai berikut (Pitana, 2002):

1. Mempunyai batas - batas tertentu yang jelas. Umumnya berupa batas alam seperti sungai, hutan, jurang, bukit atau pantai.
2. Mempunyai anggota (*krama* yang jelas), dengan persyaratan tertentu
3. Mempunyai *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*, atau pura lain yang mempunyai fungsi dan peranan sama dengan *kahyangan tiga*.
4. Mempunyai otonomi, baik ke luar maupun ke dalam.
5. Mempunyai suatu pemerintahan adat, dengan kepengurusan (*prajuru adat*) sendiri. Berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 1986 menyebutkan bahwa desa adat sebagai salah satu pilar kebudayaan Bali dan didefinisikan sebagai kesatuan wilayah hukum adat di Propinsi Bali yang merupakan satau kesatuan tradisi dan tat krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Desa adat memiliki hubungan yang sangat erat dengan pariwisata. Berkembangnya pariwisata di Bali otomatis telah terjadi kontak antar masyarakat Bali (desa adat) dengan budaya luar. Kontak-kontak tersebut bukanlah hal yang baru, kontak telah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai “pengaruh luar” dalam adat budaya Bali seperti pengaruh India, China, Arab, dan Jawa (Pitana, 2002). Intensitas kontak kebudayaan Bali dengan kebudayaan luar meningkat karena perkembangan teknologi serta keberhasilan Bali menjadikan dirinya sebagai tujuan wisata. Keadaan desa adat dewasa ini telah mengalami perubahan sebagaimana yang diungkapkan oleh Pitana (2002). Secara umum dikatakan bahwa desa adat khususnya bergerak dalam bidang adat-istiadat dan agama, namun banyak desa adat telah secara aktif bergerak di bidang ekonomi, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan. Modal dasar pembangunan Bali adalah kebudayaan dan

pembangunan yang dilaksanakan di Bali adalah “pembangunan yang berwawasan budaya”. Agar kebudayaan Bali mampu menjadi modal dasar pembangunan kepariwisataan, maka kebudayaan tersebut harus lestari dan dinamis, dimana pelestarian budaya terkait langsung dengan pelestarian desa adat. Kalau desa adat yang merupakan pilar utama kebudayaan Bali mengalami kehancuran, maka kebudayaan Bali secara keseluruhan pun akan terancam (Pitana, 2004).

2.5 Aset Desa Adat

Harta kekayaan desa *pakraman* adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan imaterial serta benda-benda yang bersifat religius magis yang menjadi milik desa *pakraman*. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) pada setiap desa *pakraman* merupakan milik Desa Pakraman itu sendiri. Tanah desa *pakraman* dan tanah milik desa *pakraman* bebas dari pajak bumi dan bangunan, oleh karena setiap tanah milik desa telah membayar pajak berupa ayah-ayah ke Desa baik material maupun immaterial dan atau pelaksanaan upacara Tawur Kesanga dan Yadnya desa yang lainnya. Penggunaan harta kekayaan desa *pakraman* di luar kepentingan desa *pakraman* harus berdasarkan keputusan Paruman (rapat Desa). Dalam praktiknya tanah adat di Bali memiliki fungsi antara lain (Artawilaga, 1960) sebagai berikut :

1. *Tanah Druwe* atau yang sering dikenal dengan *Druwe Desa* adalah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Desa Pakraman seperti Tanah Pasar, Tanah Lapang, Tanah Kuburan dan Tanah Bukti.
2. *Tanah Pelaba Pura* adalah tanah yang dulunya milik desa yang khusus digunakan untuk keperluan Pura yaitu tempat bangunan Pura dan yang dipergunakan guna pembiayaan keperluan Pura seperti pembiayaan upacara-upacara rutin, hingga perbaikan Pura.
3. *Tanah Pekarangan Desa* merupakan tanah yang dikuasai oleh *Desa Pakraman* yang diberikan kepada *krama negak* untuk tempat tinggal dengan ayahan yang melekat.
4. *Tanah Ayahan* merupakan tanah yang dikuasai oleh Desa Pakraman yang penggarapannya diserahkan kepada *krama desa* setempat dengan hak untuk dinikmati dengan perjanjian tertentu serta kewajiban memberikan ayahan.

2.6 Konsep Tata Ruang Tradisional Bali

Terwujudnya pola perumahan tradisional sebagai lingkungan buatan sangat terkait dengan sikap dan pandangan hidup masyarakat Bali, tidak terlepas dari sendi-sendi agama, adat istiadat, kepercayaan dan sistem religi yang melandasi aspek-aspek kehidupan. Peranan dan pengaruh Agama Hindu dalam penataan lingkungan buatan, yaitu terjadinya implikasi agama dengan berbagai kehidupan bermasyarakat.

Rumah tradisional Bali selain menampung aktivitas kebutuhan hidup seperti tidur, makan, istirahat juga untuk menampung kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan psikologis, seperti melaksanakan upacara keagamaan dan adat. Dengan demikian rumah tradisional sebagai perwujudan budaya sangat kuat dengan landasan filosofi yang berasal dari Agama Hindu. Agama Hindu mengajarkan agar manusia mengharmonisasikan alam semesta dengan segala isinya yakni bhuana agung (Makro Kosmos) dengan bhuana alit (Mikro kosmos), dalam kaitan ini bhuana agung adalah lingkungan buatan/bangunan dan bhuana alit adalah manusia yang mendirikan dan menggunakan wadah tersebut.

Manusia (*bhuana alit*) merupakan bagian dari alam (*bhuana agung*), selain memiliki unsur-unsur pembentuk yang sama, juga terdapat perbedaan ukuran dan fungsi. Manusia sebagai isi dan alam sebagai wadah, senantiasa dalam keadaan harmonis dan selaras seperti manik (janin) dalam cucupu (rahim ibu). Rahim sebagai tempat yang memberikan kehidupan, perlindungan dan perkembangan janin tersebut, demikian pula halnya manusia berada, hidup dan berkembang dan berlindung pada alam semesta, ini yang kemudian dikenal dengan konsep manik ring cucupu. Dengan alas an itu pula, setiap wadah kehidupan atau lingkungan buatan, berusaha diciptakan senilai dengan suatu Bhuana Agung, dengan susunan unsure-unsur yang utuh, yaitu *Tri Hita Karana*.

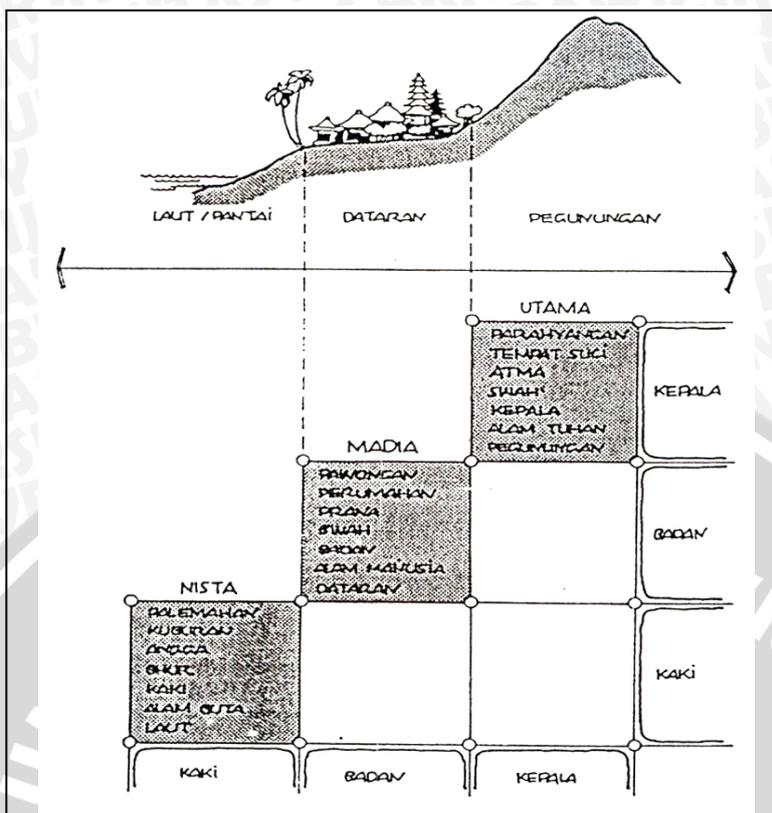
Tri Hita Karana yang secara harfiah *Tri* berarti tiga; *Hita* berarti kemakmuran, baik, gembira, senang dan lestari; dan *Karana* berarti sebab musabab atau sumbernya sebab (penyebab) atau tiga sebab yang menjadikan kehidupan yaitu atma (zat penghidup atau jiwa), Prana (tenaga) dan angga (jasad/fisik). Bhuana agung (alam semesta) yang sangat luas tidak mampu digambarkan oleh manusia (bhuana alit), namun antara keduanya memiliki unsure yang sama, yaitu *Tri Hita Karana*, oleh sebab itu manusia dipakai sebagai cerminan. Konsepsi *Tri Hita Karana* dipakai dalam pola perumahan tradisional yang diidentifikasi; Parhyangan / Kahyangan Tiga sebagai unsure

Atma/jiwa, Krama/warga sebagai unsure Prana atau tenaga, dan Palemahan/tanah sebagai unsur Angga/jasad.

Konsepsi *Tri Hita Karana* melandasi terwujudnya susunan kosmos dari yang paling makro (alam semesta) sampai hal yang paling mikro (manusia). Dalam alam semesta jiwa adalah Paramatma (Tuhan yang Maha Esa), tenaga adalah Panca Maha Bhuta. Dalam perumahan tingkat desa; jiwa adalah pawongan (Pura Desa), tenaga adalah pawongan (masyarakat) dan jasad adalah palemahan (wilayah desa).

Tri Hita Karana sebagaimana penjelasan di atas memberikan konsep turunan dalam aspek tata ruang bali dalam konsep *Tri Angga*. Secara harfiah tri Angga berarti tiga badan yang lebih menekankan pada tiga nilai fisik yaitu *Utama Angga*, *Madya Angga* dan *Nista Angga*. Ketiga nilai tersebut didasarkan secara vertical dimana nilai utama pada posisi teratas atau sakral, madya pada posisi tengah dan nista pada posisi terendah atau kotor. *Tri Angga* yang memberikan arahan tata nilai secara vertikal, juga terdapat tata nilai *Hulu teben*. *Hulu teben* ini memiliki orientasi antara lain pertama, berdasarkan sumbu bumi yaitu arah *kaja-kelod* (gunung dan laut); kedua, arah tinggi-rendah (tegeh dan lebah) dan berdasarkan sumbu matahari yaitu timur-barat. Tata nilai berdasarkan sumbu bumi memberikan arah utama pada arah kaja (gunung) dan nilai nista pada arah kelod (laut), sedangkan berdasarkan sumbu matahari, nilai utama pada arah matahari terbit dan nista pada arah matahari terbenam. Jika kedua sistem ini digabungkan, secara imajiner akan terbentuk pola *Sanga Mandala*, yang membagi ruang menjadi sembilan segmen.

Dalam lingkup desa konsep *Sanga Mandala*, menempatkan kegiatan yang bersifat suci (Pura Desa) pada daerah *utamaning utama* (*kaja-kangin*), sedangkan untuk daerah *Nistaning Nista* (*kelod – kauh*) sebagai tempat Pura Dalem dan kuburan. Konsep *Tri Mandala* menempatkan kegiatan yang bersifat sakral di daerah *utama*, kegiatan yang bersifat keduniawian (sosial, ekonomi dan perumahan) di daerah *madya*, dan kegiatan yang dipandang kotor mengandung limbah di daerah *nista*.



Gambar 2. 1 Pembagian Ruang Berdasarkan Konsepsi Tri Angga
Sumber: Parwata, 2004

Tabel 2. 1 Kriteria Unsur-Unsur Pola Tata Ruang Tradisional Bali (PTRTB)

Zona	Kriteria berdasarkan PTRTB
Utama	Zona hulu (utara/timur) sebagai kawasan yang harus dilindungi dari kegiatan produksi, karena disamping sebagai kriteria teknis yang merupakan kawasan sumber air dan hutan, juga jika ditinjau dari konsep nilai yang berlaku maka daerah hulu adalah daerah orientasi yang utama dari kehidupan masyarakat. Adapun kriteria pemanfaatan lahannya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pura penataran dan Pura Puseh 2. Merajan/Pura keluarga 3. Wantilan/Balai rapat untuk kegiatan Pura 4. Piyasan/tempat untuk meletakkan sesaji
Madya	Merupakan zona/tempat yang nilai kesakralannya lebih rendah dari zona Utama. Zona ini sebagai tempat pergerakan/sirkulasi masyarakat, dan merupakan zona untuk melakukan interaksi di masyarakat termasuk didalamnya, yaitu permukiman masyarakat. Refelksi dari mikro ke makro, yaitu perut manusia yang secara teknis sebagai tempat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Terbuka Hijau/taman/kebun raya 2. Warung, pasar, toko, dan artshop 3. Lapangan olahraga 4. Utilitas 5. Apotek 6. Tempat parkir
Nista	Sebagai zona yang digunakan sebagai lokasi yang umumnya berupa Pura Dalem Kahyangan dan Pura Mrajapati sekaligus ruang terbuka. Zona ini merupakan zona pembuangan akhir, seperti: <ol style="list-style-type: none"> 1. Limbah 2. Sampah 3. Kuburan 4. Laut 5. Ladang/Tegalan

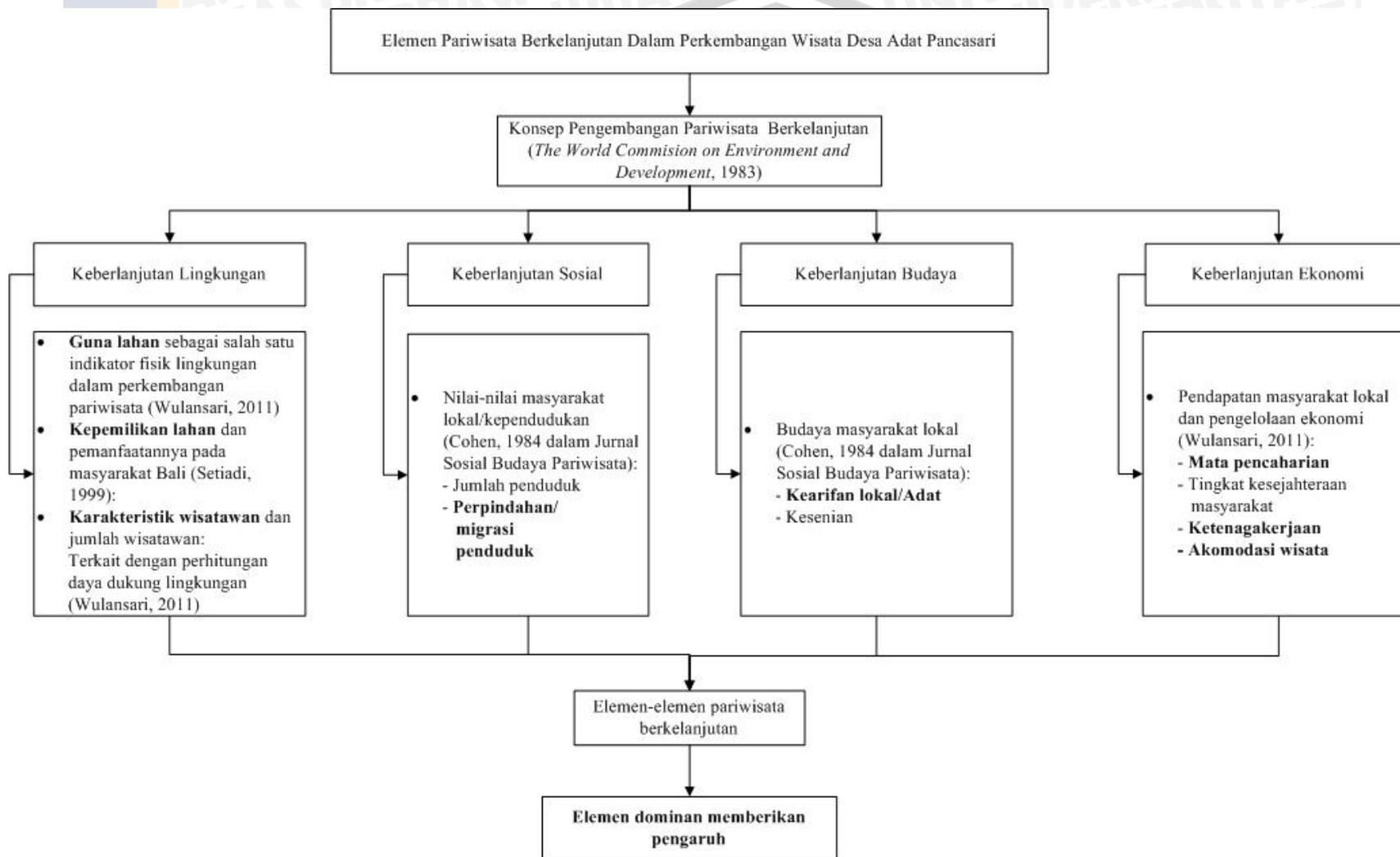
-
6. Sawah
 7. Toilet
-

Sumber: Peraturan Tata Ruang Tradisional Bali (PTRTB, 2011)

2.7 Analisis DEMATEL

DEMATEL (*Decision Making Trial and Evaluation Laboratory*) merupakan analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar faktor dalam kasus sosial atau faktor lain yang bersangkutan. Pengidentifikasian faktor dengan menggunakan analisis ini bertujuan untuk menemukan faktor yang berpengaruh paling besar/dominan terhadap faktor lain (Tzeng, 2007). Tujuan utama dari analisis DEMATEL adalah untuk menggambarkan hubungan langsung dan dapat memberikan nilai besar kecilnya pengaruh yang terjadi dalam hubungan skema tersebut. Suatu digram/skema pengaruh dan metode ini sangat efektif digunakan untuk menganalisis faktor yang paling dominan berperan dalam keberlanjutan suatu perencanaan atau sistem program (Wu, 2008). Analisis DEMATEL sama seperti analisis pengambilan keputusan lainnya, hanya saja analisis ini memiliki pendekatan yang sistematis untuk dapat secara sekaligus mengidentifikasi faktor, hubungan antar faktor, dan bobot (besar/kecilnya nilai pengaruh) yang ditimbulkan antar faktor. Melalui pendekatan ini, maka hasil pengambilan keputusan menjadi lebih akurat. Pendekatan DEMATEL digunakan untuk pemecahan masalah di berbagai bidang, seperti strategi bisnis, strategi pemasaran, evaluasi pendidikan, proyek perencanaan, dan kualitas pelayanan (Tseng, 2009; Buyukozkan and Ozturkcan, 2010; Chen and Chen, 2010). DEMATEL secara efektif dapat mengerti hubungan pengaruh melalui matrik dan angka kekuatan pengaruh. Gabus and Fontela (1973) menjelaskan bahwa terdapat 3 dasar asumsi analisis DEMATEL, yaitu:

1. Menggunakan angka 1,2,3,4, and 5 untuk mengetahui kekuatan pengaruh yang diberikan dari satu faktor ke faktor yang lainnya.
2. Menjelaskan definisi karakteristik faktor dan hubungannya melalui skema pengaruh/dampak.
3. Faktor yang paling dominan berpengaruh ditetapkan sebagai faktor kunci.



Gambar 2.2 Kerangka Teori
 Sumber: Hasil pemikiran, 2013

Tabel 2. 2 Studi Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Publikasi	Variabel	Lokasi studi	Tujuan	Metode Analisis	Output	Keterangan
1.	Erina Wulansari (2010)	Pengembangan Kawasan Wisata Alam Di Desa Padusan Kecamatan Pacet Berdasarkan Atas Daya Dukung Lingkungan Berkelanjutan	Jurnal Tugas Akhir	<ul style="list-style-type: none"> - Aspek fisik: <ul style="list-style-type: none"> • Guna lahan • Kepemilikan lahan • Sarana dan prasarana pendukung wisata (Akomodasi wisata dan aksesibilitas) • Daya tarik wisata (Atraksi wisata) - Aspek non fisik: <ul style="list-style-type: none"> • Kekhasan sosial budaya/adat • Karakteristik wisatawan • Mata pencaharian • Tingkat kesejahteraan • Ketenagakerjaan 	Desa Padusan Kecamatan Pacet	<ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis daya dukung lingkungan baik dari aspek fisik dan non fisik untuk pengembangan kawasan wisata alam di Desa Padusan - Menentukan variabel penting yang dapat dijadikan sebagai penentu untuk pengembangan kawasan wisata 	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Daya Dukung Lingkungan - Analisis Hierarchy Process (AHP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Penilaian terhadap daya dukung lingkungan kawasan wisata di Desa Padusan - Identifikasi faktor penentu pengembangan kawasan wisata alam Desa Padusan 	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan: Menentukan faktor yang paling berpengaruh terhadap eksistensi kegiatan wisata di kehidupan suatu desa. - Perbedaan: Lokasi dan analisis penelitian yang digunakan berbeda. Pada penelitian ini tidak menjelaskan hubungan antar variabel, namun hanya menentukan variabel prioritas sebagai faktor yang paling berpengaruh dalam perkembangan wisata di suatu desa.

No	Nama Peneliti	Judul	Publikasi	Variabel	Lokasi studi	Tujuan	Metode Analisis	Output	Keterangan
2.	I Putu Gede Wiradana, I Gusti Putu Anindya Putra, Endratno Budi (2007)	Penataan Sempadan Pantai Seseh Berdasarkan Konsep Penataan Ruang Tradisional Bali (Studi Kasus: Desa Adat Seseh, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung)	Jurnal Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Pola kegiatan - Pemanfaatan lahan 	Desa Adat Seseh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung.	<ul style="list-style-type: none"> - Memperoleh gambaran mengenai kegiatan di Desa Adat Seseh guna mengintegrasikan dengan kegiatan penataan sempadan pantai. - Memperoleh arahan rencana penataan sempadan pantai yang sesuai dengan peraturan pola ruang tradisional Bali. 	Metode analisis deskriptif, yaitu analisis terhadap peranan desa adat, analisa hirarki, dan orientasi penataan dan pembagian ruang.	<ul style="list-style-type: none"> - Arahan penataasn sempadan Pantai Seseh yang sesuai dengan peraturan pola ruang tradisional Bali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Persamaan: Mengetahui peran kebudayaan di Bali, yaitu kearifan lokal desa adat dalam mengendalikan kegiatan penataan suatu kawasan - Perbedaan: Wilayah penelitian berbeda dan pada penelitian terdahulu tidak menjelaskan mengenai hubungan antar variabel dalam implementasi sosial budaya tersebut, serta tidak mencari variabel yang dominan berperan dalam pengembangan pariwisata di Bali.



BAB III

METODE PENELITIAN

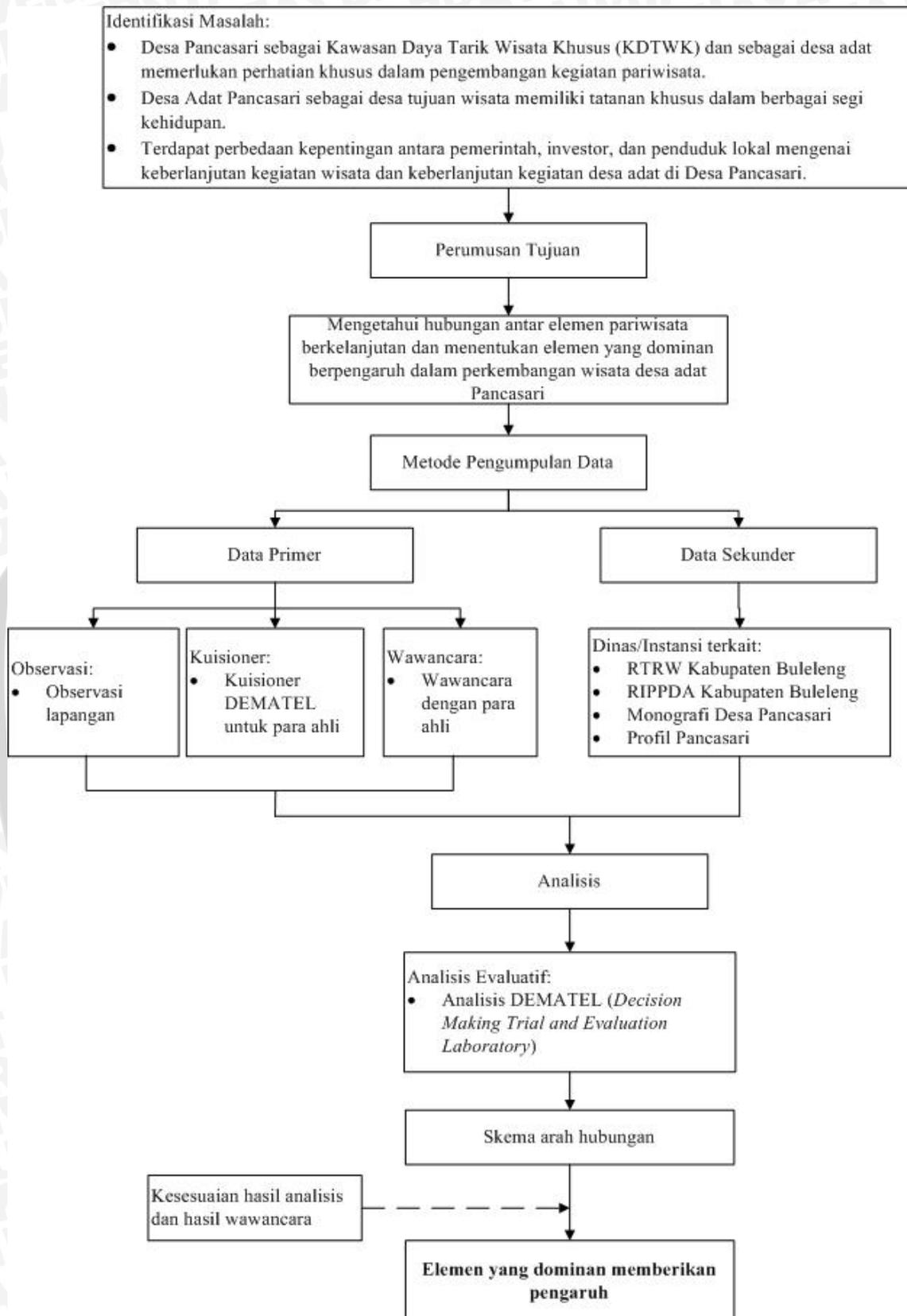
3.1 Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Elemen Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perkembangan Wisata Desa Adat Pancasari merupakan jenis penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafah, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2011). Disebut juga sebagai penelitian kuantitatif karena dalam penelitian ini menggunakan data-data berupa angka untuk perhitungan analisisnya.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antar elemen pariwisata berkelanjutan, sehingga menemukan elemen yang dominan memberikan pengaruh dalam keberlangsungan kegiatan pariwisata dan kegiatan adat di Desa Pancasari.

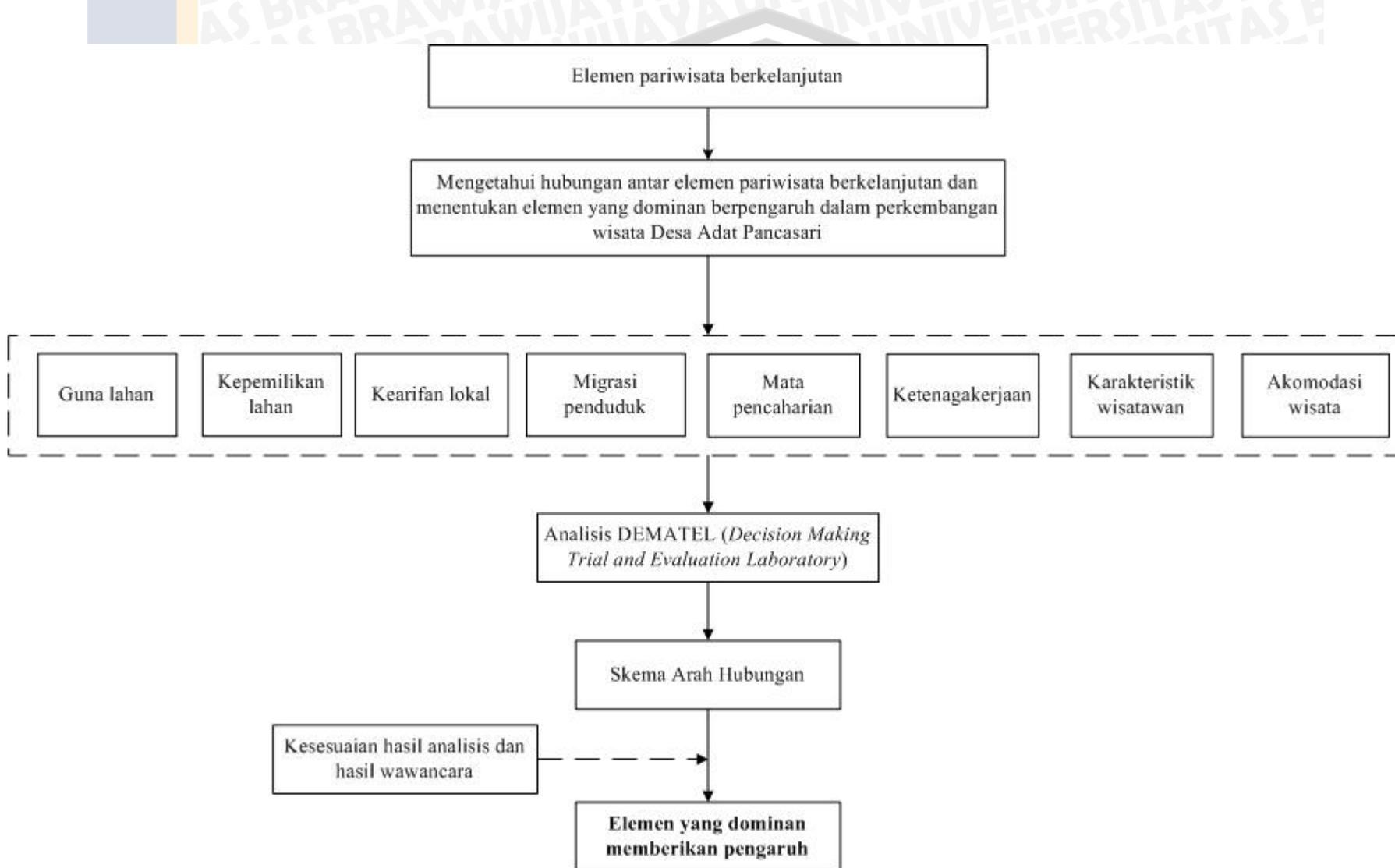
3.2 Diagram Alir Penelitian

Diagram alir penelitian merupakan alur metodologi yang akan digunakan dalam kegiatan penelitian. Diagram alir penelitian bertujuan untuk mempermudah proses penelitian. Langkah-langkah dalam kegiatan penelitian ini lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3. 1 Diagram alir penelitian

Sumber: Hasil Pemikiran, 2013



Gambar 3.2 Kerangka analisis penelitian

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian Elemen Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perkembangan Wisata Desa Adat pancasari dilakukan di Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

3.4 Penentuan Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan unsur dari sekelompok objek yang akan diteliti yang dapat diukur dan diamati. Berdasarkan teori yang didapatkan, maka ditetapkan variabel yang akan dibahas dan diteliti dalam penelitian, yaitu dijelaskan dalam tabel berikut:



Tabel 3. 1Penentuan Variabel Penelitian

Masalah	Tujuan	Variabel	Parameter	Sumber
Bagaimana hubungan antar elemen pariwisata berkelanjutan dalam perkembangan Wisata Desa Adat Pancasari?	Mengetahui hubungan antar elemen pariwisata berkelanjutan dalam perkembangan Wisata Desa Adat Pancasari,	Penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> Lahan Pertanian Lahan non pertanian 	Wulansari (2011)
		Kepemilikan lahan	<ul style="list-style-type: none"> Status kepemilikan lahan 	Setiadi (1999)
		Kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> Konsep <i>Tri Hita Karana</i> 	Pitana (2005)
		Migrasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah migran yang masuk dan keluar 	Cohen (1984)
		Mata pencaharian	<ul style="list-style-type: none"> Pertanian Non pertanian 	Wulansari (2011), Cohen (1984)
		Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah tenaga kerja dalam kelompok umur tenaga kerja 	Wulansari (2011), Erawan (1993)
		Karakteristik wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah wisatawan Tujuan kunjungan wisatawan 	Wulansari (2011)
		Akomodasi wisata	<ul style="list-style-type: none"> Jenis akomodasi wisata Jumlah akomodasi 	Wulansari (2011)
Elemen manakah yang dominan memberikan pengaruh dalam perkembangan Wisata Desa Adat Pancasari?	Menentukan elemen yang dominan memberikan pengaruh dalam perkembangan Wisata Desa Adat Pancasari.	Penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> Skema Arah Hubungan hasil analisis DEMATEL 	Hasil Analisis Rumusan Masalah 1
		Kepemilikan lahan		
		Kearifan lokal		
		Migrasi		
		Mata pencaharian		
		Tenaga kerja		
		Karakteristik wisatawan		
Akomodasi				

Sumber: Hasil Modifikasi Indikator Pariwisata Berkelanjutan, 2012

3.5 Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat, kata, atau gambar. Sedangkan, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

3.5.1 Survei primer

Perolehan data melalui survei primer dilakukan dalam bentuk observasi/pengamatan lapangan, wawancara, dan kuisisioner.

A. Observasi/pengamatan lapangan

Observasi merupakan proses pengumpulan data dan informasi dengan melihat secara langsung dan mengamati di lapangan terkait karakteristik penggunaan lahan, keadaan sosial budaya masyarakat, keadaan ekonomi penduduk setempat, dan aktivitas pariwisata.

B. Wawancara

Metode ini dilakukan untuk menyerap pendapat, persepsi, atau opini yang sifatnya subyektif. Metode wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi terkait elemen-elemen yang mendukung konsep wisata desa adat berkelanjutan di Desa Adat Pancasari, elemen-elemen yang dapat membentuk suatu hubungan/pengaruh dalam keberlanjutan wisata Desa Adat Pancasari, dan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian. Wawancara dilakukan pada para ahli (*experts*) yang memahami dan mengetahui betul keadaan desa adatnya untuk mendapatkan informasi yang sedalam-dalamnya terkait keberlanjutan kegiatan pariwisata di desa adat Pancasari. Metode wawancara ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu sebelum dan setelah menyebarkan kuisisioner penelitian.

C. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan atau angket yang berisikan variabel-variabel pariwisata berkelanjutan yang kemudian akan diberikan skor atau penilaian oleh responden. Kuisisioner disebarkan kepada responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, tanggapan, pendapat, dan kegiatan responden terhadap objek yang ditanyakan. Pemilihan sampel pada penelitian ini dilakukan secara *purposive*, yaitu ditujukan kepada para ahli yang sangat memahami keadaan desa adatnya, serta telah lama tinggal di desa Pancasari. Dalam pengisian kuisisioner, responden akan didampingi dan dipandu oleh peneliti. Pengisian kuisisioner oleh responden dilakukan

dengan memberikan penilaian terhadap variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel lain pasangannya, serta diperhatikan nilai yang akan diberikan untuk menggambarkan besar atau kecilnya pengaruh. Permasalahan yang akan ditanyakan dalam kuisioner adalah hubungan/pengaruh antar variabel-variabel yang berasal dari sektor penggunaan lahan, sosial budaya, ekonomi, dan kegiatan pariwisata. Hasil dari kuisioner ini untuk mendapatkan faktor/variabel kunci yang paling dominan berpengaruh dalam menjaga keberlanjutan desa adat Pancasari sebagai desa tujuan wisata.

Tabel 3. 2 Data Primer

No	Metode survei	Sumber data	Jenis data yang diperoleh
1.	Observasi/pengamatan	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi lapangan desa Pancasari, meliputi kondisi penggunaan lahan, status kepemilikan lahan, kearifan lokal, migrasi penduduk, mata pencaharian penduduk, ketenagakerjaan, karakteristik wisatawan, dan akomodasi wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan masing-masing variabel dari periode sebelum hingga sesudah ditetapkan sebagai desa wisata.
2.	Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> Para ahli (<i>experts</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Elemen-elemen dan hubungan antar elemen pariwisata berkelanjutan di Desa Adat Pancasari.
3.	Kuisioner	<ul style="list-style-type: none"> Responden, yaitu para ahli (<i>experts</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> Berupa angka yang menjelaskan nilai besar kecilnya pengaruh antar variabel untuk kemudian digunakan sebagai bahan analisis.

Sumber: Hasil Pemikiran, 2013

3.5.2 Survei sekunder

Survei sekunder merupakan pencarian data yang dilakukan pada instansi-instansi terkait untuk mendukung data yang diperoleh dari survei primer yang berhubungan dengan materi penelitian.

A. Studi literatur/pustaka

Literatur yang dimaksud dapat berupa buku, penelitian terdahulu, artikel dan koran, guna mencari dukungan fakta, informasi atau teori-teori dalam menentukan landasan teori atau kerangka teori dalam penelitian.

B. Survei instansi

Survei ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran kualitatif dan kuantitatif yang berupa uraian data, angka, dan peta. Instrumen yang dijadikan dasar bahwa penelitian yang dilakukan telah sah, serta menyatakan peminjaman data-data yang dibutuhkan.

Tabel 3. 3Data Sekunder

No.	Metode survei	Sumber data	Jenis data
1.	Studi literatur/pustaka	<ul style="list-style-type: none"> Buku literatur/pustaka Internet 	<ul style="list-style-type: none"> Tinjauan pustaka tentang variabel-variabel pariwisata berkelanjutan dan pengaruh masing-masing variabel tersebut dalam kegiatan wisata di suatu wilayah. Profil desa Pancasari Profil objek wisata yang ada di desa Pancasari Jurnal terkait penelitian yang dilakukan Penelitian terdahulu
2.	Survei instansi	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda Kabupaten Buleleng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buleleng Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng BPS Kabupaten Buleleng Kantor Desa Pancasari 	<ul style="list-style-type: none"> RTRW Kabupaten Buleleng Rancangan RIPP Kabupaten Buleleng Profil Objek Wisata di Desa Pancasari Peta Dasar dan Citra Satelit Desa Pancasari Kecamatan Dalam Angka Profil Desa Pancasari Monografi Desa Pancasari Kebijakan/Peraturan desa adat Pancasari

Sumber: Hasil Pemikiran, 2013

3.6 Informan Penelitian

Subjek penelitian menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan penelitian ini, meliputi tiga macam, yaitu (Hendarso dalam Suyanto, 2005:171-172):

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan biasa, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti.

Dari penjelasan diatas, maka peneliti menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan informannya. Menurut Sugiyono (2009: 300), Teknik *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang menjadi informan peneliti adalah:

1. Informan kunci terdiri dari satu orang *Bendesa Adat* Desa Pancasari yang juga merupakan tokoh masyarakat utama dan tokoh agama di Desa Adat Pancasari, yaitu I Made Sukerawan.
2. Informan biasa terdiri dari dua orang pemuka adat yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa Adat Pancasari, yaitu I Gede Bagia dan Nyoman Wartama. Kemudian, satu orang tokoh Lembaga Adat, yaitu I Nengah Sudartayasa, dan satu orang pengembang akomodasi wisata yang telah terlibat sebelum Desa Pancasari ditetapkan sebagai Desa Wisata, yaitu K. Lios Wirawantha.

3.7 Metode Analisis

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis evaluatif secara kualitatif maupun kuantitatif.

3.7.1 Metode analisis evaluatif

Metode analisis evaluatif yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

A. Analisis DEMATEL (*Decision Making Trial and Evaluation Laboratory*)

Analisis ini dapat memetakan letak masing-masing elemen untuk kemudian digambarkan arah hubungan antar elemen berdasarkan nilai kekuatan pengaruh yang telah dihitung sebelumnya. Nilai kekuatan pengaruh ini dapat berupa nilai positif dan negatif. Nilai positif pada suatu elemen dapat memberikan pengaruh pada elemen yang bernilai negatif. Kuat lemahnya pengaruh antar elemen, ditunjukkan oleh besar kecilnya nilai yang dihasilkan pada perhitungan matrik *net influence*. Penggambaran pengaruh antar elemen pada analisis ini didasarkan atas hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para ahli di Desa Adat Pancasari. Penelitian ini tidak menggunakan validasi data, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang kebenaran variabelnya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli yang benar-benar memiliki pengetahuan dan dapat memberikan informasi sedalam-dalamnya terkait penelitian yang dilakukan.

Langkah awal validasi data yang dilakukan kepada para ahli adalah dengan melakukan reduksi variabel, yaitu dari 11 variabel menjadi 8 variabel yang digunakan. Variabel-variabel yang akan direduksi, dipaparkan melalui tabel berikut ini:

Tabel 3. 4 Susunan variabel sebelum reduksi

Aspek Berkelanjutan	Elemen	Sumber
Lingkungan/Ekologis	- Guna lahan	Wulansari, 2011
	- Kepemilikan lahan	Setiadi, 1999
	- Karakteristik wisatawan dan jumlah wisatawan	Wulansari, 2011
Ekonomi	- Mata pencaharian penduduk	Wulansari, 2011
	- Tingkat kesejahteraan masyarakat	Cohen, 1984
	- Ketenagakerjaan	Cohen, 1984
	- Akomodasi wisata	Wulansari, 2011
Sosial	- Jumlah penduduk	Cohen, 1984
	- Perpindahan penduduk/migrasi penduduk	Cohen, 1984
Budaya	- Kearifan lokal/Adat	Cohen, 1984
	- Kesenian	Cohen, 1984

Elemen pada tabel di atas dibawa ke lokasi penelitian untuk ditanyakan kepada informan kunci. Berdasarkan hasil wawancara bersama informan kunci tersebut, kemudian ditentukan 8 elemen yang mana kedelapan elemen ini yang dapat diamati dan memiliki peran dalam keberlanjutan wisata di Desa Adat Pancasari. Selanjutnya, kedelapan elemen ini ditanyakan kepada informan biasa mengenai bagaimana kaitan kedelapan elemen tersebut dalam perkembangan wisata di Desa Adat Pancasari. Hasil wawancara ini dikorelasikan dengan teori terkait keberlanjutan wisata di suatu desa adat. Setelah kedelapan elemen dianggap benar berdasarkan penjelasan dari para ahli dan sesuai dengan tujuan, serta teori yang digunakan, maka kedelapan elemen ini dapat digunakan sebagai variabel dalam penelitian. Kedelapan elemen tersebut telah dipaparkan secara jelas pada **Tabel 3.1**.

Setelah ditetapkan 8 elemen sebagai variabel penelitian, selanjutnya ditanyakan kembali kepada informan kunci dan informan biasa melalui kuisioner terkait besar kecilnya nilai pengaruh antar variabel. Hasil kuisioner ini menjadi inputan data untuk kelanjutan analisis DEMATEL. Pada kuisioner, penilaian pengaruh antar variabel menggunakan data ordinal, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Skala perbandingan Dematel

Skala Perbandingan	Keterangan
1	Tidak memiliki pengaruh
2	Pengaruh rendah
3	Pengaruh sedang/cukup
4	Pengaruh tinggi
5	Pengaruh sangat tinggi

Sumber: Lin, Tzeng, Tsai et al., 2009

Berdasarkan banyaknya jumlah variabel yang digunakan, yang kemudian disebut sebagai faktor pariwisata berkelanjutan di Desa Pancasari, maka akan didapatkan banyaknya jumlah perbandingan antar faktor yang dapat digambarkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Jumlah perbandingan} = \frac{n(n-1)}{2} \quad (3-1)$$

Dari rumus diatas didapatkan sejumlah 28 buah perbandingan antar faktor pariwisata berkelanjutan yang ditampilkan pada kuisisioner. Pada setiap perbandingan diukur/diberikan penilaian dengan menggunakan skala perbandingan seperti yang telah disebutkan dalam **Tabel 3.5**.

Adapun tahapan analisis Dematel dijelaskan sebagai berikut:

1. Membuat matrik perbandingan nilai antar faktor hasil dari kuisisioner yang telah disebarkan kepada responden/para ahli.
2. Menghitung rata-rata geometri dari masing-masing hubungan antar faktor untuk masing-masing responden. Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$U = \sqrt[n]{x_1, x_2, x_3 \dots \dots x_n} \quad (3-2)$$

3. Selanjutnya, dilakukan perhitungan determinan a_{ij} . Nilai determinan digunakan untuk menghitung matrik multipel. Dari matrik ini didapatkan nilai S atau matrik hubungan langsung (*direct influence*) dengan rumus sebagai berikut:

$$S \text{ Matrix} = m.A \quad (3-3)$$

4. Agar dapat menghitung nilai S, dicari terlebih dahulu nilai m dengan rumus:

$$m = 1/\text{nilai maksimal matrik multipel} \quad (3-4)$$

5. Setelah mendapatkan matrik S, selanjutnya dihitung matrik T atau matrik hubungan tak langsung (*indirect influence*) dengan rumus sebagai berikut:

$$T \text{ Matrix} = (I-S) \quad (3-5)$$

6. Hasil matrik T diinvers. Nilai invers matrik T digunakan untuk menemukan nilai vektor baris dan vektor kolom. Hasil dari vektor baris dan kolom dirangkum dalam diagram cartesius. Perhitungan untuk sumbu x menggunakan rumus sebagai berikut:

$$x = ri+dj \quad (3-6)$$

Sedangkan, untuk koordinat y dihitung dengan rumus:

$$y = ri-dj \quad (3-7)$$

7. Setelah mendapatkan nilai koordinat x dan y, kemudian digambarkan masing-masing titik tersebut kedalam diagram cartesius untuk mengetahui letak masing-masing faktor dalam diagram tersebut guna menentukan arah dan mengetahui kuat lemahnya hubungan antar faktor. Kuat lemahnya hubungan antar faktor pada diagram cartesius dapat ditentukan dari besar kecilnya nilai hubungan antar variabel melalui perhitungan matrik *net influence*. Berdasarkan diagram tersebut, dapat dibuat skema pengaruh untuk kemudian mengetahui faktor mana yang berpotensi memberikan pengaruh dominan (yang kemudian diasumsikan sebagai faktor kunci) dalam menjaga keberlanjutan kegiatan wisata di Desa Adat Pancasari.

B. Analisis evaluatif dengan kajian teori

Hasil analisis DEMATEL selanjutnya dievaluasi dengan teori yang berkaitan dengan hubungan antara elemen pariwisata berkelanjutan. Analisis ini dijadikan sebagai pendukung untuk memutuskan elemen mana yang menjadi elemen dominan (elemen kunci).

Tabel 3. 6 Desain Survei

No.	Tujuan	Variabel	Data yang diperlukan	Metode pengambilan data	Metode analisis	Output
1.	Mengetahui hubungan antar elemen pariwisata berkelanjutan dalam perkembangan Wisata Desa Adat Pancasari.	Penggunaan lahan	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan guna lahan pada periode sebelum dan sesudah menjadi desa wisata 	<ul style="list-style-type: none"> Survei primer: Wawancara dan penyebaran kuisioner kepada para ahli Survei sekunder: <ul style="list-style-type: none"> Kecamatan Sukasada Dalam Angka 2012 Profil Pembangunan Desa Pancasari 2011 Monografi Desa Pancasari 2011 Profil Desa Pancasari 2011 Peraturan Tata Ruang Tradisional Bali (PTRTB) 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis evaluatif hasil kuisioner: <ul style="list-style-type: none"> Analisis Kesesuaian teori keberlanjutan kondisi eksisting Analisis DEMATEL 	<ul style="list-style-type: none"> Hubungan antara elemen pariwisata berkelanjutan yang digambarkan dalam skema pengaruh DEMATEL
Kepemilikan lahan		<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan kepemilikan lahan pada periode sebelum dan sesudah menjadi desa wisata 				
Kearifan lokal		<ul style="list-style-type: none"> Konsep Tata Ruang Tradisional Bali Perkembangan batas kawasan 				
Migrasi penduduk		<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan migrasi penduduk yang masuk dan keluar Desa Pancasari pada periode sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai desa wisata 				
Mata pencaharian		<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan pencaharian penduduk pada periode sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai desa wisata 				
Tenaga kerja		<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan ketenagakerjaan pada periode sebelum dan sesudah ditetapkan sebagai desa wisata 				

No.	Tujuan	Variabel	Data yang diperlukan	Metode pengambilan data	Metode analisis	Output
		Karakteristik wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara 			
		Akomodasi	<ul style="list-style-type: none"> Perkembangan jenis akomodasi wisata pada periode sebelum dan sesudah ditetapkan menjadi desa wisata. 			
2.	Menentukan elemen yang dominan memberikan pengaruh dalam perkembangan Wisata Desa Adat Pancasari.	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan lahan Kepemilikan lahan Kearifan lokal Migrasi Mata pencaharian Tenaga kerja Karakteristik wisatawan Akomodasi 	<ul style="list-style-type: none"> Hasil Analisis DEMATEL Perspektif dari para ahli 	<ul style="list-style-type: none"> Survei primer: <ul style="list-style-type: none"> Wawancara dan penyebaran kuisioner kepada para ahli 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Evaluatif hasil analisis dan hasil interview para ahli (<i>experts</i>) 	Elemen dominan berpengaruh yang diasumsikan sebagai elemen kunci.

Sumber: Hasil pemikiran, 2013

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Desa Adat Pancasari

4.1.1 Letak Geografis

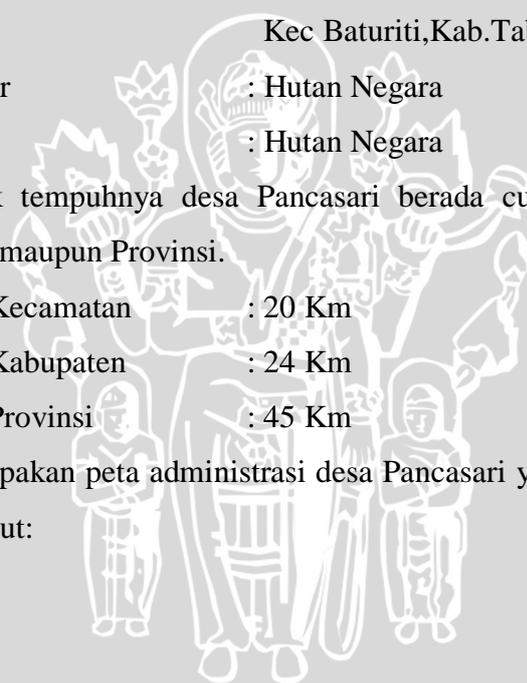
Desa Pancasari adalah salah satu desa dari 14 Desa diwilayah Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, sesuai dengan keadaan alam desa Pancasari yang merupakan daerah pegunungan, dengan ketinggian antara 1000 – 1100 meter dari permukaan laut dengan luas wilayah 12,80 Km². Dilihat dari lingkungan wilayahnya Desa Pancasari berbatasan dengan :

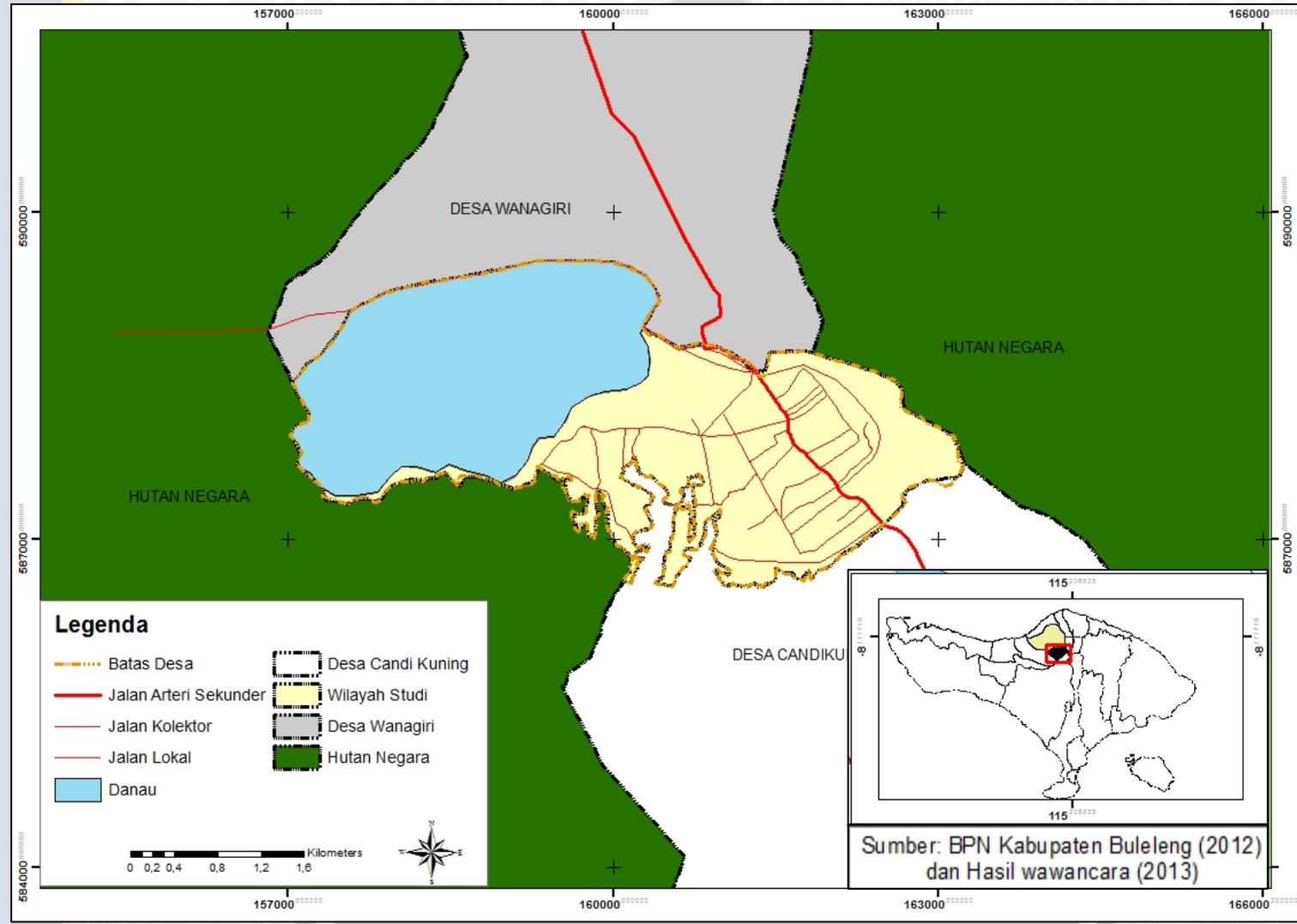
- a. Sebelah Utara : Desa Wanagiri
- b. Sebelah Selatan : Desa Candikuning,
Kec Baturiti, Kab. Tabanan
- c. Sebelah Timur : Hutan Negara
- d. Sebelah Barat : Hutan Negara

Dilihat dari jarak tempuhnya desa Pancasari berada cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten maupun Provinsi.

- a. Ke Ibu Kota Kecamatan : 20 Km
- b. Ke Ibu Kota Kabupaten : 24 Km
- c. Ke Ibu Kota Provinsi : 45 Km

Dibawah ini merupakan peta administrasi desa Pancasari yang dijelaskan dalam gambar 4.1, sebagai berikut:





Gambar 4. 1 Peta Administrasi Desa Adat Pancasari

4.2 Perkembangan Elemen-Elemen Pariwisata Berkelanjutan

Terdapat delapan elemen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu guna lahan, kepemilikan lahan, kearifan lokal, migrasi penduduk, mata pencaharian, ketenagakerjaan, karakteristik wisatawan, dan akomodasi wisata. Kedelapan elemen ini dilihat perkembangannya dari periode sebelum dan setelah Desa Pancasari ditetapkan sebagai Desa Wisata. Desa Pancasari ditetapkan sebagai desa wisata pada tahun 1998. Tujuan dari meninjau perkembangan delapan elemen tersebut adalah untuk mengkonfirmasi dan memperlihatkan bahwa antara kegiatan wisata dan desa adat dapat berjalan secara bersamaan dan berkelanjutan.

4.2.1 Guna lahan

Penggunaan lahan di Desa Pancasari dapat ditinjau dari lahan terbangun dan lahan tidak terbangun. Lahan di Desa Pancasari memiliki luas 1.280 Ha. Mayoritas penggunaan lahan di Desa Adat Pancasari adalah kebun atau perkebunan, yaitu dengan luasan mencapai 36,74% dari luas total desa. Perbandingan penggunaan lahan pada periode sebelum dan sesudah berkembang menjadi desa wisata dapat diamati melalui tabel berikut:

Tabel 4. 1 Perbandingan Luas Guna Lahan Sebelum dan Sesudah Menjadi Desa Wisata

No.	Jenis guna lahan	Luas		Keterangan
		Sebelum (Ha)	Sesudah (Ha)	
1	Permukiman	23,29	31,062	Bertambah
2	Kebun/Perkebunan	470,28	462,51	Berkurang
3	Tegalan/Ladang	338,78	315,58	Bertambah
4	Pertanian/Sawah	427	427	Tetap
5	Akomodasi wisata	20,65	43,85	Bertambah

Sumber: Hasil wawancara (2013)

Berdasarkan perkembangan guna lahan yang terjadi, kegiatan wisata di Desa Adat Pancasari memanfaatkan fungsi lahan perkebunan, sehingga guna lahan perkebunan mengalami penurunan luas lahan sekitar 7,77 Ha, karena digunakan untuk kebutuhan akomodasi wisata. Selain perkebunan, kegiatan wisata juga memanfaatkan lahan tegalan/ladang untuk memenuhi kebutuhan akomodasi wisata, sehingga terjadi penurunan luas lahan ladang/tegalan sekitar 23,3 Ha. Guna lahan permukiman mengalami penambahan luas karena adanya perpindahan penduduk, yaitu penduduk baru yang masuk Desa Pancasari, sehingga membutuhkan ruang baru untuk membangun permukiman. Guna lahan untuk kebutuhan akomodasi wisata juga mengalami penambahan luas. Sedangkan, untuk luas lahan pertanian/sawah memiliki

luasan yang tetap dikarenakan pertanian/sawah di Desa Adat Pancasari dilindungi oleh kepemilikan lahan adat.

Perkembangan diatas dapat didukung dengan hasil wawancara sebagai berikut:

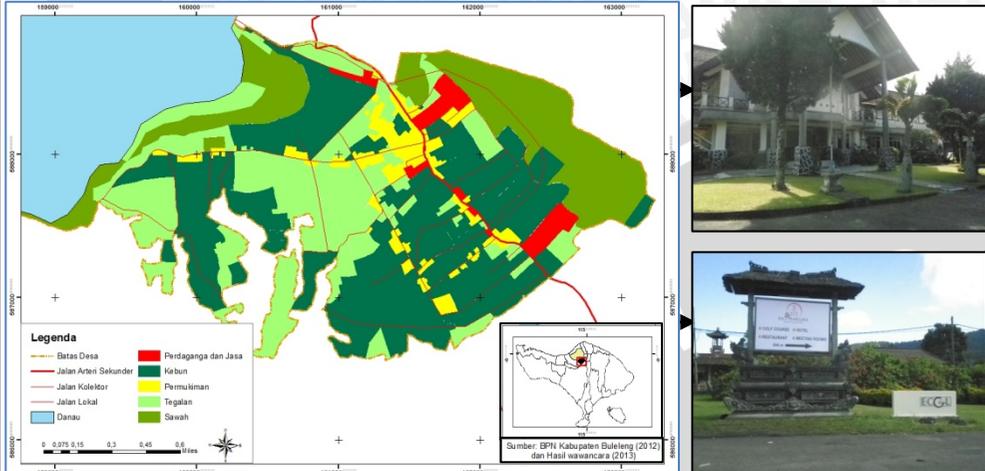
1. I Gede Bagia: Adanya kegiatan wisata di Desa Adat Pancasari dapat memberikan perkembangan terhadap guna lahannya. Guna mempertahankan penggunaan lahan untuk beberapa kawasan suci, maka perlu adanya batasan-batasan guna lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan wisata. Hal tersebut telah diatur dalam suatu *awig-awig* desa adat dan telah menjadi bagian dari kearifan lokal Desa Adat Pancasari.
2. Nyoman Wartama : Penggunaan lahan di Desa Adat Pancasari sejak dulu hingga sekarang yang terus-menerus ada adalah penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Guna lahan perkebunan diarahkan pada kegiatan agrowisata akibat adanya kegiatan wisata. Dalam pengarahan guna lahan perkebunan menjadi agrowisata, diatur dalam peraturan Desa Adat setempat dengan kebijakan pembagian hasil perkebunan untuk kegiatan wisata dan untuk kebutuhan penduduk setempat.
3. K. Lios Wirawantha: Arahan perkembangan guna lahan akibat adanya kegiatan wisata di Desa Adat Pancasari dapat dilihat dari batasan-batasan lahan yang telah ditetapkan oleh adat. Adat dalam suatu kearifan lokal memiliki ketentuan khusus dalam mengembangkan suatu kegiatan di Desa Adatnya, salah satunya untuk keperluan akomodasi wisata.
4. Nengah Sudartayasa: Desa Adat Pancasari memiliki konsep *Desa Kala Patra* yang tidak dapat terlepas dari penggunaan lahannya. *Desa Kala Patra* yang dimaksud adalah penentuan batasan-batasan kawasan suci dan kawasan lain di Desa Adat Pancasari, sehingga dapat mengendalikan penggunaan lahan yang terdapat di Desa Adat Pancasari.
5. Sukerawan: Penggunaan lahan di Desa Adat Pancasari dikendalikan melalui suatu tatanan khusus oleh karena adanya kawasan suci Pura Desa Adat, dan adanya lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan adat.

Hasil wawancara diatas didukung dengan teori dari Wulansari (2011) yang menyebutkan bahwa suatu penggunaan lahan sendiri akan dapat mempengaruhi arah pengembangan suatu kawasan dengan segala aktivitas yang akan diselenggarakan, salah satunya adalah aktivitas pariwisata. Pemanfaatan lahan di Desa Adat Pancasari pun telah dikendalikan oleh adanya suatu kearifan lokal dengan adanya batasan-batasan suci

yang telah ditetapkan oleh adat setempat (Pitana, 2005). Di Desa Adat Pancasari, contoh penggunaan lahan yang dibatasi yaitu penggunaan lahan untuk pertanian yang mana guna lahan pertanian merupakan milik adat yang hanya dapat dikembangkan dan dikelola untuk kepentingan adat dan bukan untuk kepentingan wisata. Untuk kepentingan wisata diperbolehkan mengembangkan pada lahan tegalan/ladang, dan perkebunan.

Secara spasial dapat dijelaskan sebagai berikut:





Legenda
 - Batas Desa (Yellow dashed line)
 - Jalan Arteri Sekunder (Red line)
 - Jalan Kolektor (Orange line)
 - Jalan Lokal (Grey line)
 - Danau (Blue area)
 - Perladangan dan Jasa (Red area)
 - Kebun (Dark Green area)
 - Perumahan (Yellow area)
 - Tegalan (Light Green area)
 - Sawah (Dark Green area)

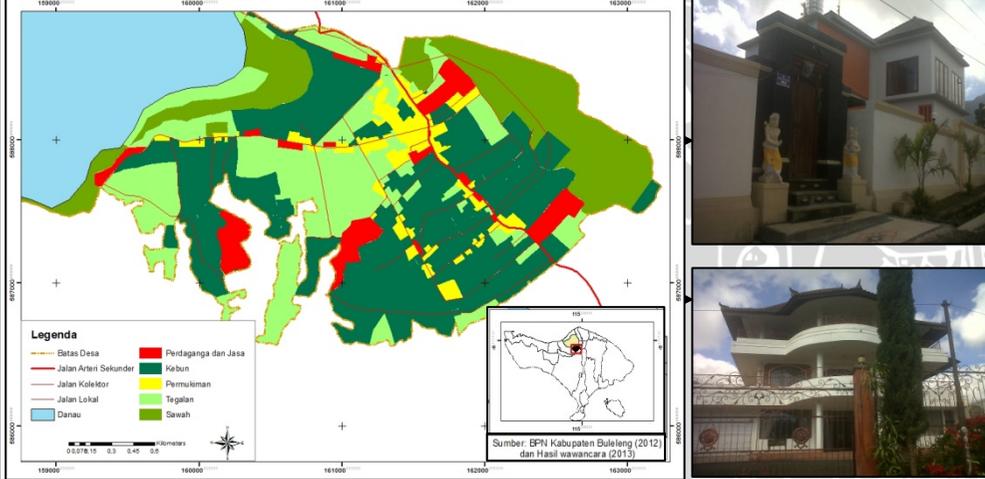
Sumber: BPN Kabupaten Buleleng (2012) dan Hasil wawancara (2013)

Wisma Nangun Kerti yang sudah ada menjadi akomodasi wisata di Desa Pancasari sejak tahun 1985. Akomodasi ini memanfaatkan lahan tegalan.



Bali Handara merupakan salah satu contoh akomodasi wisata di Desa Adat Pancasari. Hotel ini telah ada sejak periode sebelum ditetapkan sebagai desa wisata (sebelum tahun 1998).

Perkembangan guna lahan akibat pengadaaan akomodasi wisata sebelum menjadi desa wisata



Legenda
 - Batas Desa (Yellow dashed line)
 - Jalan Arteri Sekunder (Red line)
 - Jalan Kolektor (Orange line)
 - Jalan Lokal (Grey line)
 - Danau (Blue area)
 - Perladangan dan Jasa (Red area)
 - Kebun (Dark Green area)
 - Perumahan (Yellow area)
 - Tegalan (Light Green area)
 - Sawah (Dark Green area)

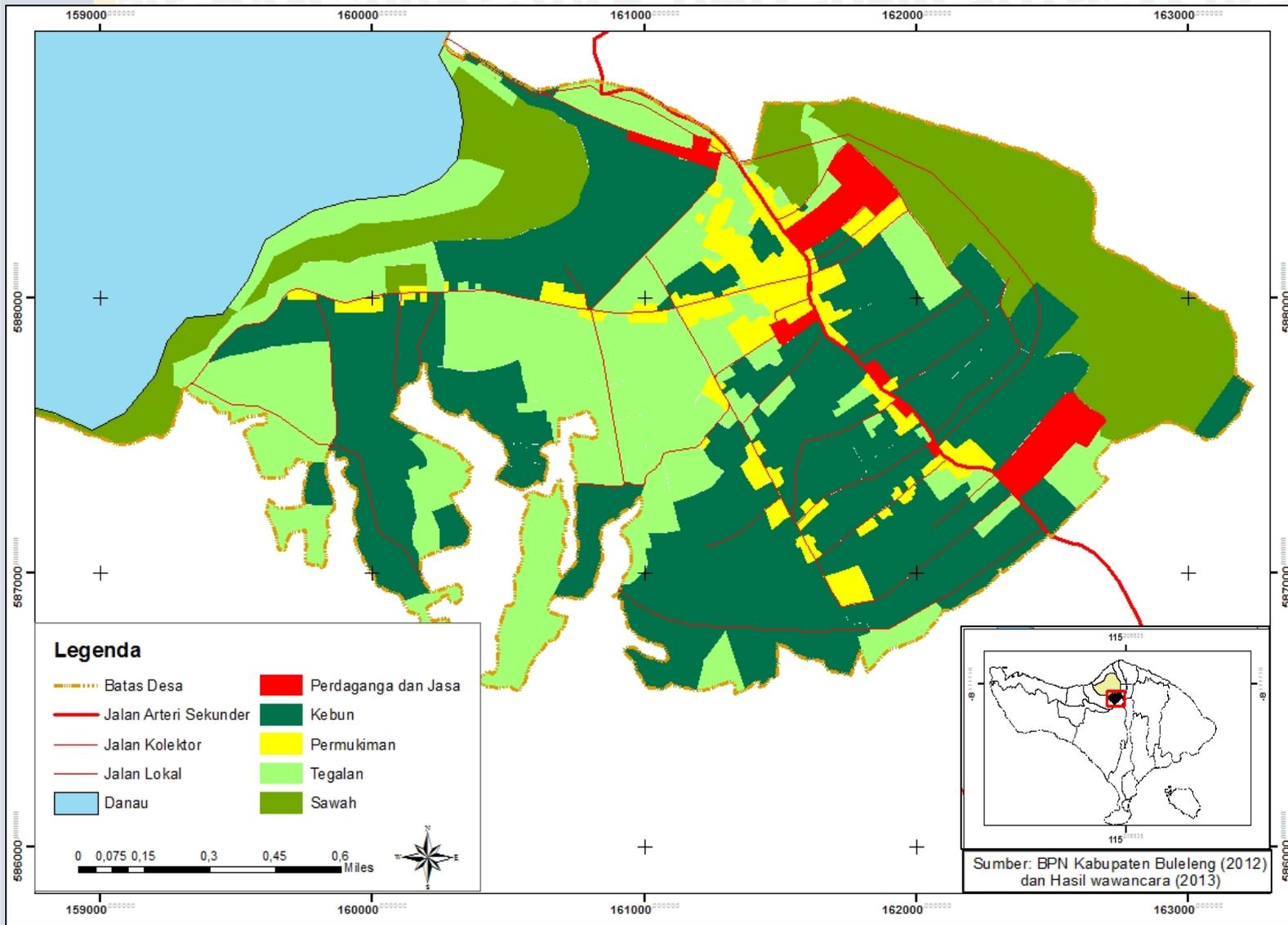
Sumber: BPN Kabupaten Buleleng (2012) dan Hasil wawancara (2013)

Villa seperti pada gambar disamping akomodasi wisata yang berkembang setelah Desa Adat Pancasari ditetapkan sebagai Desa Wisata . Akomodasi ini menggunakan lahan yang pada awalnya diperuntukkan untuk tegalan/ladang.

Villa seperti gambar disamping merupakan akomodasi wisata yang berkembang setelah Desa Adat Pancasari ditetapkan sebagai desa wisata. Villa tersebut memanfaatkan lahan tegalan dalam pembangunannya.

Perkembangan guna lahan akibat pengadaaan akomodasi wisata sesudah menjadi desa wisata

Gambar 4. 2 Contoh perkembangan guna lahan untuk kegiatan wisata
 Sumber: Hasil wawancara dan citra satelit, 2013



Gambar 4. 3 Peta Guna Lahan Sebelum Menjadi Desa Wisata

4.2.2 Kepemilikan lahan

Berlandaskan pada penggunaan lahan Desa Adat Pancasari pada periode sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Desa Wisata, maka dapat ditetapkan batas-batas hak lahan. Hal ini sesuai pula dengan peraturan adat Desa Pancasari untuk menentukan kawasan yang dapat dikembangkan dan kawasan yang seharusnya dipertahankan sebagai ciri khas adat. Secara lebih rinci, perkembangan batasan hak lahan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Perkembangan Batasan Hak Atas Tanah Desa Adat Pancasari Sebelum Menjadi Desa Wisata

Jenis tanah adat	Keterangan	Luas	
		Sebelum	Setelah
Tanah <i>druwe desa</i>	Permukiman	23,29 Ha	31,062 Ha
	Akomodasi wisata	20,65 Ha	43,85 Ha
Tanah <i>pelabe Pura</i>	Tempat Pura berdiri	0,10 Ha	0,10 Ha
Tanah <i>ayahan</i>	Pertanian	427 Ha	427 Ha
	Perkebunan	470,28 Ha	452,51 Ha
	Tegalan	338,78 Ha	315,58 Ha
Tanah <i>pekarangan desa</i>	Jalan desa	17 Km2	17 km2
	Daerah tangkapan air	311 Ha	311 Ha

Sumber: Hasil wawancara, 2013

Berdasarkan perkembangan batasan hak tanah Desa Adat Pancasari diatas, dapat diketahui bahwa, untuk jenis tanah *druwe desa* mengalami perluasan batasan hingga 30,97 Ha yang terdiri dari dua fungsi guna lahan, yaitu untuk permukiman dan akomodasi wisata. Tanah *Pelabe Pura* tidak mengalami perubahan karena telah ditetapkan oleh peraturan adat Desa Pancasari. Kemudian, untuk Tanah *Ayahan* mengalami pengurangan luas pada fungsi guna lahan perkebunan dan tegalan karena dipergunakan untuk kepentingan kegiatan wisata. Sedangkan, untuk tanah *pekarangan desa* tidak mengalami perubahan, karena telah ditetapkan pula oleh peraturan adat di Desa Pancasari.

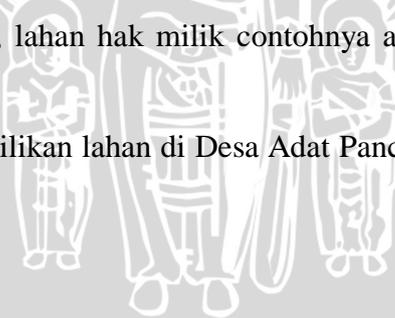
Perbandingan batasan kepemilikan lahan diatas, didukung oleh hasil wawancara kepada para ahli yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

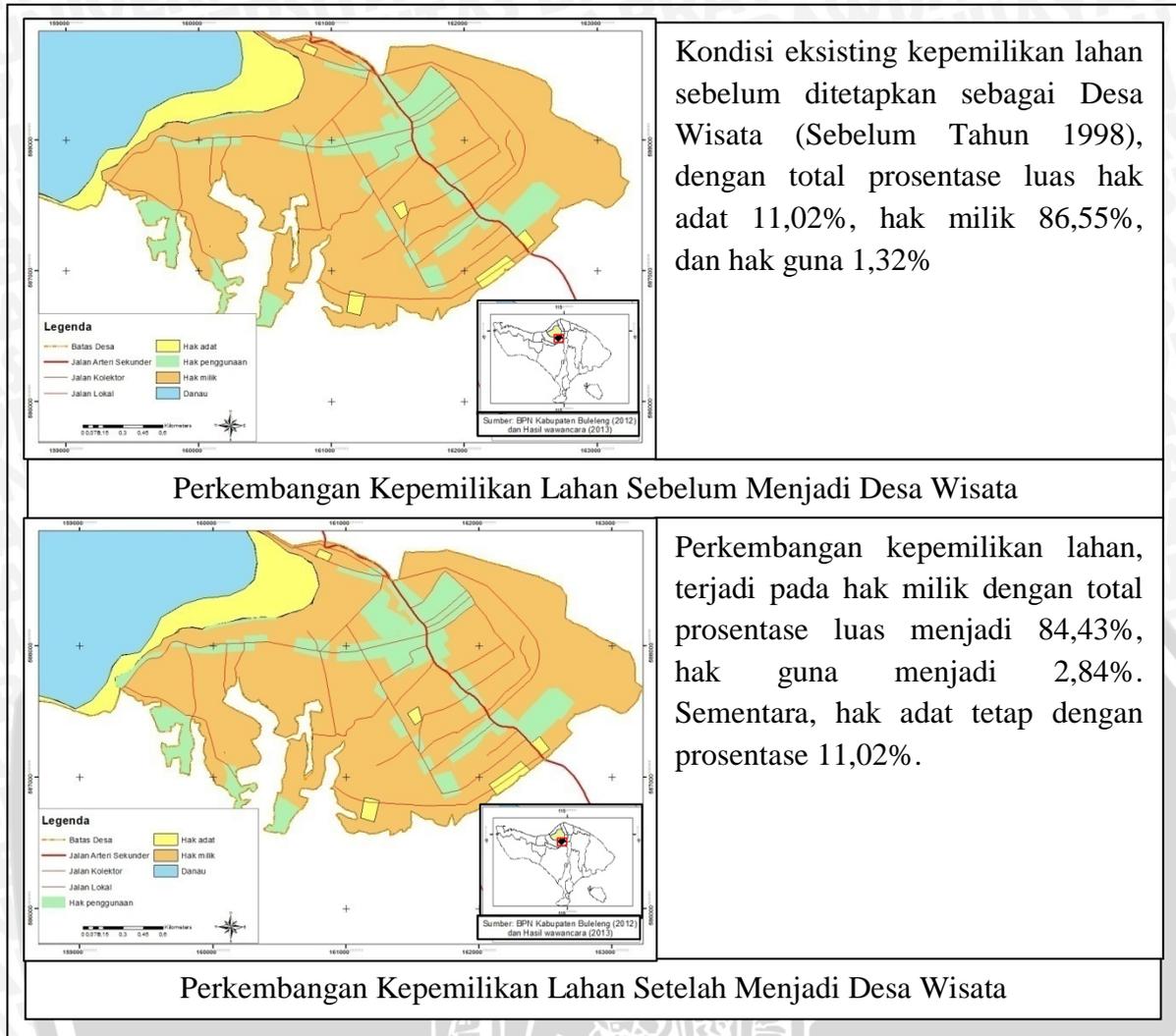
1. I Gede Bagia: Di Desa Adat Pancasari terdapat pembagian kepemilikan hak atas tanah yang telah diatur dalam suatu peraturan adat.
2. Nyoman Wartama : Berdasarkan peraturan adat yang terdapat di Desa pancasari, pembagian hak kepemilikan tanah dibagi menjadi tiga, meliputi kepemilikan hak atas tanah milik (*tanah ayahan*), hak penggunaan tanah (*tanah druwe desa*), dan hak kepemilikan adat (*tanah pelabe Pura dan tanah pekarangan desa*).

3. K. Lios Wirawantha: Penggunaan tanah untuk pengembangan akomodasi wisata disesuaikan dengan kepemilikan tanah terutama tanah milik desa adat.
4. Nengah Sudartayasa: Walaupun terbagi menjadi beberapa status kepemilikan, namun tanah yang terdapat di Desa Pancasari hanya dapat disewakan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan pariwisata, dan tidak dapat dijual ke orang lain.
5. Sukerawan: Peraturan adat (*awig-awig*) telah mengatur batas-batas kepemilikan lahan di Desa Pancasari. Jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan hak atas lahan, pengembang di lahan tersebut akan dikenakan retribusi khusus yang harus dibayarkan kepada adat sebagai ganti rugi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan hak kepemilikannya.

Kondisi eksisting diatas didukung oleh teori dari Artawilaga (1960), yang menjelaskan bahwa kepemilikan lahan di suatu desa adat dapat dilihat dari pembagian kepemilikan lahan, yaitu lahan hak adat (tanah *Pelaba Pura* dan tanah *pekarangan desa*), lahan hak sewa/guna (tanah *druwe desa*), dan lahan hak milik (tanah *ayahan*). Untuk di Desa Adat Pancasari, lahan hak adat contohnya adalah tempat berdirinya Pura Ulundanu yang terletak di sebelah utara desa di kawasan Danau Buyan. Kemudian, lahan hak sewa/guna contohnya yaitu lahan yang digunakan untuk mengembangkan akomodasi wisata. Sedangkan, lahan hak milik contohnya adalah pertanian penduduk adat setempat.

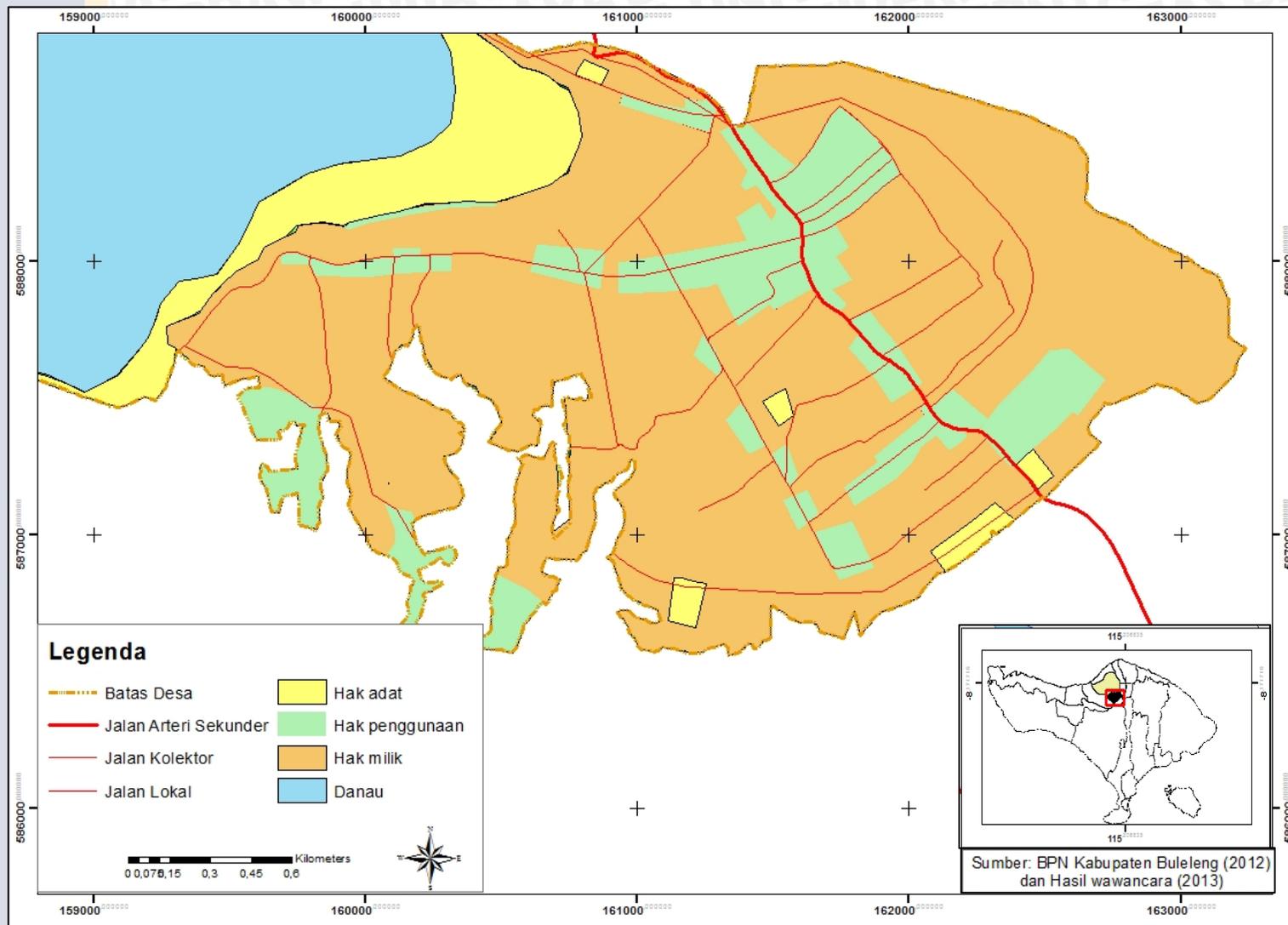
Perkembangan kepemilikan lahan di Desa Adat Pancasari dapat dilihat melalui perbandingan gambar berikut:



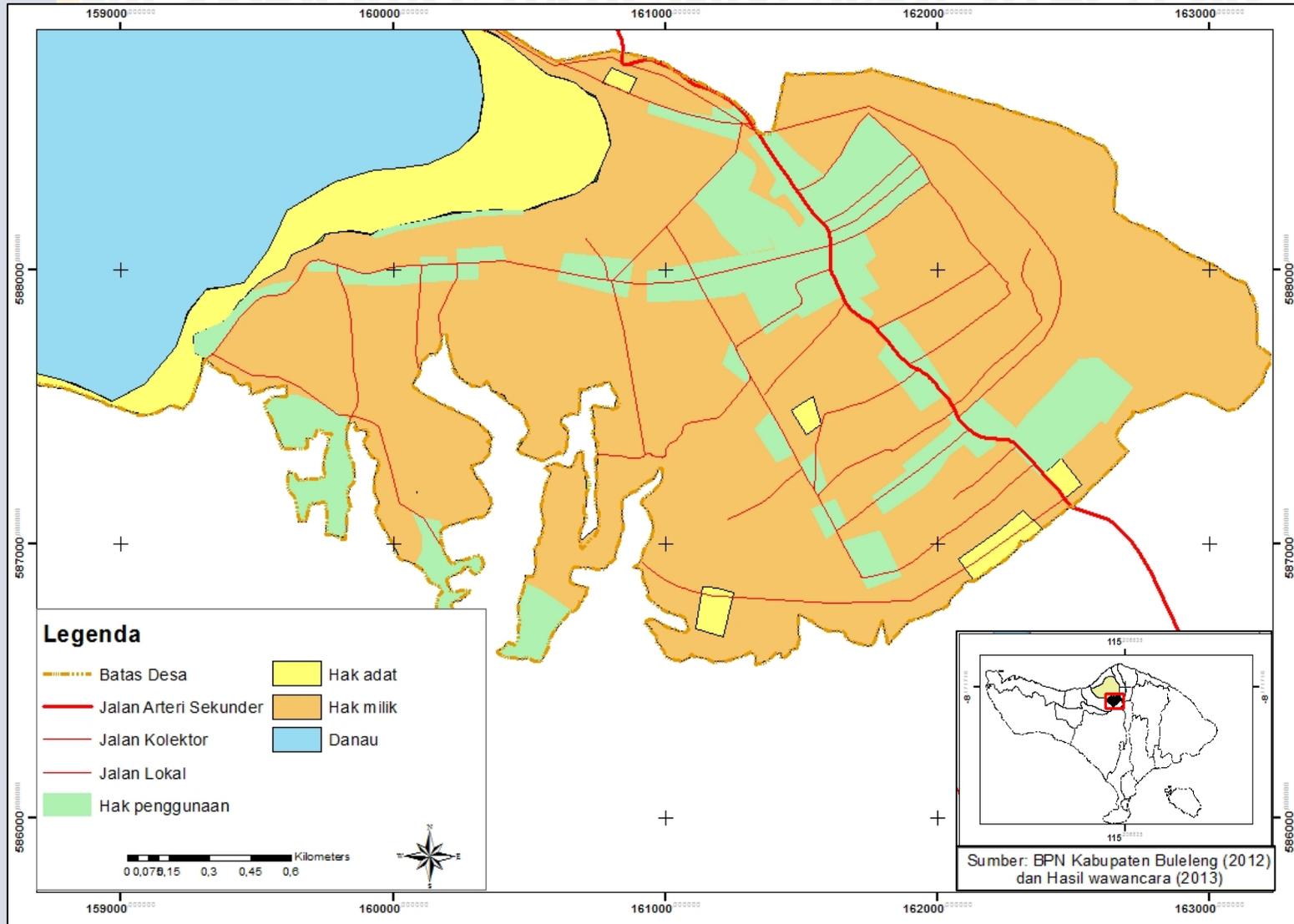


Gambar 4. 5 Perkembangan Kepemilikan Lahan

Secara spasial, peta kepemilikan hak atas tanah di Desa Adat Pancasari digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. 6 Peta Kepemilikan Lahan Sebelum Menjadi Desa Wisata



Gambar 4. 7 Peta Kepemilikan Lahan Setelah Menjadi Desa Wisata

4.2.3 Kearifan lokal

Kearifan lokal yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi kelembagaan dan ketentuan kawasan suci dalam konteks spasial. Perkembangan lembaga adat di Desa Adat Pancasari dapat dilihat pada periode sebelum dan setelah ditetapkan sebagai desa wisata yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Perkembangan lembaga adat di Desa Adat Pancasari

Lembaga adat sebelum	Lembaga adat setelah
- Desa Pakraman	- Desa Pakraman
- Lembaga Banjar	- Lembaga Banjar
- Kelompok Subak	- Kelompok Subak
- Sekaha Truna Truni	- Sekaha Truna Truni
- Sekaha Santhi	- Sekaha Santhi
	- Kader Desa
	- Kelompok Seni
	- Desa Wisma

Sumber: Hasil survei, 2013

Selain perkembangan kelembagaan adat diatas, terdapat juga batas kawasan/ketentuan kawasan yang menjadi bagian dari kearifan lokal di Desa Adat Pancasari. Batas kawasan ini merupakan ketetapan yang telah ditentukan oleh adat sejak periode sebelum Desa Pancasari menjadi desa wisata. Hingga kini, ketetapan tersebut tetap ada tanpa mengalami perubahan apapun karena telah menjadi kesepakatan sejak dulu.

Batas-batas/ketentuan tersebut, meliputi batas kawasan suci, meliputi kawasan suci Pura dan kawasan suci Danau Buyan. Batas ini merupakan penerapan dari konsep tradisional pemanfaatan ruang Bali yang dapat dijelaskan melalui suatu konsep *Tri Hita Karana*. Konsep ini berlandaskan atas ajaran-ajaran agama Hindu di Bali.

Selanjutnya, tatanan pola pemanfaatan ruang di Desa Pancasari didasarkan pada konsep *Tri Hita Karana* dan turunannya yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Parahyangan

Dalam lingkup Desa Adat Pancasari, dapat dianalisis pengaturan aspek *Parahyangan* ini dilakukan pada peletakan Pura Ulun Danu Buyan yang juga disebut sebagai Pura Desa di Desa Pancasari, Pura Dalem serta peletakkan setra atau kuburan Desa. Terlihat bahwa Pura Ulun Danu Buyan sebagai Pura Desa Pancasari terletak di bagian utara (*Utama Angga*) yang merupakan nilai teratas atau sakral. Sedangkan, Pura Dalem terletak di sebelah selatan (*Nista Angga*).

2. Pawongan

Pada kawasan ini, aktivitas *pawongan* terjadi di bagian tengah Desa Pancasari (*Madya Angga*). Adapun jenis kegiatan yang termasuk dalam *Pawongan* adalah jenis kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat, seperti permukiman dan kegiatan pariwisata.

3. Palemahan

Aspek *palemahan* di Desa Adat Pancasari ditunjukkan oleh adanya kuburan/pemakaman desa dan Pura Dalem yang memiliki tingkat kesakralan lebih rendah dibandingkan dengan pura pusat yang ada di zona *Parahyangan*.

Turunan dari *Tri Hita Karana* diatas, dapat diturunkan lagi menjadi tiga bagian utama (*Tri Mandala*), yaitu *Utama Mandala*, *Madya Mandala*, *Nista Mandala*. Secara lebih rinci dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 4. 4 Contoh Penerapan Tri Mandala di Desa Pancasari

Zona	Kriteria berdasarkan PTRTB	Contoh penerapan
Utama	Zona hulu (utara/timur) sebagai kawasan yang harus dilindungi dari kegiatan produksi, karena disamping sebagai kriteria teknis yang merupakan kawasan sumber air dan hutan, juga jika ditinjau dari konsep nilai yang berlaku maka daerah hulu adalah daerah orientasi yang utama dari kehidupan masyarakat. Adapun kriteria pemanfaatan lahannya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pura penataran dan Pura Puseh 2. Merajan/Pura keluarga 3. Wantilan/Balai rapat untuk kegiatan Pura 4. Piyasan/tempat untuk meletakkan sesaji 	1. Letak Pura Ulun Danu Buyan di sebelah utara Desa.
Madya	Merupakan zona/tempat yang nilai kesakralannya lebih rendah dari zona Utama. Zona ini sebagai tempat pergerakan/sirkulasi masyarakat, dan merupakan zona untuk melakukan interaksi di	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor kepala desa 2. Permukiman penduduk 3. Kegiatan wisata

masyarakat termasuk didalamnya, yaitu permukiman masyarakat. Refelksi dari mikro ke makro, yaitu perut manusia yang secara teknis sebagai tempat:

1. Ruang Terbuka Hijau/taman/kebun raya
2. Warung, pasar, toko, dan artshop
3. Lapangan olahraga
4. Utilitas
5. Apotek
6. Tempat parkir

Nista	Sebagai zona yang digunakan sebagai lokasi yang umumnya berupa Pura Dalem Kahyangan dan Pura Mrajapati sekaligus ruang terbuka. Zona ini merupakan zona pembuangan akhir, seperti:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kuburan 2. Pura Dalem Desa Pancasari
-------	--	--

Sumber: Survei primer, 2013

Berdasarkan hasil wawancara dapat dijelaskan terkait kearifan lokal dan perkembangannya yang terdapat di Desa Adat Pancasari, yaitu sebagai berikut:

1. I Gede Bagia: Kearifan lokal memiliki suatu tata nilai yang mengatur keberlangsungan hidup masyarakatnya, termasuk proses perpindahan penduduk. Di Desa Adat Pancasari, migrasi penduduk yang masuk ke Desa mempengaruhi adanya penambahan permukiman. Kearifan lokal mengendalikan perkembangan permukiman di Desa Adat Pancasari dengan memperhatikan status kepemilikan lahan. Di Desa Adat Pancasari, lahan permukiman hanya dapat dikembangkan pada jenis tanah adat, yaitu tanah *druwe desa*.
2. Nyoman Wartama : Desa Pancasari memiliki ketentuan pengembangan permukiman dalam kearifan lokal yang telah ditetapkan. Ketentuan untuk mengembangkan permukiman otomatis digunakan sebagai alat untuk mengendalikan laju perpindahan penduduk.
3. K. Lios Wirawantha: Perpindahan penduduk yang masuk ke Desa Pancasari memiliki tujuan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor pariwisata. Maka dari itu, karyawan swasta yang khususnya bekerja di sektor pariwisata didominasi oleh penduduk pendatang.
4. Nengah Sudartayasa: Kearifan lokal memiliki kaitan erat dengan keberadaan penduduknya, baik penduduk asli maupun pendatang. Setiap penduduk yang datang dipastikan memiliki tujuan yang jelas, dan memiliki

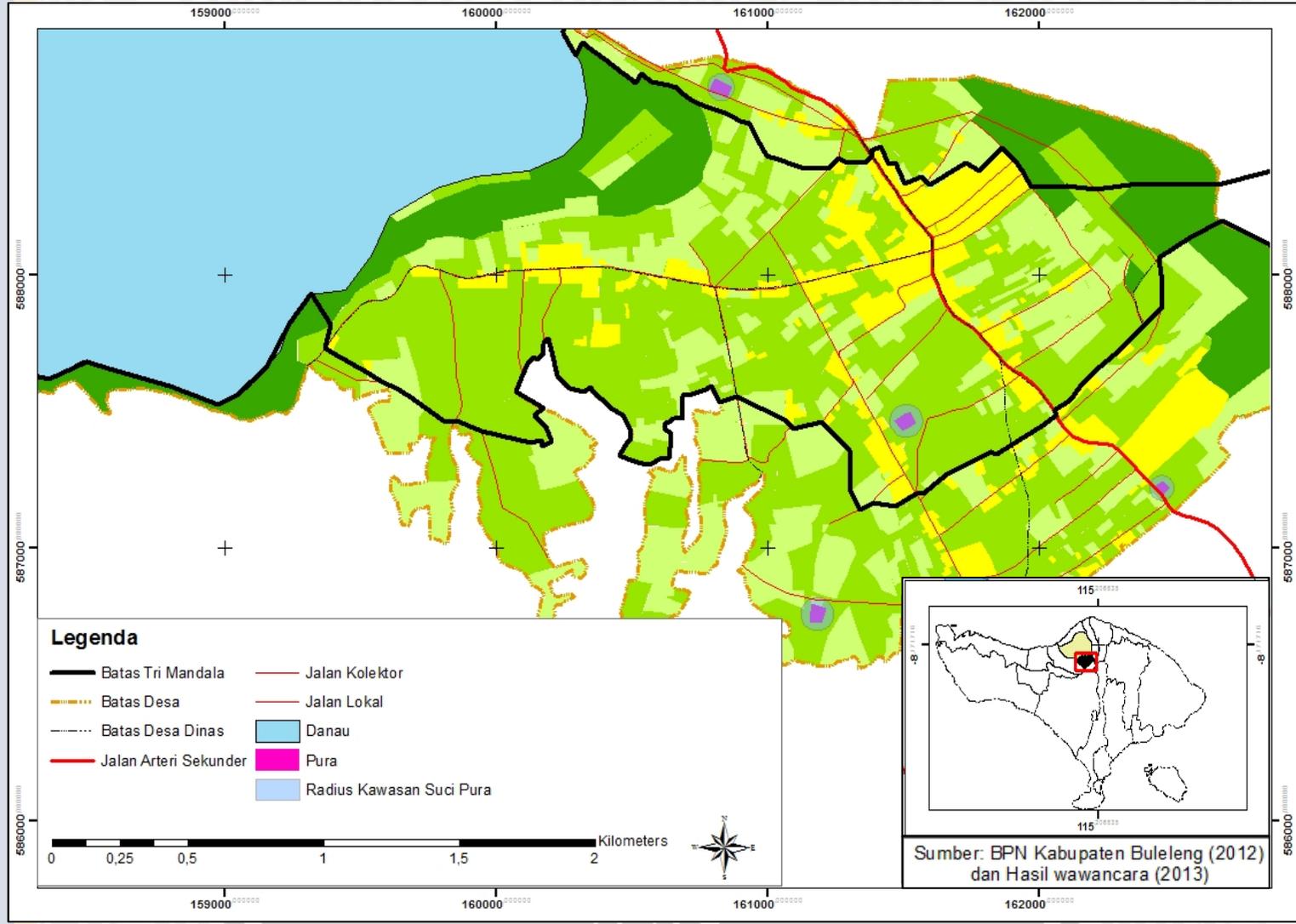
hak, serta kewajiban yang diatur kemudian dalam adat. Penduduk yang datang, tidak dapat menjadi anggota desa adat, namun wajib mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

5. Sukerawan: Ketentuan yang diatur dalam kearifan lokal tentang adanya migrasi penduduk adalah terkait keanggotaan penduduk tersebut di Desa Adat Pancasari. Untuk penduduk yang masuk Desa Pancasari dan sejak awal memang bukan merupakan anggota Desa Pancasari, maka penduduk tersebut tidak dapat menjadi anggota Desa Adat Pancasari, yaitu mengikuti kegiatan adat, upacara adat desa, dll. Sedangkan, untuk penduduk yang keluar Desa dan merupakan penduduk asli, penduduk tersebut tidak akan lepas dari hak dan kewajibannya sebagai anggota Desa Adat Pancasari.

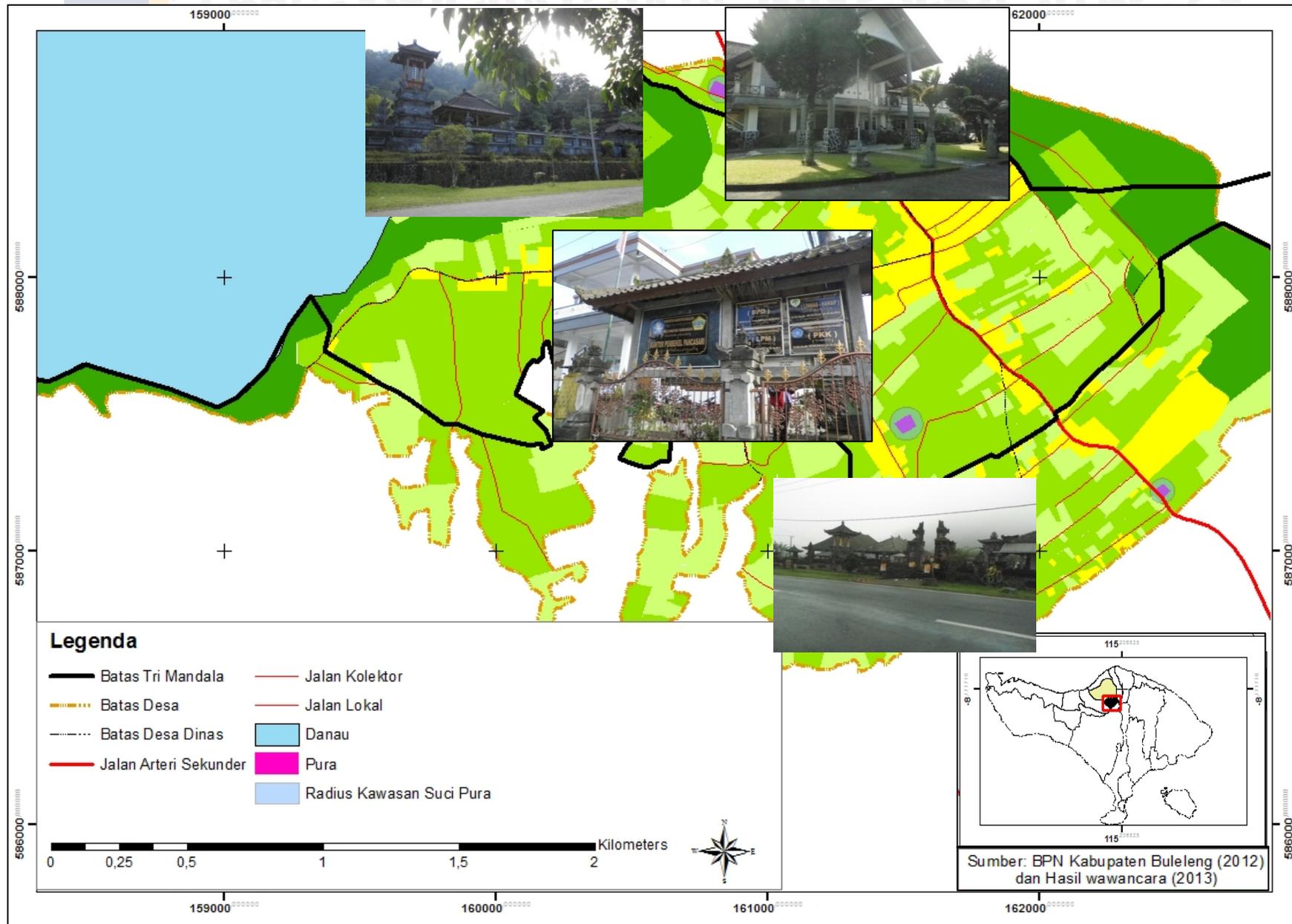
Kondisi eksisting diatas dapat didukung oleh teori dari Ptana (2005), yang menyatakan bahwa suatu kearifan lokal di suatu desa adat dapat terbagi menjadi tata kelola, sistem nilai, tata cara atau prosedur, dan ketentuan khusus (kawasan sensitif, suci, bangunan). Untuk di Desa Adat Pancasari sendiri, kelembagaan adat mengacu pada kearifan lokal bagian tata cara atau prosedur, sedangkan untuk pembagian kawasan di Desa Adat Pancasari mengacu pada kearifan lokal bagian ketentuan khusus (kawasan sensitif, suci, bangunan).

Secara spasial, konsep Tri Mandala tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:





Gambar 4. 8 Peta Identifikasi Zona Tri Mandala



Gambar 4.9 Photo Mapping Zona Tri Mandala

Melalui konsep *Tri Hita Karana*, maka didapatkan ketentuan untuk batas suci kawasan, yaitu:

1. Radius Kesucian Pura

Radius kesucian pura disini dimaksudkan sebagai Kawasan, yaitu terdapat jarak tertentu dalam suatu kawasan yang tidak diijinkan/diperbolehkan untuk melakukan pembangunan atau aktivitas wisata. Hal ini bertujuan untuk menjaga nilai-nilai sakral keberadaan Pura. Desa Pancasari memiliki 4 Pura yang *disungsung* desa adat, yaitu Pura Ulun Danu Batur, Pura Subak Lila Cita, Pura Peseimpangan Dalem Ped, dan Pura Dalem. Dalam Bhisama Kesucian Pura PHDI, Pura yang *disungsung* oleh desa adat diterapkan ukuran *Apenimpug* atau *Apenyenger*, yaitu 5-25 m dari bagian utama Pura. Berikut ini pura yang terdapat di desa Pancasari.



Gambar 4. 10 Radius kesucian Pura Ulun Danu Buyan

Sumber: Survei primer, 2013

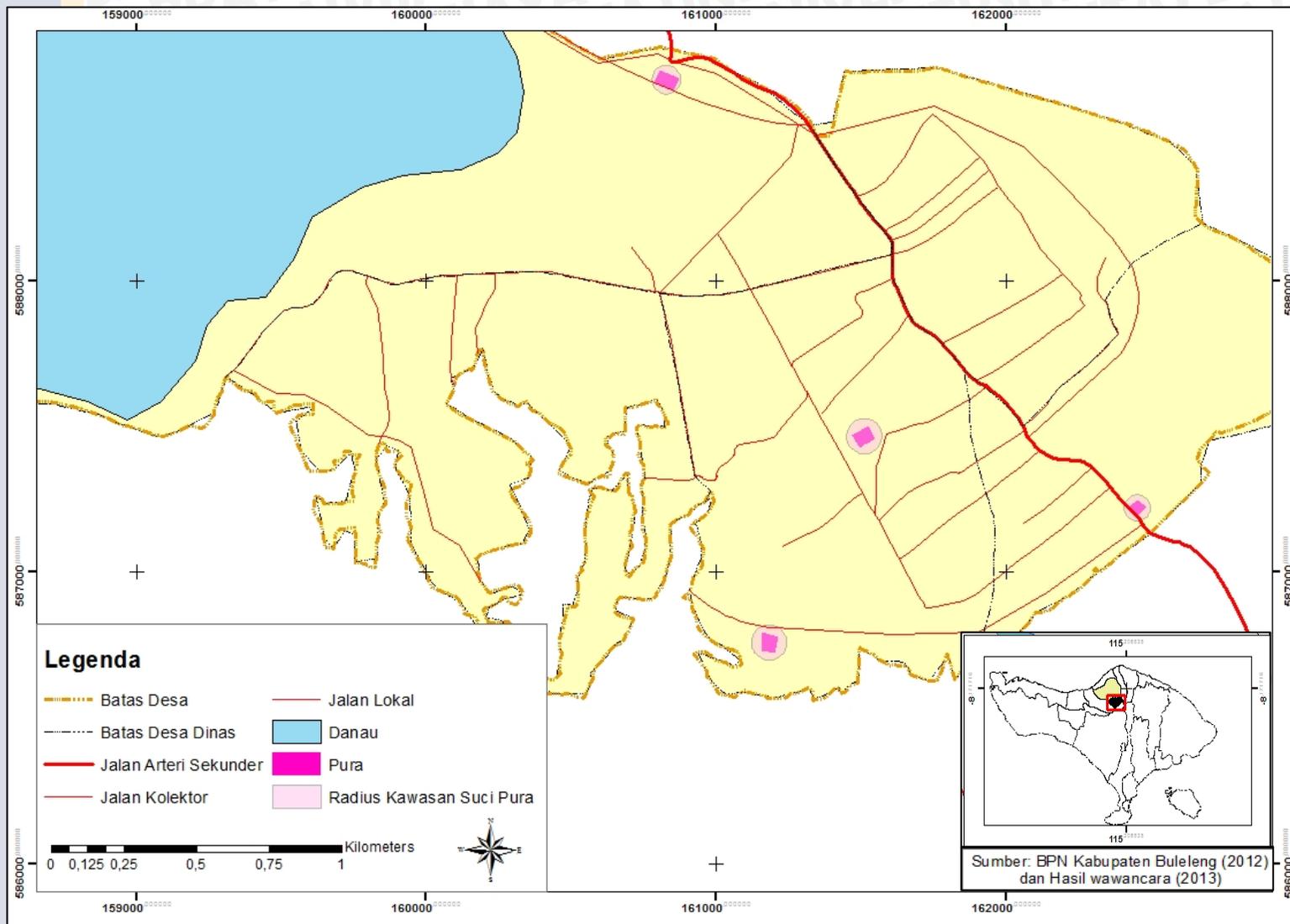
Berdasarkan gambar diatas, untuk radius kesucian Pura Ulun Danu Buyan telah ditetapkan oleh desa adat, yaitu sejauh 6 meter dari pagar luar Pura. Itu artinya bahwa, sepanjang radius ini tidak diijinkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata atau kegiatan lain yang bukan merupakan kegiatan adat.



Gambar 4. 11 Radius Kesucian Pura Dalem Desa Pancasari
Sumber: Survei primer, 2013

Sementara itu, untuk Pura Dalem memiliki radius kesucian Pura sejauh 8 m diukur dari pagar terluar Pura.





Gambar 4. 12 Peta Spasial Kawasan Suci Desa Pancasari

2. Radius Kesucian Danau

Radius kesucian danau telah ditetapkan pula oleh peraturan desa adat setempat yang telah tertuang dalam peraturan atau *awig-awig* yang tidak tertulis namun telah berjalan dan ditaati oleh masyarakatnya. Radius kesucian danau ditetapkan, yaitu minimal 8 meter dari tepi danau. Sepanjang jarak ini tidak diijinkan/diperbolehkan melakukan kegiatan wisata.



Gambar 4. 13 Radius Kesucian Danau Buyan

Sumber: Survei Primer, 2013



4.2.4 Migrasi penduduk

Migrasi penduduk yang terjadi di desa Pancasari dapat ditinjau dari jumlah migran yang terjadi, baik yang masuk dan yang keluar.

Migrasi penduduk sudah pernah terjadi secara besar-besaran pada periode sebelum menjadi desa wisata, yaitu pada tahun 1992. Hal ini terjadi karena adanya bencana longsor di Desa Pancasari. Perpindahan penduduk yang terjadi sekitar 60% penduduk Desa Pancasari. Namun kemudian, pada tahun 1994 penduduk berangsur-angsur dikembalikan ke desa setelah adanya perbaikan bencana longsor.

Perpindahan penduduk pada periode setelah ditetapkan menjadi desa wisata, perkembangannya dapat dilihat pada periode tahun 2000-2011, yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Migrasi Penduduk Masuk Desa Pancasari

No.	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Tingkat kenaikan migrasi penduduk
1.	2000	15	-
2.	2001	10	-0,33
3.	2002	14	0,4
4.	2003	16	0,14
5.	2004	10	-0,37
6.	2005	8	-0,2
7.	2006	10	0,25
8.	2007	11	0,1
9.	2008	13	0,18
10.	2009	16	0,23
11.	2010	15	-0,06
12.	2011	18	0,2
Jumlah tingkat kenaikan			0,54

Sumber: Profil Pembangunan Desa Pancasari, 2011

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jumlah kenaikan rata-rata migrasi penduduk masuk ke Desa Pancasari, yaitu sebesar 0,049 atau sebesar 4,9%. Migrasi penduduk yang masuk ke Desa Pancasari berfokus pada ketertarikan penduduk dari luar desa untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baru di Desa Pancasari, khususnya di bidang pariwisata.

Dibawah ini merupakan tabel migrasi penduduk keluar Desa Pancasari, sebagai berikut:

Tabel 4. 6 Migrasi Penduduk Keluar Desa Pancasari

No.	Tahun	Jumlah (Jiwa)	Tingkat kenaikan migrasi penduduk
1.	2000	11	-
2.	2001	10	-0,01
3.	2002	8	-0,2
4.	2003	11	0,375
5.	2004	9	-0,18
6.	2005	10	0,11
7.	2006	12	0,2
8.	2007	10	-0,16
9.	2008	15	0,5
10.	2009	19	0,26
11.	2010	16	-0,15
12.	2011	12	-0,25
Total tingkat kenaikan			0,495

Sumber: Profil Pembangunan Desa Pancasari, 2011

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui besarnya rata-rata kenaikan migrasi penduduk keluar Desa Pancasari, yaitu sebesar 0,045 atau sebesar 4,5%.

Hasil wawancara terkait pengendalian kearifan lokal Desa Adat Pancasari terhadap migrasi penduduk, dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. I Gede Bagia: Kearifan lokal memiliki suatu tata nilai yang mengatur keberlangsungan hidup masyarakatnya, termasuk proses perpindahan penduduk. Di Desa Adat Pancasari, migrasi penduduk yang masuk ke Desa mempengaruhi adanya penambahan permukiman. Kearifan lokal mengendalikan perkembangan permukiman di Desa Adat Pancasari dengan memperhatikan status kepemilikan lahan. Di Desa Adat Pancasari, lahan permukiman hanya dapat dikembangkan pada jenis tanah adat, yaitu tanah *druwe desa*.
2. Nyoman Wartama : Desa Pancasari memiliki ketentuan pengembangan permukiman dalam kearifan lokal yang telah ditetapkan. Ketentuan untuk mengembangkan permukiman otomatis digunakan sebagai alat untuk mengendalikan laju perpindahan penduduk.
3. K. Lios Wirawantha: Perpindahan penduduk yang masuk ke Desa Pancasari memiliki tujuan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor

pariwisata. Maka dari itu, karyawan swasta yang khususnya bekerja di sektor pariwisata didominasi oleh penduduk pendatang.

4. Nengah Sudartayasa: Kearifan lokal memiliki kaitan erat dengan keberadaan penduduknya, baik penduduk asli maupun pendatang. Setiap penduduk yang datang dipastikan memiliki tujuan yang jelas, dan memiliki hak, serta kewajiban yang diatur kemudian dalam adat. Penduduk yang datang, tidak dapat menjadi anggota desa adat, namun wajib mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
5. Sukerawan: Ketentuan yang diatur dalam kearifan lokal tentang adanya migrasi penduduk adalah terkait keanggotaan penduduk tersebut di Desa Adat Pancasari. Untuk penduduk yang masuk Desa Pancasari dan sejak awal memang bukan merupakan anggota Desa Pancasari, maka penduduk tersebut tidak dapat menjadi anggota Desa Adat Pancasari, yaitu mengikuti kegiatan adat, upacara adat desa, dll. Sedangkan, untuk penduduk yang keluar Desa dan merupakan penduduk asli, penduduk tersebut tidak akan lepas dari hak dan kewajibannya sebagai anggota Desa Adat Pancasari.

Hasil kondisi eksisting dan wawancara diatas, sesuai dengan teori yang dipaparkan oleh Sumaryanto dan Pasaribu (1996), yang menjelaskan tentang migrasi penduduk yang terjadi di Desa Adat Pancasari merupakan migrasi dimensi sektoral, yaitu migrasi yang melahirkan konsep mobilitas penduduk berdasarkan jenis pekerjaan. Kedatangan penduduk yang masuk Desa Pancasari dikendalikan oleh aturan desa adat yang ada, yaitu terkait perijinan untuk bermukim, karena di Desa Pancasari memiliki batasan-batasan khusus yang tidak dapat dimasuki oleh penduduk luar desa, karena merupakan suatu kawasan suci desa adat (Pitana, 2005).

4.2.5 Mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk di desa Pancasari, meliputi mata pencaharian di sektor pertanian dan non pertanian. Penduduk desa adat Pancasari sebagian besar penggunaan lahannya merupakan pertanian/perkebunan. Hal ini menyebabkan, masih banyak penduduk setempat yang bekerja di sektor pertanian. Berikut ini merupakan data penduduk Desa Pancasari beserta mata pencahariannya berdasarkan angka tenaga kerja, yaitu:

Tabel 4. 7 Mata Pencaharian Penduduk Desa Pancasari

Jenis mata pencaharian	Jumlah (Jiwa)											
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Petani	1228	1228	1220	1225	1230	1150	1110	1018	1270	1150	1056	1035
Peternak	355	321	227	251	263	260	211	135	129	224	378	320
PNS	80	80	83	78	76	75	75	75	87	95	128	128
Dagang	360	371	365	369	375	368	368	367	362	312	257	261
Pengrajin Industri	25	25	28	30	26	27	25	23	23	45	82	85
Karyawan Swasta	105	120	175	201	218	220	224	231	286	301	325	330
Montir	3	3	4	4	5	6	4	4	4	5	6	6
ABRI/POLRI	3	3	3	4	2	3	4	5	5	6	7	7
Tukang Bangunan	50	51	57	57	56	52	50	51	55	67	69	69
Sopir	18	18	12	14	15	16		14	20	18	23	15
Pengepul	48	50	52	52	54	55	51	50	61	75	87	71

Sumber: Profil Pembangunan Desa pancasari, 2011

Keberlanjutan mata pencaharian di Desa Adat Pancasari dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

1. I Gede Bagia: Desa Adat Pancasari memiliki organisasi sosial yang dibentuk oleh pemuka adat dengan kearifan lokal yang mengatur terkait mata pencaharian penduduk di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Desa Pancasari. Organisasi tersebut disebut Subak.
2. Nyoman Wartama: mata pencaharian penduduk, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan berada dibawah naungan organisasi Subak. Organisasi ini melibatkan para pemuka adat, serta tokoh-tokoh masyarakat. Melalui forum yang pernah dilakukan, ditetapkan peraturan adat untuk pengelolaan hasil dari pertanian, perkebunan, dan peternakan.
3. K. Lios Wirawantha: Kegiatan pariwisata di Desa Adat pancasari memberikan peluang kerja untuk masyarakatnya. Jikalau ada masyarakat yang turut berkecimpung dalam kegiatan pariwisata, seperti mengembangkan suatu artshop, maka ada ketentuan khusus dari peraturan adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat tersebut, yaitu berupa pembayaran retribusi kepada adat.
4. Nengah Sudartayasa: Mata pencaharian penduduk di Desa Pancasari dikendalikan oleh keberadaan organisasi sosial, yaitu Subak. Hal ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang baik terutama untuk penduduk setempat dalam mengelola pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ada di Desa Adat Pancasari.
5. Sukerawan: Kearifan lokal dengan peraturan adat yang ditetapkan memberikan perhatian pada mata pencaharian penduduk di Desa Pancasari.

Mata pencaharian di Desa Adat Pancasari mengikuti beberapa aturan/prosedur yang telah ditetapkan oleh adat. Aturan/prosedur ini terkait kelembagaan adat yang mengatur tentang berrmatapencaharian penduduk dan hasil pengelolaan mata pencaharian, dan aturan/prosedur batasan-batasan lahan untuk mengembangkan kegiatan pertanian, perkebunan, hingga untuk kegiata wisata. Hal ini bersesuaian dengan teori yang disampaikan oleh Pitana (2005) dalam teori kearifan lokal mengenai tata cara/prosedur.

4.2.6 Ketenagakerjaan

Dalam ketenagakerjaan, penduduk Desa Pancasari dikategorikan kedalam kelompok umur tenaga kerja. Berikut disajikan perkembangan jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tenaga kerja seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4. 8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tenaga Kerja

No	Tahun	Kelompok Umum						
		16-19	20-25	26-31	32-37	38-43	44-49	50-56
1	2000	502	552	486	356	463	503	438
2	2001	532	578	417	341	431	514	441
3	2002	530	520	461	428	428	542	467
4	2003	531	536	457	485	561	538	481
5	2004	529	518	415	561	461	561	466
6	2005	522	556	412	523	487	541	452
7	2006	520	514	484	486	561	522	489
8	2007	525	554	425	432	461	535	451
9	2008	542	621	431	460	487	563	481
10	2009	534	563	487	505	551	579	480
11	2010	512	498	584	516	502	581	467
12	2011	429	632	613	576	402	511	567

Sumber: Profil Pembangunan Desa Pancasari, 2011

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. I Gede Bagia: Kearifan lokal di Desa Adat Pancasari memiliki tatanan khusus untuk mengatur pola pembagian kerja penduduknya. Sama halnya dalam pembagian mata pencaharian penduduknya.
2. Nyoman Wartama: Pola/aturan adat di Desa Pancasari yang mengatur terkait ketenagakerjaan merupakan salah satu hubungan interpersonal sosial yang terjadi akibat adanya perkembangan pariwisata.
3. K. Lios Wirawantha: Kegiatan wisata di Desa Adat Pancasari mempengaruhi ketenagakerjaan penduduk baik penduduk asli maupun pendatang. Penyerapan tenaga kerja untuk berbagai mata pencaharian di Desa Adat Pancasari diatur dalam suatu ketentuan adat. Misal, untuk sektor pertanian lebih diutamakan untuk memberdayakan sumber daya manusia yang merupakan penduduk asli penduduk.
4. Nengah Sudartayasa: Pola pembagian tenaga kerja di Desa Adat Pancasari terbagi atas tenaga kerja untuk adat dan tenaga kerja untuk kegiatan

pendukung desa adat. Salah satu kegiatan pendukung, yaitu kegiatan wisata.

5. Sukerawan: Penyerapan tenaga kerja untuk penduduk pendatang hanya dimungkinkan pada kegiatan pendukung desa, yaitu di sektor pariwisata. Sementara, untuk kegiatan adat seperti pertanian, tenaga kerja yang dipergunakan lebih mengutamakan penduduk setempat yang telah menjadi anggota desa adat.

Keberlanjutan ketenagakerjaan dalam perkembangan wisata Desa Adat Pancasari dapat dijelaskan dari pengaturan pembagian tenaga kerja yang merupakan penduduk asli dan pendatang. Hal ini sesuai dengan pembagian tenaga kerja berdasarkan tata cara/prosedur suatu kearifan lokal di suatu desa adat (Pitana, 2005).

4.2.7 Karakteristik wisatawan

Karakteristik wisatawan di desa Pancasari ditinjau dari jumlah wisatawan dan tujuan wisatawan berkunjung. Jumlah wisatawan dapat dilihat dari banyaknya wisatawan domestik ataupun mancanegara yang datang berkunjung ke desa Pancasari. Adapun jumlah wisatawan di desa Pancasari dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4. 9 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Tahun	Wisatawan nusantara	Laju kunjungan
2000	3128	-
2001	3352	0,071
2002	3618	0,079
2003	3891	0,075
2004	4128	0,009
2005	4168	0,036
2006	4321	0,046
2007	4523	0,048
2008	5561	0,229
2009	6074	0,092
2010	6716	0,105
2011	7485	0,114
Total		0,082

Sumber: Profil Pembangunan Desa Pancasari, 2011

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui rata-rata laju kunjungan wisatawan nusantara, yaitu sebesar 0,082 atau 8,2%.

Selain kunjungan wisatawan nusantara, terdapat juga kunjungan wisatawan mancanegara yang dibuatkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. 10Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Tahun	Wisatawan mancanegara	Tingkat kunjungan
2001	3345	
2002	3581	0,070
2003	3651	0,019
2004	3751	0,027
2005	3812	0,016
2006	3825	0,003
2007	3865	0,014
2008	4117	0,065
2009	4981	0,173
2010	5119	0,027
2011	6507	0,271
Total		0,062

Sumber: Profil Pembangunan Desa Pancasari, 2011

Berdasarkan pada tabel diatas, dapat diketahui rata-rata tingkat kunjungan wisatawan mancanegara, yaitu sebesar 0,062 atau 6,2%.

Kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Keberlanjutan karakteristik wisatawan dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

1. I Gede Bagia: Kearifan lokal di Desa Adat Pancasari memberikan keunikan tersendiri untuk Desa Adat Pancasari sebagai desa wisata, sehingga mempengaruhi kedatangan wisatawan yang memiliki karakter dan tujuan berkunjung sebagai penikmat budaya dan tradisi suatu kawasan wisata.
2. Nyoman Wartama: Kearifan lokal merupakan suatu budaya yang dapat dijadikan daya tarik wisata untuk para wisatawan, atau yang sering disebut sebagai pariwisata budaya. Dengan menjadi daya tarik wisata ini, dapat meningkatkan kunjungan wisatawan berkunjung ke Desa Pancasari. Wisatawan yang berkunjung pun memiliki tujuan yang berbeda-beda, tidak hanya untuk berwisata.
3. K. Lios Wirawantha: Wisatawan sangat menyukai keunikan adat/tradisi yang ada di suatu tempat wisata. Tujuan wisatawan sendiri tidak hanya untuk berkunjung, melainkan juga ada yang berperan sebagai penikmat seni.
4. Nengah Sudartayasa: Keaifann lokal di Desa Pancasari memiliki budaya yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisatawan domestik dan juga mancanegara.

5. Sukerawan: Keunikan yang ada dapat dilihat dari komunitas adatnya, perilaku masyarakatnya, dan adat-adat tertentu yang terdapat di Desa Pancasari.

Karakteristik wisatawan yang berkunjung ke Desa Adat Pancasari sesuai dengan hasil penelitian yang dipaparkan oleh Ida Bagus Mantra (1993) yang menjelaskan bahwa ketertarikan wisatawan yang datang ke Bali ternyata 65% karena alasan ingin menikmati kebudayaan, 32% tertarik dengan keindahan pemandangan alam flora dan fauna, sedangkan 5,73% tertarik pada hal-hal lainnya. Desa Pancasari sendiri memiliki ketertarikan akan adat dan budayanya.

4.2.8 Akomodasi wisata

Desa pancasari sebagai suatu desa wisata tentu memiliki akomodasi wisata guna mendukung kegiatan pariwisatanya. Akomodasi wisata yang terdapat di desa Pancasari dapat ditinjau melalui jenis akomodasi wisata dan jumlah akomodasi wisata. Berikut ini ditampilkan perkembangan jenis dan jumlah akomodasi wisata yang terdapat di desa Pancasari, sebagai berikut:

Tabel 4. 11 Jenis dan Jumlah Akomodasi Wisata Sebelum dan Setelah menjadi Desa Wisata

No.	Jenis	Jumlah	
		Sebelum (unit)	Setelah (unit)
1.	Hotel berbintang	1	1
2.	Hotel non bintang	1	3
3.	Restoran/Tempat makan	12	22
4.	Pondok wisata	-	6
Total		14	32

Sumber: Hasil wawancara, 2013

Perkembangan akomodasi wisata di Desa Adat Pancasari telah terlihat pada periode sebelum ditetapkan sebagai desa wisata, yaitu dengan adanya 1 unit hotel berbintang, 1 unit hotel non bintang, dan 12 restoran/tempat makan. Kemudian mengalami perkembangan pada periode setelah menjadi desa wisata, yaitu penambahan pada hotel non bintang sebanyak 2 unit, penambahan pada restoran/tempat makan sebanyak 10 unit, kemudian muncul akomodasi baru, yaitu pondok wisata sebanyak 6 unit.

Berikut ini merupakan contoh akomodasi wisata yang ada di desa Pancasari, yaitu:



(a)



(b)



(c)

Gambar 4. 14 Akomodasi Wisata. Vila (A), Cafe/Tempat Makan (B), Dan Hotel Bali Handara (C)

Sumber: Survei primer

Keberlanjutan akomodasi wisata yang terdapat di Desa Adat Pancasari dapat dijelaskan melalui hasil wawancara berikut:

1. I Gede Bagia: Pengembangan akomodasi wisata diatur dalam suatu kearifan lokal, seperti pemanfaatan lahan yang diijinkan untuk pengembangan akomodasi wisata, yaitu dengan tidak mengganggu batas-batas yang telah ditetapkan sebagai kawasan suci di Desa Adat Pancasari.
2. Nyoman Wartama: Adapaun akomodasi yang dikembangkan, meliputi penginapan dan tempat makan. Ditemukan beberapa investor atau orang luar desa yang memiliki jasa akomodasi di Desa Pancasari. Hal ini dapat mengancam keberadaan masyarakat lokal, sehingga ditetapkan pemungutan pajak untuk penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun oleh orang dari luar desa.
3. K. Lios Wirawantha: Adapun peraturan adat penetapan retribusi yang dikenakan oleh adanya pengembangan akomodasi dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu:

- Golongan A (omzet minimal Rp 1.000.000,-/hari) dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000,-/hari
 - Golongan B (omzet Rp 501.000,- sampai Rp 1.000.000,-/hari) dikenakan retribusi sebesar Rp 750,-/hari
 - Golongan C (omzet Rp 101.000,- sampai Rp 500.000,-/hari) dikenakan pajak sebesar Rp 500,-/hari
 - Golongan D (omzet Rp 100.000,- sampai Rp 51.000,-/hari) dikenakan retribusi sebesar Rp 300,-/hari
 - Golongan E (omzet Rp 10.000,- sampai Rp 50.000,-/hari) dikenakan retribusi sebesar Rp 100,-/hari
4. Nengah Sudartayasa: Kearifan lokal berkaitan erat terhadap pengendalian lahan akomodasi wisata.
 5. Sukerawan: Pengembangan akomodasi sesuai dengan kawasan suci yang ada, yaitu 8 meter untuk kawasan suci Danau Buyan yang dihitung dari tepi danau.

Perkembangan akomodasi wisata ini merupakan salah satu indikator yang dijadikan untuk mengukur perkembangan suatu kawasan wisata (Wulansari, 2011). Untuk akomodasi wisata di Desa Adat Pancasari, perkembangan guna lahan telah menyesuaikan pada kearifan lokal yang berlaku terkait ketentuan khusus (kawasan sensitif, suci, dan bangunan) yang menjadi bagian kearifan lokal berdasarkan teori dari Pitana (2005).

Secara lebih jelas, perkembangan untuk masing-masing elemen pariwisata berkelanjutan di Wisata Desa Adat Pancasari pada periode sebelum dan setelah ditetapkan sebagai desa wisata, dapat digambarkan melalui bagan kecenderungan sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Bagan Kecenderungan Elemen Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perkembangan Wisata Desa Adat Pancasari

Aspek/Elemen	Sebelum Tahun 1998	Sesudah Tahun 1998	Keterangan
Guna Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Luas Desa Pancasari : 1280 Ha, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Permukiman : 23,29 Ha (1,81%) - Perkebunan : 470,28 Ha (36,74%) - Tegalan : 338,78 Ha (26,46%) - Sawah : 427 Ha (33,35%) - Akomodasi wisata : 20,65 Ha (1,61%) 	<ul style="list-style-type: none"> Luas Desa Pancasari : 1280 Ha, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Permukiman : 31,062 Ha (2,42%) - Perkebunan : 462,51 Ha (36,13%) - Tegalan : 315,58 Ha (24,65%) - Sawah : 427 Ha (33,35%) - Akomodasi wisata : 43,85 Ha (3,42%) 	<p>Guna lahan di Desa Adat Pancasari mengalami perkembangan dan perubahan pada beberapa fungsi lahan. Penggunaan lahan untuk perkebunan merupakan fungsi lahan yang dominan hingga kini. Fungsi perkebunan juga digunakan untuk keperluan agrowisata. Agrowisata di Wisata Desa Adat Pancasari merupakan salah satu jenis kegiatan wisata yang berkelanjutan yang dapat berjalan beriringan dengan kegiatan adat di Desa Pancasari. Kemudian, penggunaan lahan untuk pertanian memiliki luasan yang tetap hingga sekarang, yaitu dengan luasan 427 Ha. Hal ini karena guna lahan untuk pertanian pengelolaannya dilindungi oleh ketentuan adat, begitu juga pengelolaan lahan perkebunan yang difungsikan sebagai agrowisata.</p>
Status Kepemilikan Lahan	<ul style="list-style-type: none"> Status kepemilikan lahan di Desa Adat Pancasari terbagi menjadi 3 hak, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Hak Adat : 11,02% - Hak Milik : 86,55% - Hak Guna/Sewa : 1,32% 	<ul style="list-style-type: none"> Status kepemilikan lahan di Desa Adat Pancasari terbagi menjadi 3 hak, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> - Hak Adat : 11,02% - Hak Milik : 84,43% - Hak Guna/Sewa : 2,84% 	<p>Kepemilikan lahan adat memiliki prosontase yang sama hingga kini, yaitu 11,2%. Hal ini sesuai dengan pembagian kepemilikan lahan yang telah disepakati oleh adat, dan lahan adat ini memiliki bagian, yaitu tanah <i>pekarangan desa</i> dan tanah <i>pelabe Pura</i> yang sepenuhnya milik Desa Adat Pancasari.</p>
Kearifan Lokal	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Adat yang ada: <ul style="list-style-type: none"> - Desa Pakraman - Lembaga Banjar - Kelompok Subak - Sekaha Truna Truni - Sekaha Santhi Konteks Spasial Kawasan Suci: <ul style="list-style-type: none"> - Pura Ulun Danu Buyan : 6m - Pura Dalem : 8m 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Adat menjadi: <ul style="list-style-type: none"> - Desa Pakraman - Lembaga Banjar - Kelompok Subak - Sekaha Truna Truni - Sekaha Santhi - Kader Desa - Kelompok Seni - Desa Wisma Konteks Spasial Kawasan Suci: 	<ul style="list-style-type: none"> Lembaga adat mengalami penambahan dengan total hingga 10 kelembagaan adat yang ada di Desa Adat Pancasar dan dikelola oleh penduduk setempat. Batas kawasan suci yang terdapat di Desa Adat Pancasari

Aspek/Elemen	Sebelum Tahun 1998	Sesudah Tahun 1998	Keterangan
	- Danau Buyan : 8m	- Pura Ulun Danu Buyan : 6m - Pura Dalem : 8m - Danau Buyan : 8m	memiliki ketentuan yang sama dari periode sebelum hingga sesudah menjadi desa wisata.
Migrasi Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> Sekitar 60% penduduk melakukan perpindahan keluar Desa Pancasari karena adanya bencana longsor yang menyebabkan warga harus di evakuasi ke tempat yang lebih aman. 	<ul style="list-style-type: none"> Rata-rata jumlah migrasi masuk, yaitu 4,9% Rata-rata jumlah migrasi keluar, yaitu 4,5%. 	<ul style="list-style-type: none"> Migrasi penduduk masuk lebih banyak dilakukan, karena adanya tarikan mata pencaharian di Desa Adat Pancasari terkait bidang pariwisata
Mata Pencaharian	<ul style="list-style-type: none"> Mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, yaitu mencapai 85% penduduk Desa Pancasari. 	<ul style="list-style-type: none"> Mata pencaharian penduduk dominan hingga kini masih sebagai petani 	<ul style="list-style-type: none"> Hingga kini mata pencaharian yang dominan di Desa Adat Pancasari adalah sebagai petani. Walaupun terdapat kegiatan wisata dan menyebabkan terjadinya substitusi mata pencaharian, terutama dari mata pencaharian sebagai petani menjadi karyawan swasta di bidang pariwisata, namun substitusi yang terjadi tidaklah signifikan.
Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> Distribusi tenaga kerja penduduk Desa Pancasari secara dominan berkecimpung pada pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Terjadi penyerapan tenaga kerja di bidang lain, khususnya di bidang pariwisata. 	<ul style="list-style-type: none"> Ketengakerjaan berkontribusi terhadap keberlanjutan kegiatan pada berbagai sektor di Desa Adat Pancasari, khususnya pertanian dan pariwisata.
Karakteristik Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> Wisatawan yang berkunjung ke Desa Adat Pancasari pada awalnya hanya bertujuan untuk berjualan dan melihat keunikan adat tradisional, serta potensi wisata yang dapat dikembangkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Wisatawan tidak hanya bertujuan untuk berjualan dan melihat keunikan adat tradisional, namun terdapat motivasi lain, yaitu untuk menikmati keindahan wisata alam di Desa Adat Pancasari. 	<ul style="list-style-type: none"> Kunjungan wisatawan dengan motivasi/tujuan berjualan tetap ada sepanjang tahun. Pada perkembangannya, jumlah kunjungan wisatawan terus mengalami peningkatan yang dapat mendukung keberlanjutan kegiatan pariwisata di Desa Adat Pancasari.
Akomodasi Wisata	<ul style="list-style-type: none"> Akomodasi wisata yang ada: - Hotel berbintang : 	<ul style="list-style-type: none"> Akomodasi wisata menjadi: - Hotel berbintang 	<ul style="list-style-type: none"> Akomodasi wisata yang menunjang kegiatan pariwisata di

Aspek/Elemen	Sebelum Tahun 1998	Sesudah Tahun 1998	Keterangan
	1 unit - Hotel non bintang : 1 unit - Restoran : 12 unit	tetap 1 unit - Hotel non bintang menjadi 3 unit - Restoran menjadi 22 unit - Berkembang pondok wisata hingga 6 unit	Desa Adat Pancasari mengalami penambahan jumlah dalam perkembangannya. Perkembangan akomodasi wisata ini tetap ada dengan memperhatikan ketentuan adat terkait penggunaan lahan, kepemilikan lahan, dan batas kawasan yang diperbolehkan untuk membangun akomodasi wisata.

Sumber: Hasil wawancara, 2013

4.3 Hasil Analisis

4.3.1 Perhitungan analisis DEMATEL (*Decision Making Evaluation And Trial Analysis*)

Hubungan antar elemen pariwisata berkelanjutan dapat diketahui dengan membuat suatu skema pengaruh antar elemen. Skema arah pengaruh ini didapatkan dari hasil analisis DEMATEL (*Decision Making Trial and Evaluation Laboratory*).

Prinsip perhitungan analisis DEMATEL didasarkan atas hasil kuisioner yang telah disebarkan kepada para ahli di Wisata Desa Adat Pancasari. Input untuk perhitungan analisis DEMATEL didapatkan dari nilai/angka yang telah dipilih pada kuisioner. Tujuan analisis DEMATEL adalah untuk menggambarkan arah hubungan antar elemen pariwisata berkelanjutan menjadi elemen yang lebih berpeluang untuk memberikan atau menerima pengaruh, dan untuk menemukan elemen kunci yang dominan memberikan pengaruh dalam keberlangsungan Wisata Desa Adat Pancasari.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, skema pemodelan pengaruh didapatkan melalui proses analisis DEMATEL yang dihitung dengan menggunakan software microsoft office Excel. Adapun variabel yang digunakan, yaitu guna lahan (A), status kepemilikan lahan (B), kearifan lokal (C), migrasi penduduk (D), mata pencaharian (E), tenaga kerja (F), karakteristik wisatawan (G), dan akomodasi wisata (H). Berikut ini penjelasan hasil analisis:

1. Hasil kuisioner yang telah disebar, dirangkum dalam matrik pengaruh antar elemen. Berikut ini rangkuman pengaruh antar elemen yang dijelaskan dari masing-masing elemen.

Tabel 4. 13 Matrik Pengaruh Elemen A terhadap Elemen Lain.

Element/ Responden	A							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	1,000	0,250	0,200	3,000	0,250	3,000	3,000	4,000
2	1,000	0,250	0,200	3,000	3,000	2,000	1,000	2,000
3	1,000	0,200	0,200	4,000	4,000	3,000	3,000	2,000
4	1,000	0,200	0,200	3,000	4,000	2,000	4,000	2,000
5	1,000	0,250	0,250	3,000	4,000	3,000	3,000	2,000

Sumber: Survei primer, 2013

Tabel 4. 14 Matrik Pengaruh Elemen B terhadap Elemen Lain

Element/ Responden	B							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	4,000	1,000	0,250	3,000	2,000	3,000	1,000	3,000
2	4,000	1,000	0,250	4,000	4,000	3,000	2,000	3,000
3	5,000	1,000	0,200	4,000	4,000	3,000	3,000	2,000
4	5,000	1,000	0,250	4,000	4,000	3,000	3,000	3,000
5	4,000	1,000	0,250	4,000	3,000	2,000	1,000	2,000

Sumber: Survei primer, 2013

Tabel 4. 15 Matrik Pengaruh Elemen C terhadap Elemen Lain

Element/ Responden	C							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	5,000	4,000	1,000	4,000	5,000	3,000	5,000	2,000
2	0,200	4,000	1,000	1,000	3,000	3,000	4,000	2,000
3	5,000	5,000	1,000	3,000	4,000	2,000	5,000	1,000
4	5,000	4,000	1,000	3,000	3,000	2,000	5,000	3,000
5	4,000	4,000	1,000	2,000	4,000	3,000	4,000	4,000

Sumber: Survei primer, 2013

Tabel 4. 16 Matrik Pengaruh Elemen D terhadap Elemen Lain

Element/ Responden	D							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	0,333	0,333	0,250	1,000	4,000	3,000	1,000	2,000
2	0,333	0,250	1,000	1,000	0,333	3,000	1,000	2,000
3	0,250	0,250	0,333	1,000	0,250	0,250	1,000	1,000
4	0,333	0,250	0,333	1,000	0,333	0,333	1,000	1,000
5	0,333	0,250	0,500	1,000	0,333	0,500	1,000	0,333

Sumber: Survei primer, 2013

Tabel 4. 17 Matrik Pengaruh Elemen E terhadap Elemen Lain

Element/ Responden	E							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	4,000	2,000	0,200	4,000	1,000	3,000	3,000	1,000
2	0,333	0,250	0,333	3,000	1,000	4,000	3,000	0,333
3	0,250	0,250	0,250	4,000	1,000	4,000	3,000	3,000
4	0,250	0,250	0,333	3,000	1,000	3,000	3,000	2,000
5	0,250	0,333	0,250	3,000	1,000	4,000	3,000	3,000

Sumber: Survei primer, 2013

Tabel 4. 18 Matrik Pengaruh Elemen F terhadap Elemen Lain

Element/ Responden	F							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	0,333	0,333	0,333	3,000	0,333	1,000	0,333	2,000
2	0,500	0,333	0,333	0,333	0,250	1,000	1,000	0,250
3	0,333	0,333	0,250	4,000	4,000	1,000	3,000	0,333
4	0,500	0,333	0,500	3,000	0,333	1,000	0,250	0,333
5	0,333	0,500	0,333	3,000	0,333	1,000	1,000	0,333

Sumber: Survei primer, 2013

Tabel 4. 19 Matrik Pengaruh Elemen G terhadap Elemen Lain

Element/ Responden	G							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	0,333	1,000	0,200	1,000	0,333	2,000	1,000	2,000
2	1,000	0,500	0,250	1,000	0,333	1,000	1,000	0,333
3	0,333	0,333	0,200	1,000	0,333	1,000	1,000	2,000
4	0,250	0,333	0,200	1,000	0,333	0,500	1,000	2,000
5	0,333	1,000	0,250	1,000	0,333	1,000	1,000	4,000

Sumber: Survei primer, 2013

Tabel 4. 20 Matrik Pengaruh Elemen H terhadap Elemen Lain

Element/ Responden	H							
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	0,250	0,333	0,500	0,500	1,000	3,000	0,500	1,000
2	0,500	0,333	0,500	0,500	3,000	4,000	3,000	1,000
3	0,500	0,500	1,000	1,000	3,000	3,000	0,500	1,000
4	0,333	0,500	0,333	0,333	0,500	3,000	0,500	1,000
5	0,500	0,500	0,250	0,333	3,000	3,000	0,250	1,000

Sumber: Survei primer, 2013

Keterangan:

- A = Penggunaan lahan
- B = Status kepemilikan lahan
- C = Kearifan lokal
- D = Migrasi penduduk
- E = Mata pencaharian
- F = Tenaga kerja
- G = Karakteristik wisatawan
- H = Akomodasi

2. Selanjutnya, dari matrik pengaruh antar elemen diatas dihitung nilai rata-rata geometri untuk tiap-tiap elemen. Secara matematis dirumuskan rumus sebagai berikut:

$$U = \sqrt[n]{x_1, x_2, x_3 \dots \dots x_n} \quad (4-1)$$

Nilai rata-rata geometri dituangkan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

Tabel 4. 21 Matrik Rata-Rata Geometri

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	1,000	0,230	0,210	3,180	2,170	2,550	2,550	2,290
B	4,370	1,000	0,240	3,780	3,290	2,770	1,780	2,550
C	2,510	4,180	1,000	2,350	3,370	2,550	4,570	2,170
D	0,310	0,260	0,430	1,000	0,520	0,820	1,000	1,060
E	0,460	0,400	0,270	3,370	1,000	3,570	3,000	1,430
F	0,390	0,360	0,340	2,050	0,520	1,000	0,760	0,450
G	0,390	0,560	0,220	1,000	0,330	1,000	1,000	1,610
H	0,400	0,430	0,460	0,490	1,680	3,180	0,620	1,000

Sumber: Hasil analisis, 2013

3. Nilai matrik rata-rata geometri diatas digunakan untuk menghitung nilai determinan a_{ij} . Hasil perhitungan determinan masing-masing elemen dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 4. 22 Rangkuman Nilai Matrik Determinan

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	42,490	-6,820	54,630	11,750	-55,850	-21,850	0,860	15,490
B	30,160	9,870	3,040	3,260	-10,320	-3,860	0,210	2,670
C	3,050	15,890	3,320	-2,740	-6,700	-3,900	-6,940	-5,900
D	50,040	100,320	239,890	37,520	-20,120	20,470	61,030	7,770
E	-25,500	-15,080	9,460	-9,160	38,770	22,000	-32,240	-19,960
F	-39,820	-51,110	20,310	59,010	12,930	6,210	-62,010	7,840
G	19,920	64,200	86,090	12,840	37,550	12,760	45,560	64,420
H	-12,490	-7,870	13,280	7,030	15,290	-21,160	-23,160	-0,950

Sumber: Hasil Analisis, 2013

Setelah mendapatkan nilai determinan, kemudian dihitung matrik kofaktor yang dirangkum melalui matrik berikut:

Tabel 4. 23 Matrik Kofaktor

	A	B	C	D	E	F	G	H	MAX
A	42,490	6,820	54,630	-11,750	-55,850	21,850	0,860	-15,490	54,630
B	-30,160	9,870	-3,040	3,260	10,320	-3,860	-0,210	2,670	10,320
C	3,050	-15,890	3,320	2,740	-6,700	3,900	-6,940	5,900	5,900
D	-50,040	100,320	-239,890	37,520	20,120	20,470	-61,030	7,770	100,320
E	-25,500	15,080	9,460	9,160	38,770	-22,000	-32,240	19,960	38,770
F	39,820	-51,110	-20,310	59,010	-12,930	6,210	62,010	7,840	62,010
G	19,920	-64,200	86,090	-12,840	37,550	-12,760	45,560	-64,420	86,090
H	12,490	-7,870	-13,280	7,030	-15,290	-21,160	23,160	-0,950	23,160
MAX	42,490	100,320	86,090	59,010	38,770	21,850	62,010	19,960	100,320

Sumber; Hasil Analisis, 2013

Dari hasil matrik kofaktor diatas, dapat diketahui nilai maksimal dari masing-masing elemen secara keseluruhan. Nilai maksimal ini selanjutnya digunakan untuk menghitung nilai m dalam matrik S (*Direct Matrix*)

4. Perhitungan matrik S dirumuskan sebagai berikut:

$$S = m \cdot a \quad (4-2)$$

Dengan Harga m didapatkan dengan rumus:

$$m = \frac{1}{\text{Nilai maksimal matrik kofaktor}} \quad (4-3)$$

Dengan demikian, didapatkanlah nilai m sebesar 0,0099. Nilai m ini kemudian digunakan untuk menghitung matrik S, dan didapatkan hasil matriknya sebagai berikut:

Tabel 4. 24 Matrik S

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0,009	0,002	0,002	0,029	0,020	0,023	0,023	0,021
B	0,039	0,009	0,002	0,034	0,030	0,030	0,016	0,023
C	0,023	0,038	0,009	0,021	0,030	0,023	0,041	0,020
D	0,003	0,002	0,004	0,009	0,005	0,007	0,009	0,010
E	0,004	0,004	0,002	0,030	0,009	0,032	0,027	0,013
F	0,004	0,003	0,003	0,018	0,005	0,009	0,007	0,004
G	0,004	0,005	0,002	0,009	0,003	0,009	0,009	0,014
H	0,004	0,004	0,004	0,004	0,015	0,029	0,006	0,009

Sumber: Hasil Analisis, 2013

5. Setelah mendapatkan matrik S, kemudian dicari matrik T (*Indirect Matrix*) dengan menggunakan matrik identitas. Rumus matrik T, yaitu:

$$\text{Matrik } T = I - S \quad (4-4)$$

Berdasarkan rumus diatas, didapatkanlah matrik T sebagai berikut:

Tabel 4. 25 Matrik T dengan Menggunakan Matrik Identitas

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0,991	-0,002	-0,002	-0,029	-0,020	-0,023	-0,023	-0,021
B	-0,039	0,991	-0,002	-0,034	-0,030	-0,030	-0,016	-0,023
C	-0,023	-0,038	0,991	-0,021	-0,030	-0,023	-0,041	-0,020
D	-0,003	-0,002	-0,004	0,991	-0,005	-0,007	-0,009	-0,010
E	-0,004	-0,004	-0,002	-0,030	0,991	-0,032	-0,027	-0,013
F	-0,004	-0,003	-0,003	-0,018	-0,005	0,991	-0,007	-0,004
G	-0,004	-0,005	-0,002	-0,009	-0,003	-0,009	0,991	-0,014
H	-0,004	-0,004	-0,004	-0,004	-0,015	-0,029	-0,006	0,991

Sumber: Hasil Analisis, 2013

Matrik T ini kemudian di invers, dan mendapatkan hasil matrik sebagai berikut:

Tabel 4. 26 Matrik Invers

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0,010	0,003	0,002	0,031	0,021	0,025	0,025	0,022
B	0,041	0,010	0,003	0,038	0,032	0,033	0,019	0,025
C	0,025	0,039	0,010	0,026	0,033	0,027	0,045	0,023
D	0,003	0,003	0,004	0,010	0,005	0,008	0,010	0,010
E	0,005	0,004	0,003	0,032	0,010	0,034	0,028	0,014
F	0,004	0,004	0,003	0,019	0,005	0,010	0,008	0,005
G	0,004	0,005	0,002	0,010	0,004	0,010	0,010	0,015
H	0,004	0,004	0,004	0,006	0,016	0,030	0,007	0,010

Sumber: Hasil Analisis, 2013

6. Hasil dari matrik T invers merupakan matrik tidak langsung yang kemudian hasilnya digunakan untuk mencari matrik N (*Net Influence*), matrik N ini yang menjelaskan nilai hubungan antar elemen.

Tabel 4. 27 Matrik N (Net Influence)

	A	B	C	D	E	F	G	H
A	0,000	-0,038	-0,023	0,028	0,016	0,021	0,021	0,018
B	0,038	0,000	-0,036	0,035	0,028	0,030	0,014	0,021
C	0,023	0,036	0,000	0,022	0,030	0,024	0,042	0,018
D	-0,028	-0,035	-0,022	0,000	-0,027	-0,011	0,000	0,004
E	-0,016	-0,028	-0,030	0,027	0,000	0,029	0,025	-0,002
F	-0,021	-0,030	-0,024	0,011	-0,029	0,000	-0,003	-0,025
G	-0,021	-0,014	-0,042	0,000	-0,025	0,003	0,000	0,008
H	-0,018	-0,021	-0,018	-0,004	0,002	0,025	-0,008	0,000

7. Hasil matrik T juga dapat digunakan untuk menghitung vektor baris dan vektor kolom yang digunakan sebagai letak/titik koordinat x dan y dalam diagram cartesius. Untuk nilai koordinat x dapat dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 28 Nilai x Koordinat

r	ri	dj	ri+dj (x/Strength)
A	0,138	0,095	0,233
B	0,201	0,086	0,287
C	0,227	0,045	0,272
D	0,053	0,020	0,073
E	0,131	0,017	0,148
F	0,058	0,150	0,208
G	0,060	0,347	0,407
H	0,081	0,570	0,651

Sumber: Hasil Analisis, 2013

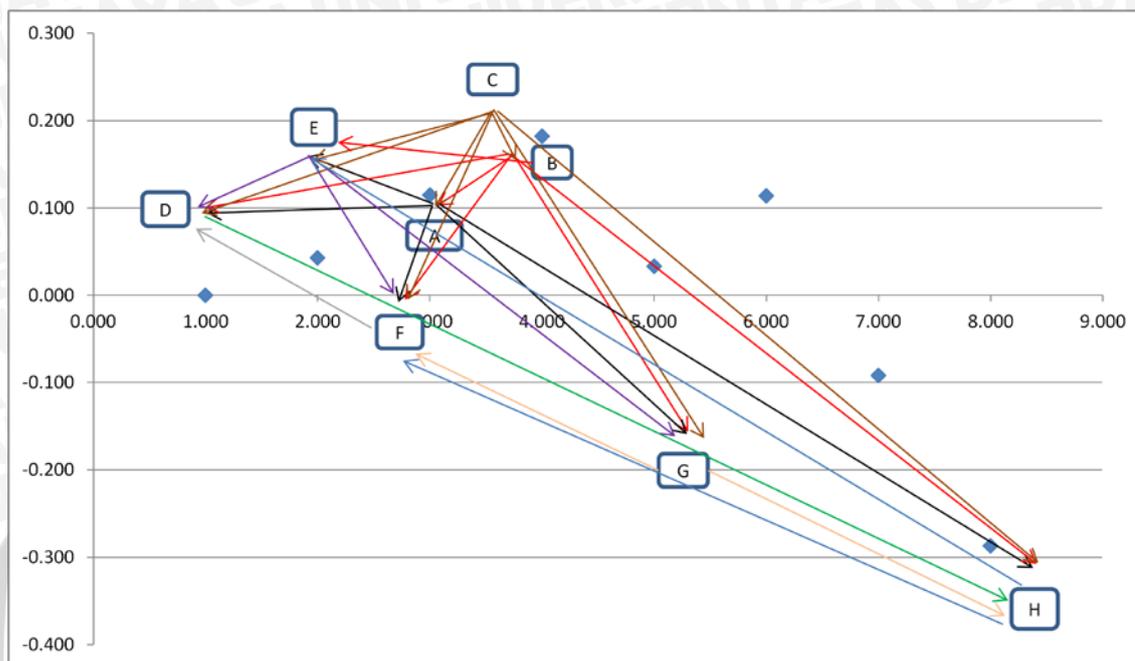
Kemudian, untuk nilai y koordinat dapat dirangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 29 Nilai y Koordinat

r	Ri	dj	ri-dj (y/Relation)
A	0,138	0,095	0,043
B	0,201	0,086	0,115
C	0,227	0,045	0,182
D	0,053	0,020	0,033
E	0,131	0,017	0,114
F	0,058	0,150	-0,092
G	0,060	0,347	-0,287
H	0,081	0,570	-0,489

Sumber: Hasil Analisis, 2013

8. Selanjutnya, hasil dari perhitungan koordinat x (*streight*) dan y (*relation*) dapat dituangkan kedalam diagram cartesius untuk menentukan letak/posisi dari tiap-tiap elemen terhadap elemen yang lainnya.



Gambar 4. 15 Diagram Cartesius

Sumber: Hasil Analisis, 2013

4.4 Interpretasi Hasil Analisis

4.4.1 Hubungan pengaruh

Sumbu y pada diagram cartesius diatas menggambarkan tentang besar kecilnya pengaruh antar elemen pariwisata berkelanjutan yang terdapat di Wisata Desa Adat Pancasari. Letak masing-masing elemen yang berpengaruh, ditunjukkan oleh nilai hubungan (*relation*) yang dihasilkan pada pengurangan vektor baris dan vektor kolom masing-masing elemen. Adapun pengaruh tiap-tiap elemen dijelaskan sebagai berikut:

1. Elemen C (kearifan lokal) merupakan elemen dengan letak tertinggi pada koordinat y dengan nilai positif, yang artinya dapat memberikan pengaruh pada elemen lain yang terletak dibawahnya, yaitu elemen B (status kepemilikan lahan), E (mata pencaharian), D (migrasi penduduk), A (guna lahan), F (ketenagakerjaan), G (karakteristik wisatawan), dan H (akomodasi wisata). Berdasarkan pada perhitungan matrik *net influence*, elemen C (kearifan lokal paling kuat memberikan pengaruh terhadap elemen G

(karakteristik wisatawan) dengan nilai 0,041 dan paling lemah terhadap elemen D (migrasi penduduk) dengan nilai 0,022.

2. Elemen B (status kepemilikan lahan dapat memberikan pengaruh terhadap elemen E (mata pencaharian), elemen A (guna lahan), elemen D (migrasi penduduk), elemen F (ketenagakerjaan), elemen G (karakteristik wisatawan), dan elemen H (akomodasi wisata). Elemen ini paling kuat memberikan pengaruh terhadap A (guna lahan) dengan nilai 0,038 dan paling lemah memberikan pengaruh terhadap elemen G (karakteristik wisatawan) dengan nilai 0,014.
3. Elemen E (mata pencaharian) memiliki nilai positif yang dapat memberikan pengaruh terhadap elemen D (migrasi penduduk), F (ketenagakerjaan), dan G (karakteristik wisatawan). Elemen E paling kuat memberikan pengaruh terhadap elemen F (ketenagakerjaan) dengan nilai 0,029. Elemen ini dapat menerima pengaruh dari beberapa elemen yang terletak dibawahnya, karena adanya nilai positif dari elemen tersebut yang dapat memberikan pengaruh. Elemen E (mata pencaharian) dapat menerima pengaruh dari elemen C (kearifan lokal), elemen B (status kepemilikan lahan), elemen A (guna lahan), dan elemen H (akomodasi wisata).
4. Elemen A (guna lahan) dapat memberikan pengaruh terhadap elemen yang terletak dibawahnya, yaitu elemen D (migrasi penduduk), elemen F (ketenagakerjaan), elemen G (karakteristik wisatawan), dan H (akomodasi wisata). Elemen ini paling kuat mempengaruhi elemen D (migrasi penduduk) dengan nilai 0,028. Elemen ini dapat memberikan pengaruh terhadap elemen yang memiliki nilai y lebih tinggi darinya, yaitu elemen E (mata pencaharian) dengan nilai kekuatan pengaruh paling lemah , yaitu 0,016.
5. Elemen D (migrasi penduduk) hanya dapat memberikan pengaruh pada elemen H (akomodasi wisata) dengan nilai kekuatan pengaruh sebesar 0,004. Elemen ini lebih banyak menerima pengaruh dari keenam elemen lainnya.
6. Elemen F (ketenagakerjaan) memiliki nilai negatif, sehingga hanya dapat menerima pengaruh dari elemen lain. Namun, pada keadaan tertentu elemen ini dapat memberikan pengaruh. Pada kasus ini, elemen F (ketenagakerjaan) dapat memberikan pengaruh terhadap elemen D (migrasi penduduk) karena

pada hubungan kedua elemen ini, nilai F adalah positif dan memiliki nilai kekuatan pengaruh sebesar 0,011.

7. Elemen G (karakteristik wisatawan) juga merupakan elemen yang memiliki nilai koordinat y negatif, sehingga sebagian besar hubungan yang terjadi pada elemen ini adalah menerima pengaruh dari elemen yang lain. Namun, pada keadaan tertentu elemen ini juga dapat memberikan pengaruh. Pada kasus ini, elemen G (karakteristik wisatawan) dapat memberikan pengaruh terhadap elemen F (ketenagakerjaan) dengan nilai 0,003 dan elemen H (akomodasi wisata) dengan nilai 0,008.
8. Elemen H (akomodasi wisata) juga lebih banyak menerima pengaruh daripada memberikan pengaruh karena nilai negatif pada koordinat y yang dimilikinya. Elemen ini hanya dapat memberikan pengaruh pada elemen E (mata pencaharian) dengan nilai 0,002 dan elemen F (ketenagakerjaan) dengan nilai 0,025.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa, elemen C (Kearifan Lokal) memiliki jumlah arah pengaruh yang paling banyak diantara elemen yang lain. Hal ini berarti elemen tersebut merupakan elemen yang dominan memberikan pengaruh terhadap elemen lain.

Kuat lemahnya pengaruh yang diberikan oleh kearifan lokal (C) terhadap elemen yang lain dapat dilihat pada tabel nilai pengaruh berikut ini:

Tabel 4. 30 Nilai pengaruh elemen kearifan lokal (C) terhadap elemen lain

Elemen	Pengaruh ke-	Nilai
C (Kearifan Lokal)	A (Guna Lahan)	0,023
	B (Kepemilikan Lahan)	0,036
	D (Migrasi Penduduk)	0,022
	E (Mata Pencaharian)	0,030
	F (Ketenagakerjaan)	0,024
	G (Karakteristik Wisatawan)	0,042
	H (Akomodasi Wisata)	0,021

Sumber: Hasil Analisis, 2013

Berdasarkan variasi nilai diatas, dapat dikelompokkan pengaruh mana saja yang masuk dalam kategori pengaruh lemah, sedang, dan pengaruh kuat. Setelah menghitung nilai tengah pada rentang data nilai diatas, maka pengaruh masing-masing elemen dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 4. 31 Pengelompokan pengaruh antar elemen

Interval	Keterangan
0,021-0,027	Pengaruh Lemah
0,028-0,035	Pengaruh Sedang
0,036-0,042	Pengaruh Kuat

Sumber: Hasil Analisis, 2013

Kemudian, hasil analisis dan intrepetasi diatas disesuaikan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan. Berikut ini merupakan pendapat dari masing-masing para ahli terkait hubungan yang terjadi antara kearifan lokal (Elemen C) dengan elemen pariwisata berkelanjutan yang disesuaikan dengan hasil analisis.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Tabel 4. 32 Rangkuman Kesesuaian Hasil Analisis Dan Hasil Interview

No.	Hubungan yang terjadi	Hasil analisis	Hasil interview	Penjelasan
1.	Kearifan lokal (C) terhadap guna lahan (A)	Kearifan lokal (C) memiliki kekuatan hubungan terhadap guna lahan (A) sebesar 0,023. Nilai 0,023 berarti pengaruh yang diberikan oleh kearifan lokal (C) terhadap guna lahan (A) adalah lemah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. I Gede Bagia: Adanya kegiatan wisata di Desa Adat Pancasari dapat memberikan perkembangan terhadap guna lahannya. Guna mempertahankan penggunaan lahan untuk beberapa kawasan suci, maka perlu adanya batasan-batasan guna lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan wisata. Hal tersebut telah diatur dalam suatu aig-awig desa adat dan telah menjadi bagian dari kearifan lokal Desa Adat Pancasari. 2. Nyoman Wartama : Penggunaan lahan di Desa Adat Pancasari sejak dulu hingga sekarang yang terus bertahan adalah penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Guna lahan perkebunan diarahkan pada kegiatan agrowisata akibat adanya kegiatan wisata. Dalam pengarahannya guna lahan perkebunan menjadi agrowisata, diatur dalam peraturan Desa Adat setempat dengan kebijakan pembagian hasil perkebunan untuk kegiatan wisata dan untuk kebutuhan penduduk setempat. 3. K. Lios Wirawantha: Arahan perkembangan guna lahan akibat adanya kegiatan wisata di Desa Adat Pancasari dapat dilihat dari batasan-batasan lahan yang telah ditetapkan oleh adat. Adat dalam suatu kearifan lokal memiliki ketentuan khusus dalam mengembangkan suatu kegiatan di Desa Adatnya, salah satunya untuk keperluan akomodasi 	Hubungan kearifan lokal dan penggunaan lahan di Desa Adat Pancasari dapat dijelaskan melalui adanya ketentuan khusus (kawasan sensitif, suci, bangunan) yang dapat mengendalikan penggunaan lahan disana, khususnya untuk kegiatan wisata dan kepentingan adat. Walaupun adanya ketentuan khusus tersebut, keberlanjutan kegiatan wisata di Desa Adat Pancasari dapat dilihat dari adanya pengembangan agrowisata di beberapa lahan perkebunan (sesuai peruntukkan fungsinya), dan hingga kini kegiatan agrowisata di Desa Adat Pancasari menjadi pusat kegiatan agrowisata stroberi terbesar yang ada di Bali. Guna mengendalikan arah pengembangan suatu kawasan dengan aktivitas seperti agrowisata diatas, maka penggunaan lahan perkebunan dapat dipertegas terkait batasan-batasan untuk keperluan wisata dan keperluan adat melalui suatu peraturan adat (kearifan lokal).

No.	Hubungan yang terjadi	Hasil analisis	Hasil interview	Penjelasan
2.	Kearifan lokal (C) terhadap kepemilikan lahan (B)	Pengaruh kearifan lokal (C) terhadap status kepemilikan lahan (B), yaitu sebesar 0,036. Nilai 0,036 berarti bahwa pengaruh yang diberikan oleh kearifan lokal (C) terhadap kepemilikan lahan adalah kuat.	<p>wisata.</p> <p>4. Nengah Sudartayasa: Desa Adat Pancasar memiliki konsep <i>Desa Kala Patra</i> yang tidak dapat terlepas dari penggunaan lahannya. <i>Desa Kala Patra</i> yang dimaksud adalah penentuan batasan-batasan kawasan suci dan kawasan lain di Desa Adat Pancasari, sehingga dapat mengendalikan penggunaan lahan yang terdapat di Desa Adat Pancasari.</p> <p>5. Sukerawan: Penggunaan lahan di Desa Adat Pancasari dikendalikan melalui suatu tatanan khusus oleh karena adanya kawasan suci Pura Desa Adat, dan adanya lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan adat.</p> <p>1. I Gede Bagia: Di Desa Adat Pancasari terdapat pembagian kepemilikan hak atas tanah yang telah diatur dalam suatu peraturan adat.</p> <p>2. Nyoman Wartama : Berdasarkan peraturan adat yang terdapat di Desa pancasari, pembagian hak kepemilikan tanah dibagi menjadi tiga, meliputi kepemilikan hak atas tanah milik (<i>tanah ayahan</i>), hak penggunaan tanah (<i>tanah druwe desa</i>), dan hak kepemilikan adat (<i>tanah pelabe Pura dan tanah pekarangan desa</i>).</p> <p>3. K. Lios Wirawantha: Penggunaan tanah untuk pengembangan akomodasi wisata disesuaikan dengan kepemilikan tanah terutama tanah milik desa adat.</p> <p>4. Nengah Sudartayasa: Walaupun terbagi</p>	<p>Hubungan kearifan lokal (C) terhadap status kepemilikan lahan dapat dilihat dari adanya pengaruh yang diberikan oleh kearifan lokal terhadap elemen kepemilikan lahan. Kaitannya dengan kegiatan pariwisata di Desa Adat Pancasari sehingga berkelanjutan, yaitu kepemilikan lahan yang telah diatur oleh adanya kearifan lokal membagi Desa Pancasari menjadi beberapa kawasan adat, kawasan penggunaan, dan kawasan kepemilikan masyarakat setempat. Kawasan penggunaan merupakan kawasan yang diijinkan untuk mengembangkan kegiatan wisata. Hal ini jelas terlihat pada perkembangan akomodasi wisata dalam status kepemilikan lahan. Namun, pada</p>

No.	Hubungan yang terjadi	Hasil analisis	Hasil interview	Penjelasan
3.	Kearifan lokal (C) terhadap migrasi penduduk (D)	Kearifan lokal (C) memberikan pengaruh terhadap migrasi penduduk (D), yaitu sebesar 0,022. Nilai 0,022 ini berarti bahwa pengaruh yang diberikan oleh kearifan lokal (C) terhadap migrasi penduduk (D) adalah lemah.	<p>menjadi beberapa status kepemilikan, namun tanah yang terdapat di Desa Pancasari hanya dapat disewakan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan pariwisata, dan tidak dapat dijual ke orang lain.</p> <p>5. Sukerawan: Peraturan adat (<i>awig-awig</i>) telah mengatur batas-batas kepemilikan lahan di Desa Pancasari. Jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan hak atas lahan, pengembang di lahan tersebut akan dikenakan retribusi khusus yang harus dibayarkan kepada adat sebagai ganti rugi penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan hak kepemilikannya.</p> <p>1. I Gede Bagia: Kearifan lokal memiliki suatu tata nilai yang mengatur keberlangsungan hidup masyarakatnya, termasuk proses perpindahan penduduk. Di Desa Adat Pancasari, migrasi penduduk yang masuk ke Desa mempengaruhi adanya pertambahan permukiman. Kearifan lokal mengendalikan perkembangan permukiman di Desa Adat Pancasari dengan memperhatikan status kepemilikan lahan. Di Desa Adat Pancasari, lahan permukiman hanya dapat dikembangkan pada jenis tanah adat, yaitu tanah <i>druwe desa</i>.</p> <p>2. Nyoman Wartama : Desa Pancasari memiliki ketentuan pengembangan permukiman dalam kearifan lokal yang</p>	<p>periode setelah ditetapkan sebagai desa wisata, perkembangan akomodasi wisata melakukan pelanggaran karena terjadi di lahan adat. Selanjutnya hal ini dipertegas dengan adanya peraturan adat yang menjelaskan bahwa untuk pengembangan akomodasi wisata di lahan adat akan dikenakan pajak yang harus dibayarkan kepada adat. Toleransi ini tetap berjalan dengan menegaskan kembali bahwa ¼ dari lahan desa merupakan milik adat, yaitu bendesa adat yang hanya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pertanian dan sangat tidak diperbolehkan untuk mengembangkan fungsi lain.</p> <p>Dampak dari migrasi penduduk, terutama untuk penduduk yang masuk ke Desa Pancasari dapat mempengaruhi jumlah permukiman di Desa Pancasari. Perkembangan permukiman ini yang kemudian diatur dalam peraturan adat dalam suatu kearifan lokal. Pengaturan permukiman di Desa Adat Pancasari erat kaitannya dengan guna lahan dan status kepemilikan lahan yang ada, meliputi pengendalian kawasan yang dapat digunakan untuk bermukim penduduk pendatang, dan pengendalian mobilitas penduduk keluar Desa Adat Pancasari.</p>

No.	Hubungan yang terjadi	Hasil analisis	Hasil interview	Penjelasan
			<p>telah ditetapkan. Ketentuan untuk mengembangkan permukiman otomatis digunakan sebagai alat untuk mengendalikan laju perpindahan penduduk.</p> <p>3. K. Lios Wirawantha: Perpindahan penduduk yang masuk ke Desa Pancasari memiliki tujuan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor pariwisata. Maka dari itu, karyawan swasta yang khususnya bekerja di sektor pariwisata didominasi oleh penduduk pendatang.</p> <p>4. Nengah Sudartayasa: Kearifan lokal memiliki kaitan erat dengan keberadaan penduduknya, baik penduduk asli maupun pendatang. Setiap penduduk yang datang dipastikan memiliki tujuan yang jelas, dan memiliki hak, serta kewajiban yang diatur kemudian dalam adat. Penduduk yang datang, tidak dapat menjadi anggota desa adat, namun wajib mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.</p> <p>5. Sukerawan: Ketentuan yang diatur dalam kearifan lokal tentang adanya migrasi penduduk adalah terkait keanggotaan penduduk tersebut di Desa Adat Pancasari. Untuk penduduk yang masuk Desa Pancasari dan sejak awal memang bukan merupakan anggota Desa Pancasari, maka penduduk tersebut tidak dapat menjadi anggota Desa Adat Pancasari, yaitu mengikuti kegiatan adat, upacara adat desa, dll. Sedangkan, untuk penduduk</p>	

No.	Hubungan yang terjadi	Hasil analisis	Hasil interview	Penjelasan
4.	Kearifan lokal (C) terhadap mata pencaharian (E)	Kearifan lokal (C) memberikan pengaruh terhadap mata pencaharian (E), yaitu sebesar 0,030. Nilai 0,030 ini berarti bahwa pengaruh yang diberikan oleh kearifan lokal (C) terhadap mata pencaharian (E) adalah sedang.	<p>yang keluar Desa dan merupakan penduduk asli, penduduk tersebut tidak akan lepas dari hak dan kewajibannya sebagai anggota Desa Adat Pancasari.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Gede Bagia: Desa Adat Pancasari memiliki organisasi sosial yang dibentuk oleh pemuka adat dengan kearifan lokal yang mengatur terkait mata pencaharian penduduk di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Desa Pancasari. Organisasi tersebut disebut Subak. 2. Nyoman Wartama: mata pencaharian penduduk, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan berada dibawah naungan organisasi Subak. Organisasi ini melibatkan para pemuka adat, serta tokoh-tokoh masyarakat. Melalui forum yang pernah dilakukan, ditetapkan peraturan adat untuk pengelolaan hasil dari pertanian, perkebunan, dan peternakan. 3. K. Lios Wirawantha: Kegiatan pariwisata di Desa Adat pancasari memberikan peluang kerja untuk masyarakatnya. Jikalau ada masyarakat yang turut berkecimpung dalam kegiatan pariwisata, seperti mengembangkan suatu artshop, maka ada ketentuan khusus dari peraturan adat yang harus dipatuhi oleh masyarakat tersebut, yaitu berupa pembayaran retribusi kepada adat. 4. Nengah Sudartayasa: Mata pencaharian penduduk di Desa Pancasari dikendalikan oleh keberadaan organisasi sosial, yaitu 	Kearifan lokal memberikan pengaruh secara langsung terhadap mata pencaharian penduduk di Desa Adat Pancasari, yaitu melalui adanya <i>Subak</i> . Kaitannya dengan kegiatan pariwisata di Desa Pancasari, yaitu <i>Subak</i> membantu dalam pengelolaan hasil pertanian atau perkebunan penduduk setempat untuk kemudian di proporsikan untuk kebutuhan pariwisata dan kegiatan pasar. Sejak periode sebelum ditetapkan sebagai desa wisata, sebagian besar penduduk Desa Pancasari secara dominan menggeluti mata pencaharian sebagai petani tradisional. Hingga pada periode setelah menjadi desa wisata, penduduk lokal masih lebih dominan bermatapencaharian sebagai petani. Hal ini menyesuaikan dengan perkembangan guna lahan dan status kepemilikan lahan yang terjadi di Desa Pancasari.

No.	Hubungan yang terjadi	Hasil analisis	Hasil interview	Penjelasan
5.	Kearifan lokal (C) terhadap ketenagakerjaan (F)	Pengaruh kearifan lokal (C) terhadap ketenagakerjaan (F), yaitu sebesar 0,024. Nilai 0,024 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh kearifan lokal (C) terhadap ketenagakerjaan (F) adalah lemah.	<p>Subak. Hal ini bertujuan untuk menjalin kerjasama yang baik terutama untuk pendudu setempat dalam mengelola pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ada di Desa Adat Pancasari.</p> <p>5. Sukerawan: Kearifan lokal dengan peraturan adat yang ditetapkan memberikan perhatian pada mata pencaharian penduduk di Desa Pancasari.</p> <p>1. I Gede Bagia: Kearifan lokal di Desa Adat Pancasari memiliki tatanan khusus untuk mengatur pola pembagian kerja penduduknya. Sama halnya dalam pembagian mata pencaharian penduduknya.</p> <p>2. Nyoman Wartama: Pola/aturan adat di Desa Pancasari yang mengatur terkait ketenagakerjaan merupakan salah satu hubungan interpersonal sosial yang terjadi akibat adanya perkembangan pariwisata.</p> <p>3. K. Lios Wirawantha: Kegiatan wisata di Desa Adat Pancasari mempengaruhi ketenagakerjaan penduduk baik penduduk asli maupun pendatang. Penyerapan tenaga kerja untuk berbagai mata pencaharian di Desa Adat Pancasari diatur dalam suatu ketentuan adat. Misal, untuk sektor pertanian lebih diutamakan untuk memberdayakan sumber daya manusia yang merupakan penduduk asli penduduk.</p> <p>4. Nengah Sudartayasa: Pola pembagian tenaga kerja di Desa Adat Pancasari terbagi atas tenaga kerja untuk adat dan</p>	Kearifan lokal memberikan pengaruh terhadap ketenagakerjaan, yaitu dapat dilihat dari adanya pola pembagian kerja untuk kepentingan adat dan kepentingan pendukung desa adat. Sektor pertanian merupakan kepentingan adat yang mana di Desa Pancasari penyerapan tenaga kerjanya ditujukan untuk penduduk asli. Sedangkan, untuk penduduk pendatang hanya dimungkinkan untuk menjadi tenaga kerja di bidang kegiatan pendukung di Desa Adat Pancasari, yaitu sektor pariwisata. Ketenagakerjaan di Desa Adat Pancasari menyesuaikan dengan mata pencaharian yang sebelumnya telah diatur dalam tata cara/prosedur suatu kearifan lokal.

No.	Hubungan yang terjadi	Hasil analisis	Hasil interview	Penjelasan
6.	Kearifan lokal (C) terhadap karakteristik wisatawan (G)	Pengaruh kearifan lokal (C) terhadap karakteristik wisatawan (G), yaitu sebesar 0,042. Nilai 0,042 menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh kearifan lokal (C) terhadap karakteristik wisatawan (G) adalah kuat. Hubungan pengaruh ini merupakan yang paling kuat diantara yang lainnya.	<p>tenaga kerja untuk kegiatan pendukung desa adat. Salah satu kegiatan pendukung, yaitu kegiatan wisata.</p> <p>5. Sukerawan: Penyerapan tenaga kerja untuk penduduk pendatang hanya dimungkinkan pada kegiatan pendukung desa, yaitu di sektor pariwisata. Sementara, untuk kegiatan adat seperti pertanian, tenaga kerja yang dipergunakan lebih mengutamakan penduduk setempat yang telah menjadi anggota desa adat.</p> <p>I Gede Bagia: Kearifan lokal di Desa Adat Pancasari memberikan keunikan tersendiri untuk Desa Adat Pancasari sebagai desa wisata, sehingga mempengaruhi kedatangan wisatawan yang memiliki karakter dan tujuan berkunjung sebagai penikmat budaya dan tradisi suatu kawasan wisata.</p> <p>2. Nyoman Wartama: Kearifan lokal merupakan suatu budaya yang dapat dijadikan daya tarik wisata untuk para wisatawan, atau yang sering disebut sebagai pariwisata budaya. Dengan menjadi daya tarik wisata ini, dapat meningkatkan kunjungan wisatawan berkunjung ke Desa Pancasari. Wisatawan yang berkunjung pun memiliki tujuan yang berbeda-beda, tidak hanya untuk berwisata.</p> <p>3. K. Lios Wirawantha: Wisatawan sangat menyukai keunikan adat/tradisi yang ada di suatu tempat wisata. Tujuan wisatawan</p>	Kearifan lokal memiliki pengaruh secara langsung terhadap karakteristik wisatawan dengan menjadi suatu daya tarik wisata. Daya tarik merupakan salah satu komponen kegiatan pariwisata. Pada periode sebelum ditetapkan sebagai desa wisata, telah ada kunjungan wisata yang datang ke Desa Pancasari hanya untuk melihat karakteristik desa tersebut hingga ditemukan potensi wisata yang dapat dikembangkan. Kemudian, pada periode setelah ditetapkan sebagai desa wisata, wisatawan melakukan kunjungan ke Desa Pancasari dengan tujuan menikmati daya tarik wisata yang terdapat di desa. Baik adat maupun kekayaan alamnya.

No.	Hubungan yang terjadi	Hasil analisis	Hasil interview	Penjelasan
7.	Kearifan lokal (C) terhadap akomodasi wisata (H)	Pengaruh kearifan lokal terhadap akomodasi wisata adalah sebesar 0,021. Nilai 0,021 ini menunjukkan bahwa pengaruh yang diberikan oleh kearifan lokal (C) terhadap akomodasi wisata (H) adalah lemah. Hubungan pengaruh ini merupakan yang paling lemah dibandingkan dengan yang lainnya.	<p>sendiri tidak hanya untuk berkunjung, melainkan juga ada yang berperan sebagai penikmat seni.</p> <p>4. Nengah Sudartayasa: Keaifann lokal di Desa Pancasari memiliki budaya yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisatawan domestik dan juga mancanegara.</p> <p>5. Sukerawan: Keunikan yang ada dapat dilihat dari komunitas adatnya, perilaku masyarakatnya, dan adat-adat tertentu yang terdapat di Desa Pancasari.</p> <p>1. I Gede Bagia: Pengembangan akomodasi wisata diatur dalam suatu kearifan lokal, seperti pemanfaatan lahan yang diijinkan untuk pengembangan akomodasi wisata, yaitu dengan tidak mengganggu batas-batas yang telah ditetapkan sebagai kawasan suci di Desa Adat Pancasari.</p> <p>2. Nyoman Wartama: Adapaun akomodasi yang dikembangkan, meliputi penginapan dan tempat makan. Ditemukan beberapa investor atau orang luar desa yang memiliki jasa akomodasi di Desa Pancasari. Hal ini dapat mengancam keberadaan masyarakat lokal, sehingga ditetapkan pemungutan pajak untuk penghasilan yang diperoleh selama 1 tahun oleh orang dari luar desa.</p> <p>3. K. Lios Wirawantha: Adapun peraturan adat penetapan retribusi yang dikenakan oleh adanya pengembangan akomodasi dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu:</p>	<p>Pengembangan akomodasi wisata disesuaikan dengan peraturan adat di Desa Pancasari. Perkembangan akomodasi wisata dikendalikan oleh adanya peraturan adat/kearifan lokal melalui pemberlakuan retribusi untuk setiap akomodasi yang dikembangkan baik oleh investor ataupun penduduk sendiri. Pengembangan akomodasi wisata di Desa Pancasari mengikuti peraturan penggunaan lahan dan status kepemilikan lahan yang juga diatur dalam kearifan lokal di Desa Adat Pancasari, yaitu meliputi batas kawasan suci Pura dan batas kawasan suci danau. Batas kawasan dan pembagian ruang di Desa Adat Pancasari telah diatur dalam suatu konsep <i>Tri Hita Karana</i> yang digunakan sebagai dasar pedoman dalam pengembangan akomodasi wisata.</p>

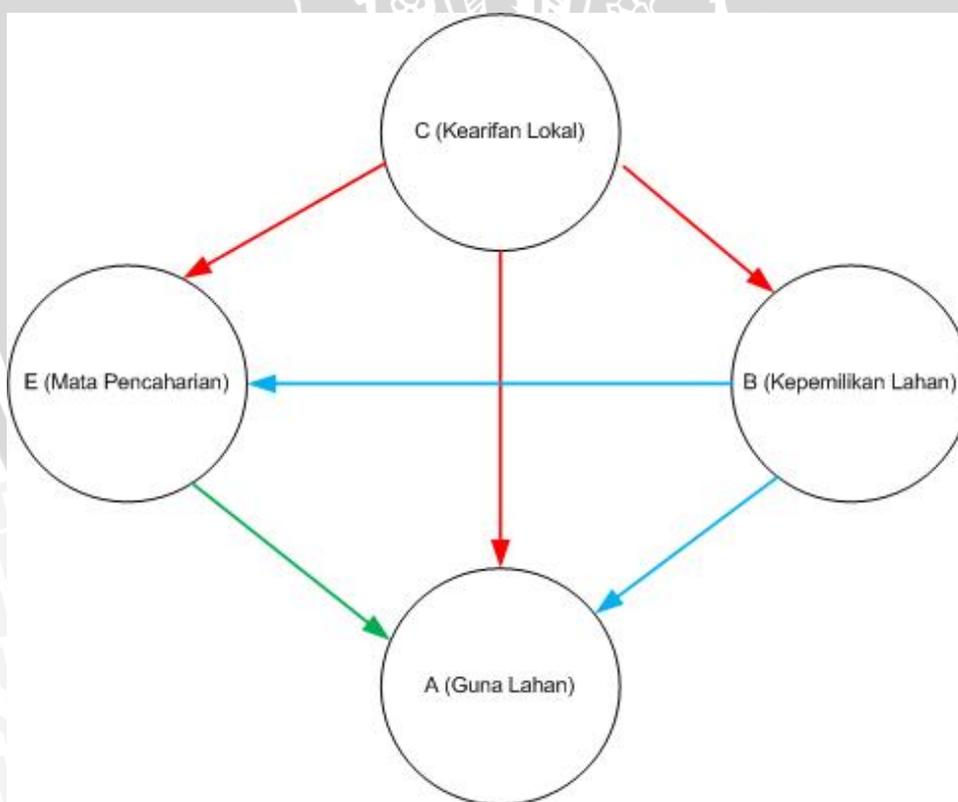
No.	Hubungan yang terjadi	Hasil analisis	Hasil interview	Penjelasan
			<ul style="list-style-type: none"> - Golongan A (omzet minimal Rp 1.000.000,-/hari) dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000,-/hari - Golongan B (omzet Rp 501.000,- sampai Rp 1.000.000,-/hari) dikenakan retribusi sebesar Rp 750,-/hari - Golongan C (omzet Rp 101.000,- sampai Rp 500.000,-/hari) dikenakan pajak sebesar Rp 500,-/hari - Golongan D (omzet Rp 100.000,- sampai Rp 51.000,-/hari) dikenakan retribusi sebesar Rp 300,-/hari - Golongan E (omzet Rp 10.000,- sampai Rp 50.000,-/hari) dikenakan retribusi sebesar Rp 100,-/hari <ol style="list-style-type: none"> 4. Nengah Sudartayasa: Kearifan lokal berkaitan erat terhadap pengendalian lahan akomodasi wisata. 5. Pengembangan akomodasi sesuai dengan kawasan suci yang ada, yaitu 8 meter untuk kawasan suci Danau Buyan yang dihitung dari tepi danau. 	

Sumber: Hasil Analisis, 2013

4.4.2 Hubungan keterkaitan

Pada sumbu x menjelaskan tentang letak/keberadaan suatu elemen dalam keberlanjutan wisata di Desa Adat Pancasari. Letak masing-masing elemen yang menunjukkan keterkaitan antar elemen dihasilkan melalui nilai kekuatan (*streght*), yaitu penjumlahan vektor baris dan vektor kolom masing-masing elemen. Semakin dekat letak antar elemen tersebut, maka semakin kuat keterkaitan yang dimiliki. Keterkaitan antar elemen dapat dilihat melalui skema berikut:

1. Keterkaitan elemen ditunjukkan oleh kedekatan beberapa elemen yang terletak berdekatan dengan elemen C (kearifan lokal). Elemen tersebut, yaitu elemen B (status kepemilikan lahan), elemen E (mata pencaharian), dan elemen A (guna lahan). Ketiga elemen ini memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan elemen C (kearifan lokal), dibandingkan dengan elemen yang lain. Keterkaitan dapat dilihat dari hubungan yang terjadi antar ke empat elemen yang digambarkan seperti dibawah ini:



Gambar 4. 16 Keterkaitan Elemen yang Paling Kuat

Sumber: Hasil Analisis, 2013

Kearifan lokal memiliki keterkaitan yang lebih kuat dengan elemen B (kepemilikan lahan), elemen E (mata pencaharian), dan elemen A (guna lahan). Antara elemen C (kearifan lokal) dengan elemen B (kepemilikan lahan) terlihat dari adanya pembagian batasan-batasan hak kepemilikan lahan di Desa Adat Pancasari. Kepemilikan lahan di Desa Adat Pancasari, meliputi tanah *druwe desa*, tanah *pelabe Pura*, tanah *ayahan*, dan tanah *pekarangan desa*. Kepemilikan lahan tersebut menentukan peruntukkan lahan yang dapat dikembangkan, misalnya untuk keperluan pertanian dan pariwisata yang juga merupakan sektor mata pencaharian di Desa Adat Pancasari. Maka dari itu, mata pencaharian masyarakat juga ditentukan oleh pembagian jenis penggunaan lahan yang terdapat di Desa Adat Pancasari. Elemen Kearifan lokal (C) memiliki keterkaitan dengan elemen E (mata pencaharian) terkait prosedur pembagian kerja hingga pada proses penyerapan tenaga kerja, dan pengelolaan hasil dari masing-masing sektor mata pencaharian di Desa Adat Pancasari.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

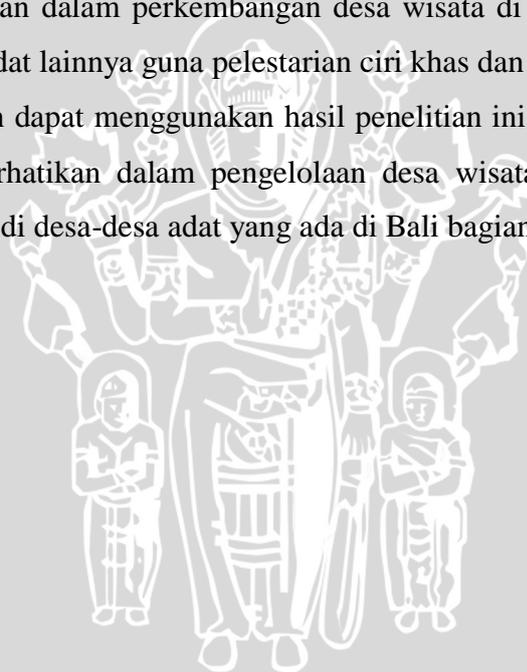
Kesimpulan dari penelitian yang berjudul Elemen Pariwisata Berkelanjutan Dalam Perkembangan Wisata Desa Adat Pancasari, adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis perhitungan DEMATEL, terbentuk hubungan pengaruh dan hubungan keterkaitan antar elemen. Hubungan pengaruh yang paling banyak diberikan oleh elemen C (Kearifan Lokal) terhadap elemen lain. Elemen C (Kearifan Lokal) dapat memberikan pengaruh kepada elemen A (Guna Lahan), elemen B (Kepemilikan Lahan), elemen D (Migrasi Penduduk), elemen E (Mata Pencaharian), elemen F (Ketenagakerjaan), elemen G (Karakteristik Wisatawan), dan elemen H (Akomodasi Wisata). Elemen C (Kearifan Lokal) paling kuat memberikan pengaruh terhadap elemen G (Karakteristik Wisatawan) dengan nilai 0,042, dan paling lemah memberikan pengaruh terhadap elemen H (Akomodasi Wisata) dengan nilai 0,041. Dilihat dari hubungan keterkaitan, elemen C (kearifan lokal) sebagai memiliki hubungan keterkaitan yang paling dekat dengan elemen B (kepemilikan lahan), elemen A (guna lahan), dan elemen E (mata pencaharian).
2. Elemen yang dominan memberikan pengaruh, adalah elemen C (kearifan lokal) dengan jumlah hubungan pengaruh yang terbentuk, yaitu sebanyak 7 arah pengaruh. Elemen yang dominan ini juga dilihat dari skema arah pengaruh pada diagram cartesius. Elemen C (kearifan lokal) terletak pada koordinat $y(0,272;0,182)$ dengan nilai y yang tertinggi, sehingga dapat memberikan pengaruh paling banyan terhadap elemen lain yang terletak dibawahnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Saran bagi penelitian lanjutan
 - a. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan pengaruh antar elemen yang lain yang belum dijelaskan dan keterkaitannya , serta menjelaskan pula pengaruh dan keterkaitan antar sub elemen.
 - b. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membuat suatu rekomendasi/strategi perencanaan dengan membandingkan keberlanjutan wisata desa adat pada desa-desa lain di Bali bagian utara.
2. Saran bagi pemerintah
 - a. Pemerintah hendaknya aktif untuk melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perkembangan desa wisata di Desa Adat Pancasari dan desa adat lainnya guna pelestarian ciri khas dan kebudayaan Bali.
 - b. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai elemen yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan desa wisata agar berkelanjutan, khususnya di desa-desa adat yang ada di Bali bagian utara.





DAFTAR PUSTAKA

Artawilaga, R. Rustandi. 1960. Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktek. Dalam *Interaksi Hukum Adat dengan Kepemilikan dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Asep Iman Budiman. Institut Teknologi Bandung.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng. 2012. *Kecamatan Sukasada Dalam Angka 2012*. Buleleng: BPS.

Bappeda Tingkat I Bali dan Universitas Udayana. 1982. Pengembangan Arsitektur Tradisional Bali untuk Keserasian Alam Lingkungan, Sikap Hidup, Tradisi dan Teknologi. Denpasar: Bappeda Tingkat I Bali.

Bhagawan Dwija. 2006. *Asta Kosala Kosali Bali*. (<http://www.babadbali.com/astakosalakosali/astakosala.htm>).

Cohen, E. 1984. "Toward a Sociology of International Tourism", *Sociological Research* 39(1): 164-182

Erawan, Nyoman. 1993. *Pariwisata dalam Kaitannya dengan Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa dalam Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa*. Denpasar: Upada Sastra.

Geriya, I Wayan. 1993. *Pariwisata dan Segi Sosial Budaya Masyarakat Bali dalam Kebudayaan dan Kepribadian Bangsa*. Denpasar: Upada Sastra

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata. 2007. *Membedah Konsep Pariwisata Berkelanjutan*. Sinar harapan: Jakarta. (<http://dieny-yusuf.com/membedah-konsep-pariwisata-berkelanjutan>)

Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 33 Tahun 2003 Tentang Penetapan Obyek Wisata Kabupaten Buleleng

Keputusan Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat No. 11/Kep/I/PHDIP/1994 tentang Bhisama Kesucian Pura

Mantra, Ida Bagus. 1998. *Pariwisata dan Perubahan Nilai-Nilai Sosial Budaya Berdasarkan Lingkungan Tradisi Pada Masyarakat Bali*. Jurnal Sosial Budaya Pariwisata.

Notohadiprawiro. 1987. *Tanah, Tata Guna Lahan, dan Tata Ruang Dalam Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah mada Press.

Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana)*. PT. Malta Printindo: Jakarta

Philip F. McKean. 1973. *The Traditions of Bali Will Prosper in Direct Proportion to The Success of Tourist Industry*. Jurnal Sosial dan Budaya Pariwisata.

Pitana, I Gde. 2002. *Apresiasi Kritis terhadap Kepariwisata Bali*, Denpasar: PT. The Works.

Pitana, I Gde. 2005. *Kearifan Lokal Di Tengah Modernisasi*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. CV. Andi Offset: Yogyakarta

Profil Pembangunan Desa Pancasari Tahun 2011

Rai Utama, I Gusti Bagus. 2013. Jurnal Penelitian. *Prinsip-Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*. (<http://tourismbali.wordpress.com/2013/03/10/prinsip-prinsip-pembangunan-pariwisata-berkelanjutan-2/>)

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Buleleng Tahun 2010

Richardson, John I dan Martin Fluker. 2004. *Understanding and managing Tourism*. Australia, NSY: Australia

Setiadi, Wicipto. 1999. *Proses Pengharmonisan Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Penelitian. Universitas Udayana: Denpasar

Shiung Lee, Wen. 2009. *Financial Investment Strategy by DEMATEL and Analytical Network Process*. Yuan Ze University: Jurnal Manajemen

Sumaryanto dan S. M Pasaribu. 1997. *Struktur Penguasaan Tanah di Pedesaan Lampung*. Prosiding Dinamika Sumberdaya dan Pengembangan Sistem Usaha Pertanian. Buku II. Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Wang, Wei-Chih; dkk. 2011. *DEMATEL-Based model to improve the performance in a matrix organization*. Elsevier: Jurnal Science Direct

Wiradana, I Putu Gede; dkk. 2007. *Penataan Sempadan Pantai Seseh Berdasarkan Konsepsi Penataan Ruang Tradisional Bali*. Jurnal Penelitian.

Wu, Wei Wen. 2007. *Choosing Knowledge Management Strategies By Using A Combined ANP and DEMATEL Approach*. Elsevier: Jurnal Science Direct